

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PETANI DAN PERKEBUNAN KOPI SISTEM PRIANGAN
DI CIREBON (1850-1870)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Army Porba

061314003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

PETANI DAN PERKEBUNAN KOPI SISTEM PRIANGAN

DI CIREBON

(1850-1870)

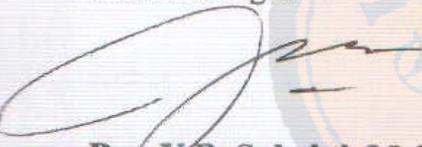
Oleh:

Arny Porba

NIM: 061314003

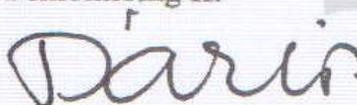
Telah disetujui oleh :

Pembimbing I:


Dr. Y.R. Subakti, M. Pd

Tanggal 31 Oktober 2011

Pembimbing II:



Dr. Anton Haryono, M. Hum

Tanggal 31 Oktober 2011

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PETANI DAN PERKEBUNAN KOPI SISTEM PRIANGAN
DI CIREBON**

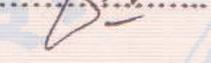
Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Arny Porba

NIM: 061314003

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 30 November 2011
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	Indra Darmawan, S.E., M. Si.	
Sekretaris	Dra. Theresia Sumini, M. Pd.	
Anggota	Drs. Y.R. Subakti, M. Pd.	
Anggota	Dr. Anton Haryono, M. Hum.	
Anggota	Drs. B. Musidi, M. Pd.	

Yogyakarta, 30 November 2011

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma



Dekan


Rohandi, Ph. D

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1) Yesus Kristus dan Bunda Maria yang senantiasa menjaga dan melindungi saya,
- 2) Kedua orangtua saya yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh cinta dan kasih sayang,
- 3) Adikku Cito Septana yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan,
- 4) Benediktus Brian Prasetyanto yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan,
- 5) Para Pendidik dan teman-teman angkatan 2006 di Pendidikan Sejarah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

Hidup kita diperkuat oleh banyak persahabatan. Mencintai dan dicintai merupakan kebahagiaan terbesar atas keberadaan kita.

(Sydney Smith)

Satu-satunya unsur terpenting dalam rasa percaya diri adalah menyukai diri anda sendiri.

(Fionna Harrold)

Yang membuat hidup kita diberkati, bukanlah mengerjakan hal-hal yang kita sukai, melainkan menyukai hal-hal yang harus kita kerjakan.

(Anon)

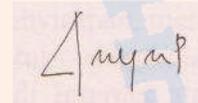
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 31 Oktober 2011

Penulis



Arny Porba

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Army Porba
Nomor Mahasiswa : 061314003

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul:

PETANI DAN PERKEBUNAN KOPI SISTEM PRIANGAN DI CIREBON (1850-1870)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal: 30 November 2011

Yang menyatakan



Army Porba

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

PETANI DAN PERKEBUNAN KOPI SISTEM PRIANGAN DI CIREBON

(1850-1870)

Oleh : Arny Porba

NIM : 061314003

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah Hindia Belanda, interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870, dan dampak dari pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan ekonomi, historis, politik, sosiologi, dan psikologi. Sedangkan model penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda berhubungan dengan rangka memaksimalkan potensi lahan-lahan subur, lahan yang belum diolah, dan tenaga kerja penduduk perkebunan kopi di Karesidenan Cirebon. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda mengadakan interaksi petani dan pemilik perkebunan dalam pengolahan lahan, laju pertumbuhan produksi, membangun dan menjaga perkebunan.

Kebijakan dan interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam budidaya tanaman ekspor atau yang lebih dikenal dengan *Cultuurstelsel* berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah Hindia Belanda terutama di Karesidenan Cirebon. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya budidaya tanaman ekspor tentu saja mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik di wilayah Karesidenan Cirebon. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda membuat rakyat Karesidenan Cirebon sangat menderita dan sengsara karena kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebenarnya untuk memperkaya pemerintah Belanda.

ABSTRACT

**THE FARMERS AND COFFEE PLANTATION *PRIANGAN* SYSTEM IN
CIREBON (1850-1870)**

By : Army Porba
Student number: 061314003

This research aims to describe and analyze the Netherland government's policy, interaction between farmers and owners of coffee plantation in Cirebon in 1850 – 1870, and the impact of the emplementation of the coffee plantation in Cirebon for the farmers and the plantation owners.

This research is based on the method of historical research covering four steps, which are heuristic, verification, interpretation, and historiography. The approaches are the approaches of economy, history, politics, sociology, and psychology. While, the writing model is analytical description.

The research result indicates that the Netherland government's policy had a relation with a project to maximize the potency of fertilized field, non-processed field, and labor of the coffee plantation in *Karesidenan* Cirebon. In addition, the Netherland government had an interaction between the farmers and the owners of the plantation in field management, growth rate of production, building and overseeing the plantation.

The policy and interaction conducted by the Netherland government in cultivation of export plants or well known as *Cultuurstelsel* had a wide impact towards the social life in the Netherland's area especially in *Karesidenan* Cirebon. The impacts caused by the cultivation of export plants influenced the economical, social, and political life in *Karesidenan* Cirebon area. The Netherland government's policy made the people of *Karesidenan* Cirebon suffer and miserable because, the policy created by the Netherland government was to enrich the Netherland government.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PETANI DAN PERKEBUNAN KOPI SISTEM PRIANGAN DI CIREBON (1850-1870)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Drs. Y.R. Subakti, M.Pd., dan Dr. Anton Haryono, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, membantu, dan memberi banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Y.R. Subakti, M.Pd., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, membantu, dan memberikan banyak pengarahan kepada penulis selama proses studi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
6. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, Perpustakaan Kolsani khususnya yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan skripsi ini.
7. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan dorongan spiritual dan material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
8. Benediktus Brian Prasetianto yang telah memberikan dorongan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
9. Adekku Cito Septana dan Irene Linda Widiastuti serta keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.
10. Keluarga Antonius Sugeng Hermanto dan Yohana Sri Supartini terimakasih atas dukungan dan doanya.
11. Keluarga H. Sumardi Widjaya dan Veronika Sugiyarti yang telah memberikan dukungan, bantuan dan doanya.
12. Saudaraku Natalia Elfa Nuraini yang telah memberi dukungan, bantuan dan doanya.
13. Seluruh teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

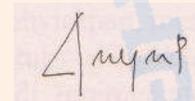
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 30 November 2011

Penulis



Army Porba



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Landasan Teori	19
F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan	30
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II : KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA	
TERHADAP PERKEBUNAN KOPI DI CIREBON	38
A. Kebijakan Pengolahan Lahan Subur	45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kebijakan Pemanfaatan Lahan yang Belum Diolah	63	
C. Kebijakan dalam Menggunakan Tenaga Kerja Perkebunan Kopi di Karesidenan Cirebon	67	
BAB III: INTERAKSI PETANI DAN PEMILIK PERKEBUNAN		
KOPI DI KARESIDENAN CIREBON	79	
A. Interaksi dalam Pengolahan Lahan	84	
B. Interaksi dalam Laju Pertumbuhan Produksi	96	
C. Interaksi dalam Membangun dan Menjaga Perkebunan Kopi	106	
BAB IV : DAMPAK PELAKSANAAN PERKEBUNAN KOPI DI KARESIDENAN CIREBON		109
A. Dampak Ekonomi	111	
B. Dampak Sosial	123	
C. Dampak Politik	134	
BAB V: KESIMPULAN	150	
DAFTAR PUSTAKA	157	
LAMPIRAN.....	165	
A. Peta Karesidenan Cirebon Tahun 1845	166	
B. Peta Wilayah Cirebon Tahun 1860 (Versi Junghuhn).....	167	
C. Peta Majalengka dan Kuningan Pada Tahun 1850.....	168	
D. Karesidenan Cirebon	169	
E. Karesidenan Cirebon dari Samping.....	170	
F. Kantor Karesidenan Cirebon Sekarang	171	
G. Gudang Kopi Masa <i>Cultuurstelsel</i>	171	
H. Proses Pengolahan Kopi	172	
I. Perkebunan Kopi	172	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

J. Pusat Pemerintahan Hindia Belanda di Dekat Pelabuhan Cirebon.....	173
K. Pelabuhan Cirebon.....	173
L. Keadaan di Sekitar Pelabuhan Cirebon.....	174
M. Keramaian di Pelabuhan Cirebon.....	175
N. Keadaan Pelabuhan Cirebon Sekarang.....	176
O. Johannes Graaf Van Den Bosch.....	176
P. J. C. Baud.....	177
Q. D. J. De Eearnes.....	177
R. A. J. Duymaer Van Twist.....	178
SUPLEMEN	179
A. Silabus.....	180
B. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.....	184

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR LAMPIRAN

- A. PETA KARESIDENAN CIREBON TAHUN 1845
- B. PETA WILAYAH CIREBON TAHUN 1860 (VERSI JUNGHUHN)
- C. PETA MAJALENGKA DAN KUNINGAN PADA TAHUN 1850
- D. KARESIDENAN CIREBON
- E. KARESIDENAN CIREBON DARI SAMPING
- F. KANTOR KARESIDENAN CIREBON SEKARANG
- G. GUDANG KOPI MASA *CULTUURSTELSEL*
- H. PROSES PENGOLAHAN KOPI
- I. PERKEBUNAN KOPI
- J. PUSAT PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA DI DEKAT PELABUHAN CIREBON
- K. PELABUHAN CIREBON
- L. KEADAAN DI SEKITAR PELABUHAN CIREBON
- M. KERAMAIAAN DI PELABUHAN CIREBON
- N. JOHANNES GRAAF VAN DEN BOSCH
- O. J. C. BAUD
- P. D. J. DE EARNES
- Q. A.J. DUYMAER VAN TWIST

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor itu.¹ Sejak masa pra-kolonial sistem kebun dikenal oleh masyarakat sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang bertujuan menghasilkan barang atau memproduksi hasil kebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sistem perkebunan yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia ini dikelola sendiri untuk kepentingan sendiri.

Oleh karena itu perkebunan bagi masyarakat Indonesia sebetulnya tidak asing lagi sebab sebelum dijajah oleh bangsa Barat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia perkebunan telah dikenal, yakni perkebunan yang bersifat tradisional dengan pengolahan lahan kecil dan dikelola sebagai usaha tambahan. Sistem kebun pada masa pra-kolonial biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, padat karya, penggunaan lahan kebun terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsistensi.²

Sejarah Indonesia sejak masa pra-kolonial hingga saat ini tidak dapat dilepaskan dari sektor perkebunan, karena sektor ini memiliki arti penting dalam menentukan sejarah perekonomian Indonesia, baik perekonomian sebelum

¹ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 12.

² Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1991), hlm. 4.

kedatangan bangsa Barat maupun sesudahnya. Perkebunan dianggap sebagai salah satu penentu perekonomian Indonesia karena sebelum kedatangan bangsa Barat di daerah Nusantara masyarakatnya telah mengenal perkebunan sederhana dari sistem ekonomi pertanian tradisional.

Perkembangan perkebunan di Indonesia sendiri pada awalnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisasi, kapitalisme, modernisasi yang dilakukan oleh bangsa Barat di wilayah jajahannya.³ Sistem perkebunan yang dikenalkan oleh Belanda di wilayah Hindia Belanda merupakan perpanjangan dari kolonialisasi Belanda, merupakan sistem perekonomian baru yang semula belum dikenal oleh Indonesia, sebab perkebunan di sini dimaksudkan untuk suatu sistem perekonomian bercorak kolonial, yakni perekonomian pertanian komersial. Sistem perkebunan Eropa yang telah diperkenalkan ini berbeda dengan sistem kebun yang telah dijalankan oleh masyarakat Hindia Belanda. Pertanian komersial merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi untuk memenuhi kebutuhan perdagangan. Sistem perkebunan yang dikenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda termasuk produksi yang berorientasi ekspor, diarahkan ke pasar dan berskala besar.⁴

Perkembangan perkebunan di Indonesia sendiri akan membawa perubahan dalam sistem perekonomian pertanian di wilayah Hindia Belanda. Perkembangan perkebunan di Indonesia juga berdampak pada kehidupan masyarakat Hindia Belanda sebab pada satu sisi perkebunan dianggap sebagai

³ *Ibid.* hlm. 3.

⁴ Freek Colombijn, *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), hlm. 361.

penghubung antara masyarakat Indonesia dengan ekonomi dunia. Perkebunan juga memberi keuntungan finansial yang besar, serta membuka kesempatan ekonomi baru. Namun di sisi lain perkembangan perkebunan dianggap sebagai kendala bagi ekonomi rakyat yang lebih makmur dan sejahtera sebab dalam masa kolonial penduduk Indonesia menderita dengan menjadi budak di rumah sendiri.

Sejarah perkebunan di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari peranan kolonial walaupun sebelumnya masyarakat Hindia Belanda telah mengenal perkebunan tradisional. Sejak awal kedatangan bangsa Barat yang mengidentifikasi diri sebagai pedagang sampai masa-masa ketika Barat identik dengan kekuasaan kolonial dan pemilik modal, perkebunan menjadi salah satu fakta yang tidak bisa diabaikan untuk menjelaskan keadaan masa lalu yang ada terutama fakta tentang perekonomian Indonesia pada masa penjajahan. Indonesia pada waktu itu dikenal dengan nama *Netherlands Indie* menjadi pusat produksi bahan-bahan mentah pertanian yang penting.⁵

Selain itu, perkebunan memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian dan kondisi sosial masyarakat di Hindia Belanda. Di sini perkebunan yang dikenalkan oleh penjajah dapat dikatakan sebagai dasar utama dalam perekonomian Indonesia walaupun di bawah kendali pemerintahan Belanda. Sistem perkebunan yang ada di Indonesia merupakan suatu sistem ekonomi yang diperkenalkan lewat kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Seperti halnya dengan negara berkembang lainnya, sistem perkebunan di

⁵ Mubyarto, *op.cit.* hlm. 12.

Indonesia juga dikenalkan lewat kolonialisme Barat, dalam hal ini kolonialisme Belanda.⁶ Sistem perkebunan yang dikenalkan oleh bangsa Barat diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks.⁷ Dengan demikian sistem perekonomian perkebunan merupakan perekonomian modern yang mendapat pengaruh dari perkembangan kolonialisme, kapitalisme, dan modernisasi yang berasal dari bangsa Barat.

Bagi pemerintahan Belanda sendiri perkebunan merupakan faktor terpenting dalam menghasilkan komoditas ekspor yang diperlukan di negara Eropa sehingga pemerintah Belanda dapat memperoleh keuntungan. Pada awal abad ke 18 Belanda mengalihkan fokus perdagangan kepada tanaman perkebunan, seperti kopi, tembakau, tebu, kina, teh, karet, kelapa sawit. Pengalihan kebijakan pemerintahan Belanda ini dipicu adanya persaingan perdagangan antara Belanda dan Inggris serta meningkatnya kebutuhan akan kopi, teh, kina, dan karet di Eropa sehingga Belanda mengalihkan perhatiannya dari perdagangan menjadi perkebunan.

Sejak masa tradisional (pra-kolonial) sampai dengan penjajahan VOC (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*), sistem usaha perkebunan menjadi sumber produksi komoditi perdagangan yang penting. Bahkan pada masa VOC sistem usaha perkebunan rakyat menjadi sumber eksploitasi komoditi perdagangan untuk pasaran Eropa.⁸ Dengan adanya sistem perkebunan tersebut maka wilayah Hindia Belanda diperkenalkan dengan tanaman-tanaman baru

⁶ *Ibid.* hlm. 9.

⁷ *Ibid.* hlm. 4.

⁸ *Ibid.* hlm. 10.

yang dibawa oleh penjajah untuk dibudidayakan atau diolah di negeri jajahan, misalnya saja tanaman kopi yang dikenalkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan VOC. Tanaman kopi yang diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah perekonomian Indonesia terlebih tanaman ini sendiri juga berperan dalam perjalanan perekonomian Indonesia di masa kolonial. Tanaman kopi masuk ke Indonesia pertama kali pada tahun 1696.⁹ Di pulau Jawa tanaman kopi baru mendapatkan perhatian penuh pada tahun 1699, karena tanaman tersebut dapat berkembang dan berproduksi dengan baik. Percobaan penanaman ini pada mulanya berada di sekitar wilayah Jayakarta. Setelah percobaan penanaman di daerah tersebut, kemudian biji-biji itu dibagi-bagikan kepada para bupati Jawa Barat untuk ditanam.¹⁰ Salah satu daerah yang strategis dan cocok untuk pembudidayaan tanaman kopi yaitu daerah Priangan.

Usaha VOC untuk dapat meningkatkan pendapatan yaitu dengan memperbesar jumlah penyerahan wajib terhadap komoditi perdagangan dan mengembangkan sistem penanaman wajib komoditi kopi di berbagai daerah. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799 maka pengelolaan perkebunan dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Wilayah perkebunannya meliputi daerah Priangan, baik Priangan Barat maupun Priangan Timur, dan daerah kasultanan Cirebon atau yang disebut dengan Priangan Cirebon.¹¹ Tanaman kopi pada periode *Cultuurstelsel* merupakan tanaman yang paling banyak diusahakan

⁹ [http://id.wikipedia.org/wiki/komoditi kopi](http://id.wikipedia.org/wiki/komoditi_kopi) diakses pada tanggal 19 Februari 2010 pukul 09:50 AM.

¹⁰ AAK, *Budidaya Tanaman Kopi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 19.

¹¹ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op. cit.* hlm. 33.

di Karesidenan Jawa, karena kopi merupakan jenis tanaman ekspor yang bisa ditanam di seluruh Karesidenan.¹² Kopi dikembangkan di daerah Priangan Barat dan Timur maupun Priangan Cirebon karena didukung beberapa faktor yaitu faktor geografi, ekonomi, dan demografi.

Faktor geografi Priangan Barat, Priangan Timur, maupun Priangan Cirebon mendukung keberhasilan penanaman kopi. *Pertama*, faktor alami yang dimiliki daerah Priangan maupun Cirebon memungkinkan tanaman kopi dapat berkembang dengan baik, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. *Kedua*, daerah yang bergunung-gunung di Priangan memberikan perlindungan yang baik terhadap perkebunan kopi dari tiupan angin yang kuat. *Ketiga*, kesuburan tanah di Priangan maupun di Cirebon pada abad ke 18 masih baik untuk tanaman kopi.¹³ Dilihat dari letak geografisnya, Cirebon yang terdiri dari pesisir Cirebon merupakan pantai yang landai, tidak curam, sehingga mudah didatangi kapal-kapal; dataran rendah yang menghasilkan beras yang sangat berlimpah sehingga menjadi komoditi ekspor bahkan sampai ke Malaka; dataran tinggi dan lereng-lereng gunung di pedalaman Cirebon dengan ketinggian 1.000-1.700 m menghasilkan tanaman kopi yang berlimpah terutama sejak awal abad XVIII sampai dengan akhir abad XIX.¹⁴

Pembudidayaan tanaman kopi di daerah Priangan Cirebon juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi. *Pertama*, harga pembayaran kopi pada masa permulaan tidak hanya stabil dan mantap, tetapi juga tinggi. Di Cirebon,

¹² Mubyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 20.

¹³ *Ibid.* hlm. 35.

¹⁴ Depdibud, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra* (Jakarta: CV. Defit Prima, 1996), hlm. 115-116.

misalnya, harga kopi antara 15 dan 40 kali lebih tinggi daripada harga beras dalam ukuran timbangan yang sama. *Kedua*, Cirebon pada masa VOC merupakan salah satu pelabuhan penting di daerah pesisir utara Jawa dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di kepulauan Nusantara. Daerah pedalaman Cirebon yang mengelilingi kota Cirebon merupakan wilayah yang subur yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dari dataran tinggi Cirebon yaitu gunung Cermai, gunung Sawal, dan gunung Cakrabuana menghasilkan kayu yang berkualitas baik. *Ketiga*, pelabuhan Cirebon memainkan peranan penting pada masa pemerintahan Hindia Belanda terutama pada pelaksanaan *Cultuurstelsel* sejak tahun 1830. Pelabuhan Cirebon merupakan salah satu pelabuhan yang digunakan dalam kegiatan ekspor produk kopi ke negara Eropa dan pedalaman Cirebon yang subur merupakan salah satu penghasil komoditi ekspor terutama kopi.

Sementara faktor demografi yang mempengaruhi perluasan pembudidayaan kopi di Cirebon yaitu, tersedianya tenaga kerja untuk mengelola perkebunan kopi. Dari hasil penelitian Fernando dapat diketahui bahwa pada tahun 1815 rata-rata penduduk di daerah pedesaan lebih padat daripada di daerah kota Cirebon. Di kota Cirebon rata-rata penduduk sebanyak 130 jiwa sedangkan rata-rata penduduk di desa berjumlah 264 jiwa.¹⁵ Karesidenan Cirebon pada masa *Cultuurstelsel* (1830-1870) dianggap memiliki populasi untuk mengembangkan perkebunan kopi dan tebu. Jumlah penduduk Cirebon mengalami perkembangan yang signifikan setelah diterapkannya sistem Tanam

¹⁵ Depdibud, *op.cit.* hlm. 131.

paksa. Jumlah penduduk di Cirebon pada masa kolonial ternyata berkaitan dengan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda yang telah menempatkan keluarga besar pada kedudukan terhormat, karena dengan cara seperti itu keluarga besar (*sikep*) dapat lebih banyak menampung jumlah penumpang (*wuwung*) di rumahnya demi tersedianya kebutuhan tenaga kerja yang lebih banyak untuk mengolah kerja kerja wajib pertanian maupun kerja wajib lainnya. Tersedianya lahan sawah yang terus meningkat dari tahun-tahun, baik berupa pembukaan lahan baru maupun karena perubahan lahan kering menjadi tanah basah juga telah menjadi daya tarik lain di daerah tersebut untuk dijadikan sumber penghidupan. Namun pada akhirnya peningkatan jumlah penduduk di Keresidenan Cirebon pada periode kolonial telah menguntungkan pemilik perkebunan yang dalam produksinya selalu membutuhkan jumlah pekerja yang sangat banyak.¹⁶

Dengan melihat potensi kesuburan tanah yang dimiliki tanah Jawa, terutama Karesidenan Cirebon pemerintahan kolonial Belanda tetap mempertahankan struktur sosial pribumi. Struktur sosial pribumi dibentuk dengan tujuan mempermudah pemerintah Hindia Belanda untuk mencari tenaga kerja.

¹⁶<http://ridwansubagja.blogspot.com/2008/01/kondisi-sosial-ekonomi-petani-tebu-di.html> diakses pada tanggal 13 Agustus 2010 pukul 2:20 PM.

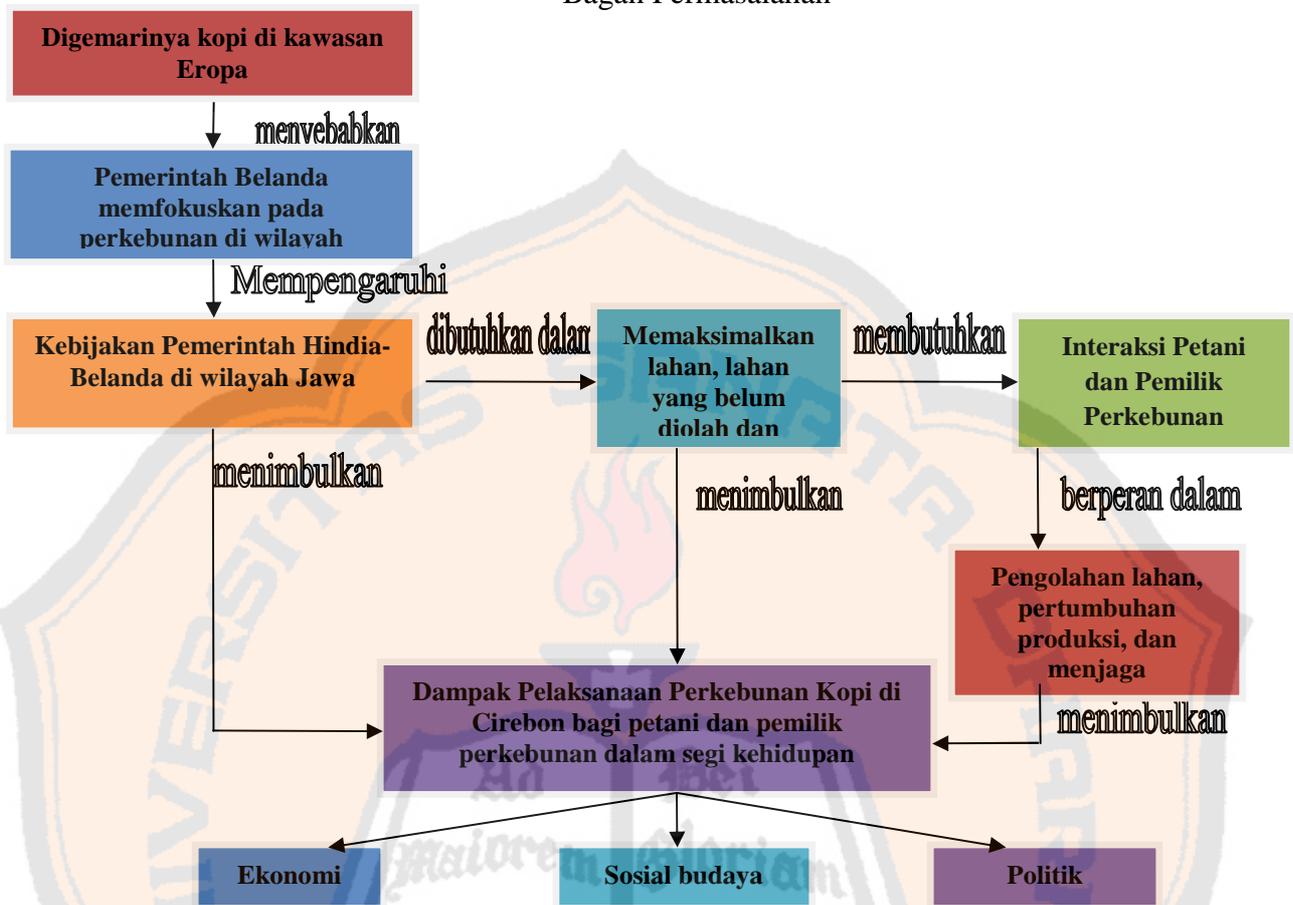
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah di atas maka studi ini akan mengkaji tentang petani dan perkebunan kopi sistem Priangan di Cirebon pada tahun 1850-1870. Adapun permasalahannya sebagai berikut yaitu :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di Cirebon?
2. Bagaimana interaksi petani dan pemerintah Hindia Belanda selaku pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870?
3. Bagaimana dampak dari pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan?

Pada permasalahan pertama akan dianalisis mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang berhubungan dengan usaha memaksimalkan potensi lahan-lahan yang subur, lahan-lahan yang belum diolah, dan tenaga kerja penduduk perkebunan kopi di Karesidenan Cirebon. Pada permasalahan kedua akan dianalisis tentang interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi dalam pengolahan lahan, laju pertumbuhan produksi, dan dalam membangun dan menjaga perkebunan. Pada permasalahan ketiga akan dianalisis tentang dampak ekonomi, sosial, dan politik perkebunan kopi bagi petani dan pemilik perkebunan di Cirebon.

Bagan Permasalahan



C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam perkebunan kopi di Cirebon.
- b. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon.
- c. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pelaksanaan perkebunan kopi yang dilakukan di Cirebon dengan sistem Priangan bagi petani dan pemilik perkebunan.

2. Manfaat Penulisan

a. Bagi Program Studi Pendidikan Sejarah

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi dalam penelitian sejarah perkebunan khususnya tentang *Cultuurstelsel*.

b. Bagi Sanata Dharma

Untuk melaksanakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian untuk Ilmu Pengetahuan Sosial. Penulisan ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya khasanah pustaka.

c. Bagi Perkembangan Pengetahuan Sejarah

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah dan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan sejarah tentang sejarah perkebunan di Indonesia, terutama sejarah perkebunan kopi di Cirebon yang menggunakan sistem Priangan.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang sejarah perkebunan kopi di Indonesia terutama di daerah Cirebon.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber merupakan unsur pokok dalam penulisan sejarah. Sumber tertulis maupun sumber lisan dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer ialah sumber yang keterangannya diperoleh secara langsung dari yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala

sendiri. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang keterangannya diperoleh pengarangnya dari orang lain atau sumber lain.¹⁷ Dalam tinjauan pustaka, penulis menggunakan sumber-sumber sejarah sebagai bahan dalam penulisan “Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon”.

Adapun sumber-sumber primer yang akan digunakan oleh penulis adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku. Sumber primer yang digunakan antara lain adalah :

Pertama, karya Pieter Cieter Creutzberg dan J.T.M. Van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Yayasan Obor.¹⁸ Karya Pieter dan Van Laanen (1987) memberikan gambaran tentang demografi di Indonesia pada zaman pemerintah Hindia-Belanda dengan menggunakan data kependudukan dari awal abad XIX sampai tahun 1930 dan perkembangan berbagai aspek kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Buku ini menguraikan berbagai masalah, misalnya penduduk, konsumsi, dunia usaha, kebijaksanaan pemerintah kolonial, investasi, perdagangan, sistem moneter dan perbankan.¹⁹ Selain itu, buku tersebut juga membahas pertumbuhan penduduk pribumi di Jawa dan Madura sejak tahun 1800 yang mengalami peningkatan dan perubahan yang terjadi dalam tingkat hidup sosial ekonomi masyarakat di Pulau Jawa dan Madura,²⁰ juga tentang hasil bumi Hindia Belanda untuk ekspor pada masa

¹⁷Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978) hlm. 37.

¹⁸Pieter Cieter Creutzberg dan J.T.M. Van Laanen. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 1987).

¹⁹*Ibid.* hlm. 295.

²⁰*Ibid.* hlm. 26.

Cultuurstelsel (tanam paksa) tahun 1830 yang mewajibkan petani daerah Jawa untuk menanam produk-produk ekspor.

Kedua, karya Robert van Niel. 2003. *Sistem Tanam paksa di Jawa*. Jakarta. Pustaka LP3ES.²¹ Karya Robert van Niel memberikan gambaran tentang perekonomian Hindia Belanda pada abad ke 19 yang tidak dapat dilepaskan dari sistem tanam paksa. Buku ini menjelaskan bahwa sistem tanam paksa merupakan eksploitasi Belanda, terutama di Jawa pada periode 1840-1860.²² Selain itu karya Robert van Niel juga membahas tentang perubahan sosial dan ekonomi pada abad ke 19 di Pulau Jawa, sebagai daerah utama pelaksanaan sistem tanam paksa. Perubahan sosial maupun ekonomi yang terjadi di Pulau Jawa disebabkan oleh eksploitasi kolonial melalui sistem tanam paksa yang menimbulkan involusi pertanian yang menciptakan kemiskinan petani Jawa. Dalam buku ini juga disebutkan pelaksanaan sistem tanam paksa merupakan periode masuknya sistem ekonomi uang di desa-desa. Robert van Niel menunjukkan bahwa sekitar 65-70 persen keluarga petani Jawa dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kolonial. Buku ini juga memberikan gambaran rinci mengenai peran kepala-kepala desa di Jawa sebagai penghubung antara kekuasaan supra desa dengan penduduk desa.²³

Ketiga, karya Soediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari*

²¹ Robert van Niel. *Sistem Tanam Paksa di Jawa* (Jakarta:LP3ES, 2003).

²² *Ibid.* hlm. 73.

²³ *Ibid.* hlm. 136.

Masa ke Masa. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.²⁴ Karya M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi membahas tentang sejarah keagrariaan, gerakan petani di Jawa Barat, dan tentang perjalanan sejarah keagrariaan di Indonesia.²⁵ Buku ini juga menggambarkan kelas-kelas tertentu di dalam masyarakat Jawa.²⁶ Dalam buku ini juga disebutkan bahwa kelas-kelas di dalam masyarakat berusaha untuk menguasai tanah untuk memperkokoh pelbagai kepentingan untuk kelasnya.²⁷ M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi menggambarkan keadaan penguasaan tanah-tanah di Jawa pada masa kolonial sehingga memunculkan secara nyata gambaran tentang struktur perekonomian desa.²⁸

Selain sumber primer di atas, penulis juga menggunakan sumber sekunder yang dapat mendukung dalam penelitian ini. sumber sekunder yang pertama adalah “Perkebunan Kopi ala Sistem Priangan”²⁹ dalam Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta. Aditya Media. Buku tersebut berisi tentang pengembangan penanaman kopi di daerah Priangan, keberhasilan penanaman kopi di Priangan oleh VOC, dan usaha-usaha memperluas penanaman kopi di daerah Jakarta dan Cirebon. Dari bab ini terlihat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penanaman kopi di daerah Priangan termasuk di wilayah Cirebon. Selain itu, Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo memberikan

²⁴Soediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).

²⁵*Ibid.* hlm. 40.

²⁶*Ibid.* hlm. 45.

²⁷*Ibid.* hlm. 65.

²⁸*Ibid.* hlm. 105.

²⁹Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo,*Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991).

gambaran tentang produksi kopi dan hasil kebun lainnya di Priangan, Batavia, dan Cirebon. Dalam hal produksi kopi unggul dalam harga kopi dibandingkan dengan harga beras.

Sumber sekunder yang kedua adalah “Petani dan Pembudidayaan Kopi di Karesidenan Cirebon, 1800-1900”³⁰ dalam Anne Booth, dkk. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Pustaka LP3ES. Buku ini membahas mengenai latar belakang budidaya tanaman kopi pada masa VOC di wilayah Priangan Cirebon, dan usaha untuk membudidayakan kopi di Cirebon pada tahun 1832.³¹ Di dalam karya Anne Booth ini juga dibahas tentang tenaga kerja yang bekerja di perkebunan milik pemerintah dan swasta di mana para petani *sikep* memikul tanggung jawab dan mempengaruhi para buruh tani yang hidup bersama mereka. Petani *sikep* mengerahkan sebagian besar pekerja yang diperlukan untuk sistem tanam paksa di Cirebon.³²

Sumber sekunder yang ketiga adalah “Sistem Tanam paksa, 1830-1850”³³ dalam J. S. Furnivall. 2009. *Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta. Freedom Institute. Buku ini membahas gagasan awal tanam paksa, dan kebijakan ekonomi yang diterapkan dalam tanam paksa.³⁴ Selain itu, buku ini membahas kemajuan ekonomi pada masa tanam paksa.

³⁰ Anne Booth, dkk, *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1988).

³¹ *Ibid.* hlm. 243.

³² *Ibid.* hlm. 246.

³³ J. S. Furnivall, *Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majaemuk* (Jakarta: Freedom Institute, 2009).

³⁴ *Ibid.* hlm. 123.

Sumber sekunder yang keempat adalah “ Sistem Sosial Ekonomi Abad XIX”³⁵ dalam Sartono Kartodirdjo. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta. PT. Gramedia. Buku karangan Sartono ini menggambarkan kondisi daerah agraris di Jawa pada awal abad XIX. Sebagian penduduknya hidup dari pertanian tradisional dan kehidupan masih komunal. Dalam buku ini juga digambarkan tentang sistem sosial ekonomi abad XIX dan pertumbuhan ekonomi abad XIX. Buku ini juga membahas tentang sistem tanam paksa yang menguntungkan bagi perekonomian Belanda terutama dengan komoditas ekspor kopi, teh, dan gula.³⁶ Sistem ekonomi perkebunan ini mampu memperkuat perekonomian Hindia Belanda.

Sumber sekunder yang kelima adalah Kompas. 2008. *Ekspedisi Anyer-Panaroekan Laporan Jurnalistik Kompas*. Jakarta.³⁷ Buku yang diterbitkan untuk memperingati 200 tahun jalan Anyer-Panaroekan mengulas tentang perjalanan Herman Willem Deandels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda selama tiga tahun (1808-1811).³⁸ Buku ini juga membahas pembangunan Jalan Raya Pos yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Willem Deandels. Pembangunan Jalan Raya Pos bertujuan untuk memperlancar proses pengangkutan tanaman kopi dan untuk menghadapi ancaman musuh.³⁹ Selain itu, buku ini juga membahas tentang kota-kota yang dilewati jalan Raya Pos. Buku ini juga membahas tentang perkebunan di sepanjang jalan Raya Pos

³⁵ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I* (Jakarta: PT. Gramedia, 1987).

³⁶ *Ibid.*, hlm. 325.

³⁷ Kompas, *Ekspedisi Anyer Panarukan Laporan Jurnalistik Kompas* (Jakarta: Kompas, 2008).

³⁸ *Ibid.* hlm. 68.

³⁹ *Ibid.* hlm. 85.

diawali *Cultuurstelsel* masa Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830. Ketika itu, kopi dan teh menjadi primadona perkebunan di Jawa.⁴⁰ Secara ringkas buku ini mengulas pelabuhan Cirebon yang telah mengalami banyak perubahan dengan keadaan pada masa lalu sebagai pelabuhan besar, serta tentang Cirebon sebagai pusat komoditas hasil perkebunan teh, kopi dan tebu.

Sumber sekunder yang keenam adalah Prajudi Atmosudirdjo. 1983. *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*. Jakarta. PT. Pradnya Pramita.⁴¹ Buku karangan Prajudi Atmosudirdjo ini antara lain membahas tentang bentuk-bentuk usaha ekonomi yang timbul dan berkembang pada tahun 1800,⁴² dimana penduduk Indonesia sedikit demi sedikit ikut berperan aktif di dalam kehidupan perekonomian. Selain itu, buku ini juga membahas tentang masyarakat Jawa yang meliputi kehidupan ekonomi feodal di bawah pemerintahan VOC yang berkaitan dengan tanam paksa di Priangan, yang kemudian meluas ke karesidenan Cirebon. Penanaman kopi di Priangan dan Cirebon ini dikendalikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan penyelenggaraannya diserahkan kepada bupati-bupati. Secara singkat buku ini membahas tentang keterlibatan penduduk lokal atau pribumi dalam mengelola perkebunan kopi di Priangan dan Cirebon. Buku-buku tersebut digunakan untuk membahas mengenai hasil bumi Hindia Belanda dalam memenuhi kebutuhan pasar Eropa.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 108.

⁴¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi* (Jakarta: PT. Pradnya Pramita, 1983).

⁴² *Ibid.* hlm. 112-114.

Sumber sekunder yang ketujuh adalah “Perkembangan Kesempatan Kerja Nonpertanian Di Karesidenan Cirebon, 1830-1930”⁴³ dalam Thomas.J. Lindblad. 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*. Jakarta. Pustaka LP3ES. Buku ini berisi tentang perkembangan pekerjaan nonpertanian di Cirebon yang tidak hanya melibatkan keluarga-keluarga pemilik nonsawah. Dalam hal ini keluarga dipekerjakan untuk memperoleh pendapatan untuk hidup. Selain itu, buku ini membahas masyarakat pedesaan di daerah Cirebon yang digambarkan sebagai replika dari kerajaan-kerajaan, perubahan sosio-ekonomi di tingkat desa serta mengenai pola ekonomi pedesaan di karesidenan Cirebon berdasarkan perkembangan pekerjaan nonpertanian.⁴⁴

Sumber sekunder yang kedelapan adalah Mubyarto, dkk. 1993. *Tanah Dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta. Aditya Media.⁴⁵ Dalam buku ini Mubyarto mengulas tentang latar belakang penggunaan tanah dan tenaga kerja serta pembudidayaan dalam subsektor perkebunan, pemanfaatan tanah dan tenaga kerja dari sebelum masa tanam paksa hingga munculnya Undang-Undang Pokok Agraria.⁴⁶ Selain itu, buku ini membahas tentang sejarah penggunaan tanah sebagai lahan perkebunan, pembudidayaan tanaman perkebunan dimulai pada masa VOC (1602)⁴⁷ hingga rusaknya perkebunan pada masa pendudukan Jepang dan masa berakhirnya kekuasaan penjajahan di Indonesia. dan penggunaan tanah pada beberapa komoditi perkebunan di berbagai daerah.

⁴³ J.Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2000).

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 159.

⁴⁵ Mubyarto, dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 30.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 16.

Sumber sekunder yang kesembilan adalah Jan Breman. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa Di Masa Kolonial*. Jakarta. Pustaka LP3ES.⁴⁸ Di dalam buku ini digambarkan tentang latar belakang sejarah daerah Cirebon, dengan titik perhatian pada pertumbuhan perkebunan serta dampaknya bagi perekonomian kaum petani⁴⁹ serta komunalisasi kepemilikan tanah di Cirebon pada masa Tanam paksa pada tahun 1830, alasannya adalah tenaga kerja langka maka perlu membagi-bagikan tanah kepada penduduk.⁵⁰ Dalam buku ini juga dijelaskan lapisan petani yang memiliki hak tanah di daerah Cirebon.

E. Landasan Teori

Penelitian ini berjudul Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon (1850-1870). Untuk dapat menjelaskan lebih jauh tentang permasalahan dan ruang lingkup penelitian ini, maka diperlukan uraian dari beberapa konsep supaya dapat menjelaskan dan menguraikan permasalahan penelitian ini. kerangka konseptualnya adalah :

1. Petani

Petani adalah orang yang bergerak di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman. Tujuan bertani adalah memperoleh hasil dari tanaman

⁴⁸ Jan Breman, *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja Jawa Di Masa Kolonial* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1986).

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 3.

⁵⁰ *Idem.*

tersebut untuk digunakan sendiri ataupun dijual kepada orang lain.⁵¹ Menurut deskripsi Mubyarto, petani merupakan komponen terpenting dalam membicarakan politik pertanian. Dua komponen terpenting adalah petani dan pemerintahan. Di satu pihak ada petani yang menggarap dan mengelola tanah, di lain pihak ada pemerintah (*government, sovereign*) yang mengatur dan mengusahakan suasana dan iklim yang segar agar pertanian dapat berkembang dan terus-menerus mengalami kemajuan.⁵² Sedangkan Thomas Stamford Raffles dalam karyanya *History of Java*, yang merupakan Letnan Gubernur Jenderal Inggris untuk Indonesia pada tahun 1811-1815, politik pertanian :

Prinsip untuk mendorong kegiatan rakyat di Jawa dalam mengolah dan memperbaiki tanah, dengan merangsang minat mereka pada hasil yang dapat diperoleh dari pekerjaan itu, hanya dapat diharapkan bila ada perubahan mendasar dari keseluruhan sistem pemilikan dan penguasaan tanah.⁵³

Alasan Raffles sampai pada kesimpulan ini, adalah karena ia mendapat kesan dari penelitiannya bahwa pemerintah (Belanda) sama sekali acuh tak acuh mengenai keadaan petani.⁵⁴

Pemerintah sangat sedikit mengetahui keadaan petani atau perilaku pegawai-pegawainya, dan memandang petani hanya sebagai alat untuk memproduksi sesuatu yang harus dikumpulkan oleh pegawai-pegawai pemerintahan tersebut. Yang diperhatikannya tidak lain adalah pengumpulan hasil tanah sebanyak-banyaknya; apapun mengenai keluhan-keluhan rakyat yang menderita sebagai akibat pungutan-pungutan ini, disumbat atau mungkin tidak akan diacuhkan kalau sampai juga kepadanya.⁵⁵

⁵¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Petani> diakses pada tanggal 19 Februari 2010 pukul 09:30 AM.

⁵² Mubyarto, *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm 17.

⁵³ Sir Thomas Stamford Raffles, *The History of Java*, (London: John Murray, 1817, edisi kedua 1830, vol. I, hlm. 170.

⁵⁴ Mubyarto, *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm 18.

⁵⁵ Sir Thomas Stamford Raffles, , *op.cit.* hlm. 160.

Dapat disimpulkan bahwa komponen penting dalam politik pertanian adalah petani yang melakukan pekerjaan di sektor pertanian. Bertani yang dilakukan oleh petani dianggap sebagai kehidupan pokok rakyat dan pemerintah pada saat itu (Belanda) sebagai penerima dari pertanian yang dilakukan oleh petani. Penerimaan pemerintah (Belanda) terdiri atas pembayaran pajak dan tenaga kerja untuk menggarap tanah.

Menurut Mubyarto dalam karyanya berjudul *Pengantar Ekonomi Pertanian*, pertanian dalam arti luas meliputi pertanian rakyat atau disebut pertanian dalam arti sempit, perkebunan (termasuk di dalamnya perkebunan rakyat dan perkebunan besar), kehutanan, dan perikanan.⁵⁶ Fokus perhatian berhubungan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang berorientasi pada perkebunan dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Menurut Gilarso, ilmu ekonomi mempelajari persoalan-persoalan yang berhubungan dengan usaha manusia untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.⁵⁷ Dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar I*, Gilarso menyebutkan dalam usaha untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sangat luas yang meliputi konsumsi dan produksi, perdagangan, uang dan pasar, ekspor, impor dan pajak, investasi.⁵⁸ Sementara itu, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa ilmu ekonomi yaitu usaha manusia mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk

⁵⁶ *Ibid.* hlm 16.

⁵⁷ T. Gilarso, *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar I*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 17.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 18.

kelangsungan hidupnya.⁵⁹ Pemikiran yang berpangkal pada faktor kelangkaan (*scarcity*) menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat pada kebijaksanaan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara pencapaian tujuan yang ditentukan.⁶⁰ Di lain sisi menurut Sukidin, pemikiran yang berpangkal pada faktor kelangkaan dipahami sebagai sosiologi ekonomi. Dalam buku "*Sosiologi Ekonomi*" Sukidin, menjelaskan bahwa sosiologi ekonomi adalah sebagai studi tentang bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka, dengan menggunakan pendekatan sosiologi.⁶¹

2. Perkebunan

Perkebunan yang dikenal sebelumnya jauh dari kata komersil atau untuk diperdagangkan. Menurut Koentjaraningrat, berkebun yang dilakukan dengan sistem berladang itu nampaknya merupakan suatu aktivitas tambahan.⁶² Kemudian dari pekerjaan sampingan atau tambahan tersebut lambat laun muncul perkebunan yang meluas untuk memenuhi kebutuhan orang lain (perdagangan). Keputusan petani dalam memproduksi barang perdagangan dilakukan sebagai usaha sampingan untuk memperoleh tambahan penghasilan. Dari sini dapat dikatakan bahwa perkebunan, mengalami perkembangan dimana hasil dari perkebunan mulai diperdagangkan.

Menurut Mubyarto, perkebunan di Indonesia dimulai dari sektor pertanian rakyat. Pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga yang

⁵⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 23.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 24.

⁶¹ Sukidin, *Sosiologi Ekonomi*, (Jember: Center for Society Studies), hlm. 10.

⁶² *Ibid.* hlm. 30-31.

memproduksi bahan-bahan makanan utama. Dalam perkembangan pertanian rakyat hampir tidak ada usaha tani yang memproduksi hanya satu macam hasil saja.⁶³ Perkembangan perkebunan juga tidak dapat dilepaskan dari kolonialisme, kapitalisme, modernisasi di dunia Barat. Setelah kedatangan bangsa Barat di Indonesia perkebunan merupakan sektor yang paling berpengaruh bagi perekonomian Hindia Belanda.

Berdasarkan deskripsi Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo menyatakan bahwa dalam negara berkembang, perkebunan hadir sebagai perpanjangan kapitalisme agraris Barat yang diperkenalkan melalui sistem perekonomian kolonial. Perkebunan pada awalnya hadir sebagai sistem perekonomian pertanian komersial (*commercial agriculture*) yang bercorak kolonial. Sistem perekonomian yang dibawa oleh pemerintah kolonial pada dasarnya adalah sistem perkebunan Eropa (*European plantation*), yang berbeda dengan sistem kebun (*garden system*) yang telah berlaku di negara-negara berkembang. Sebelum mengenal sistem dari Barat, di negara-negara berkembang mengenal sistem kebun sebagai bagian dari sistem perekonomian pertanian tradisional yang merupakan usaha tambahan atau pelengkap.⁶⁴

Ciri-ciri sistem perkebunan Barat yaitu berbentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, padat modal, lahan luas, organisasi tenaga kerja besar, pembagian kerja rinci, mengenal sistem upah buruh, memiliki struktur rapi,

⁶³*Ibid.* hlm. 32.

⁶⁴Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1991) hlm 3-4.

menggunakan teknologi modern, serta penanaman tanaman komersial untuk komoditi ekspor pasar dunia.⁶⁵

Sesuai dengan pendapat Miriam, perkembangan perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kelangkaan akan hasil perkebunan sehingga timbul kesenjangan antara kebutuhan permintaan dengan ketersediaan hasil perkebunan. Contohnya tanaman kopi dibudidayakan oleh bangsa Eropa terutama Belanda disebabkan kelangkaan kopi di Eropa sehingga menuntut usaha membudidayakan tanaman kopi di daerah jajahan.

Lebih lanjut, kegiatan perkebunan di wilayah Hindia Belanda mengalami perluasan sektor modern. Sektor modern terpusat pada produksi barang-barang primer, seperti produksi yang dihasilkan perkebunan. Perluasan sektor perkebunan modern cukup besar karena ditunjukkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri.

Perkebunan Hindia Belanda dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda maupun pihak swasta yang berorientasi kepada kepentingan negara-negara besar yang menjadi tempat pemasaran barang produksi.⁶⁶ Perkembangan perkebunan di wilayah Hindia Belanda pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupan sosial, politik, ekonomi berada di bawah kekuasaan Belanda.

Perkebunan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik pertanian yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut Mubyarto, Politik pertanian pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memperlancar dan mempercepat laju pembangunan pertanian khususnya dalam

⁶⁵ <http://ahmadfathulbari.multiply.com/journal/item/19> diakses pada tanggal 16 Maret 2010 pukul 12:40 PM.

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 9.

sektor perkebunan. Pembangunan pertanian tidak hanya menyangkut kegiatan petani saja, tetapi juga perusahaan-perusahaan pertanian dan perkebunan, perusahaan-perusahaan pengangkutan, perkapalan, perbankan, asuransi, atau lembaga-lembaga pemerintah.⁶⁷

3. Sistem Priangan

a. Sistem

Definisi sistem berkembang sesuai dengan konteks dimana pengertian sistem yang digunakan. Berikut ini akan diberikan definisi sistem secara umum :

1. Kumpulan dan bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama.
2. Sekumpulan obyek-obyek yang saling berelasi dan berinteraksi serta hubungan antar obyek bisa dilihat sebagai satu kesatuan yang dirancang untuk mencapai satu tujuan.

Dengan demikian, secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Murdick dan Ross mendefinisikan sistem sebagai seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sementara, definisi sistem dalam kamus *Webster's Unbrigid* adalah elemen-elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi.⁶⁸

⁶⁷ Mubyarto, *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm 13.

⁶⁸ Hanif Al Fatta, *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2007), hlm. 3.

Menurut Scott (1996), sistem terdiri dari unsur-unsur seperti masukan (input), pengolahan (processing), serta keluaran (output). Ciri pokok sistem menurut Gaspert ada 4 yaitu sistem itu beroperasi dalam suatu lingkungan, terdiri atas unsur-unsur, saling berhubungan, dan mempunyai satu fungsi atau tujuan utama. Sementara Mc. Leod (1995), mendefinisikan sistem sebagai sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan.⁶⁹

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, konsep "sistem" terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung kepada yang lain dan saling mengadakan interaksi. Karakteristik dari sistem yaitu bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu mempengaruhi seluruh sistem, dan sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan (environment) yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya.⁷⁰

b. Priangan

Kata *Priangan* berasal dari kata *parahyangan*. Akar kata *parahyangan* adalah *Hyang* atau *rahyang*. Pengertian kata ini adalah "daerah yang menjadi tempat tinggal Tuhan atau Dewa (Hyang) yang harus dihormati" atau "daerah yang menjadi tempat tinggal leluhur yang harus dihormati".⁷¹ Priangan merupakan salah satu wilayah di Propinsi Jawa Barat yang mencakup kabupaten

⁶⁹ *Ibid.* hlm. 4.

⁷⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 47.

⁷¹ <http://iqbal1.wordpress.com/2011/05/05/telisik-sunda-Priangan-dan-jawa-barat/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 2:06 PM.

Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis yang luasnya mencapai sekitar seperenam pulau Jawa (kurang lebih 21.524 km²).⁷²

Relief tanah daerah Priangan dibentuk oleh dataran rendah, bukit-bukit dan rangkaian gunung (gunung Gede, gunung Ciremai, gunung Kencana, gunung Masigit, gunung Salak, gunung Tangkuban Perahu, gunung Burangrang, gunung Malabar, gunung Bukit Tunggul, gunung Tampomas, gunung Calancang, gunung Cakra Buana, gunung Guntur, gunung Haruman, gunung Talagbodas, gunung Karacak, gunung Galunggung, gunung Cupu, gunung Cula Badak, gunung Bongkok, gunung Syawal.⁷³ Priangan dikelilingi oleh rangkaian pegunungan dan banyak sungai sehingga wilayah Priangan sangat subur.⁷⁴

Menurut Nana Supriatna,⁷⁵ Priangan merupakan daerah yang terdapat suku sunda Priangan. Suku Sunda Priangan terdiri atas dua bagian yaitu Priangan Barat dan Priangan timur. Suku Priangan Barat terdiri dari wilayah Cianjur, Sukabumi, Bogor. Suku Priangan Timur meliputi wilayah Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sumedang dan Bandung.

Wilayah Priangan jatuh ke dalam kekuasaan VOC sebelum Mataram benar-benar takluk kepada VOC pada tahun 1757.⁷⁶ Perjanjian Mataram dengan VOC tahun 1677 menyepakati Priangan Barat dan Tengah diserahkan kepada VOC, kemudian pada tahun 1705 Priangan Timur dan Cirebon jatuh ke dalam

⁷² <http://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 1:50 PM.

⁷³ *Idem.*

⁷⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 1:50 PM.

⁷⁵ Nana Supriatna, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial (geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*, (Jakarta: PT Grafindo Media Pratama, 2006), hlm. 16.

⁷⁶ <http://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 1:02 PM

kekuasaan VOC.⁷⁷ Pada tahun 1706, VOC mengangkat Pangeran Aria Cirebon menjadi Bupati Kompeni, yang bertugas mengawasi dan memimpin bupati-bupati di Priangan agar patuh pada kewajiban-kewajibannya kepada Kompeni.⁷⁸ Priangan menjadi salah satu sumber hasil bumi utama dengan adanya program yang disebut *Preangerstelsel* (Sistem Priangan), yang tujuan utamanya menghasilkan kopi.⁷⁹

Dalam sistem Priangan terdapat beberapa elemen yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan atau organisasi. Sistem Priangan, VOC membentuk suatu organisasi dan membentuk kesatuan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan. Tujuan VOC pada masa itu adalah mendapatkan keuntungan yang besar dari tanah Priangan yang cocok untuk ditanami kopi. VOC menamakan sistem tersebut dengan sebutan “sistem Priangan” karena sistem tersebut dijalankan di daerah Priangan Jawa Barat.

Sistem Priangan adalah sistem wajib penanaman kopi yang diterapkan oleh VOC kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda di tanah Priangan. Sistem Priangan diterapkan oleh VOC untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Menurut Prajudi, dalam sistem Priangan VOC mewajibkan penduduk di daerah Priangan untuk menanam komoditas ekspor, khususnya kopi.

Jadi dapat dikatakan bahwa sistem Priangan juga dapat disebut sistem tanam paksa kopi di daerah Priangan. Sistem ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengembangkan budidaya kopi di daerah-daerah lainnya, seperti di

⁷⁷ *Idem.*

⁷⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 1:02 PM

⁷⁹ *Idem.*

daerah Cirebon. Sistem Priangan sangat berpengaruh bagi perkebunan kopi yang dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda di Cirebon. Dengan berhasilnya sistem Priangan ini diterapkan di daerah Priangan sendiri komoditas ekspor kopi ke Eropa sangat mencukupi. Keberhasilan penerapan sistem Priangan di sini memacu pemerintah Hindia Belanda untuk memakai sistem ini di daerah Cirebon.

4. Cirebon

Cirebon berada di daerah pesisir Laut Jawa.⁸⁰ Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Cirebon berada pada posisi 6°30' – 7°00' Lintang Selatan dan 108°40' - 108°48' Bujur Timur.⁸¹ Bagian Utara merupakan dataran rendah, sedang bagian Barat Daya berupa pegunungan, yakni lereng Gunung Ciremai.⁸² Letak daratannya memanjang dari Barat Laut ke Tenggara.

Menurut R.A. Kern,⁸³ Cirebon merupakan kerajaan Jawa Cerbon dimulai sebagai tempat menetapnya kaum kolonis Jawa. Dalam karyanya *Het Javaanse Rijk Tjerbon in de eerste eeuwen van zijn bestaan* Kern, menyebutkan bahwa Cirebon merupakan tempat menetap orang Jawa di atas bumi Pasundan, orang-orang Sunda menyebutnya Cirebon. Berita tentang nama Cirebon menurut sumber Portugis, yaitu berita dari Tome Pires yang menyebutkan Cirebon dengan sebutan "Chorobon". Menurut catatan Pires, Cirebon adalah sebuah

⁸⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cirebon diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 2:19 PM.

⁸¹ *Idem.*

⁸² http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cirebon diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 2:19 PM.

⁸³ R.A. Kern dan Hoesein Djajadiningrat, *Masa Awal Kerajaan Cirebon*, (Jakarta: Bhratara,...), hlm 9.

pelabuhan yang indah dan selalu ada empat sampai lima kapal yang berlabuh di sana.

Pada tanggal 2 Februari 1809 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan keputusan khusus yang mengatur pembagian wilayah kekuasaan dan jabatan di Cirebon. Wilayah Cirebon kemudian dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian Utara disebut wilayah Kasultanan Cirebon yang meliputi Kuningan, Cirebon, Indramayu, dan Gebang; bagian Selatan yang disebut dengan tanah Priangan meliputi Limbangan, Sukapura, Galuh.⁸⁴

Cirebon sendiri merupakan daerah yang sangat penting bagi perdagangan serta pelayaran, sebab pada masa pra kolonial dan kolonial Cirebon merupakan pelabuhan yang ramai di tanah Jawa. Selain itu Cirebon merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar bangsa. Lokasinya di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat membuatnya berperan sebagai jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas.⁸⁵

F. Metodologi Penelitian dan Pendekatan

a. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan “Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon (1850-1870)”, penulis harus menggunakan suatu metode sebagaimana proses penelitian pada ilmu-ilmu sosial lainnya. Metode dalam

⁸⁴ ”Atja” dalam S. Edi Ekadjati, *Babad Cirebon Edisi Branders Tinjauan Sastra dan Sejarah*, (Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, 1978), hlm. 23.

⁸⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, (Jakarta: Depdibud, 1996), hlm. 4.

disiplin sejarah disebut metode sejarah berupa seperangkat aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesa hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.⁸⁶ Metode Sejarah terdiri atas pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

1. Pemilihan topik

Topik “Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan Di Cirebon (1850-1870)” dipilih oleh penulis dengan latar belakang keinginan dalam diri penulis. Perkembangan dalam sektor perkebunan sangat menarik untuk dibahas; dalam hal ini kegiatan perkebunan awal yang ditekuni oleh masyarakat masih bersifat “tradisional”; segala hasil perkebunan dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri. Kemudian mengalami perubahan dengan adanya kedatangan bangsa Barat; hasil-hasil perkebunan mulai dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Dalam sudut pandang penulis; petani mempunyai peranan yang sangat besar dalam perkebunan. Tenaga petani disalurkan sepenuhnya dalam sektor perkebunan akan tetapi tidak diimbangi dengan upah yang sesuai.

Topik harus memiliki nilai, yang artinya di sini harus berdasarkan pada pengalaman manusia yang dianggap paling penting terutama peristiwa-peristiwa yang dapat membawa perubahan dalam masyarakat. Topik yang dipilih oleh penulis ini memiliki nilai yang sangat mendalam bagi perekonomian bangsa Indonesia di mana pada awalnya pemerintah kolonial yang memperkenalkan sistem perkebunan yang bermanfaat bagi perekonomian

⁸⁶ Dudung Abdurhaman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta : Logos Wacana ilmu, 1999), hlm 91.

bukan saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Topik mengenai Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon ini dikatakan penting sebab perkebunan kopi yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda membawa perubahan bagi penduduk pribumi Indonesia dalam bidang komoditi tanaman perkebunan, dimana penduduk pribumi mulai diperkenalkan dengan tanamantanaman baru yang laku di pasaran Eropa.

2. Heuristik atau Pengumpulan Sumber

Setelah menentukan topik permasalahan yang akan diteliti, langkah selanjutnya yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian sejarah adalah melakukan pengumpulan sumber. Heuristik sendiri adalah proses pengumpulan data yang relevan untuk keperluan subyek yang diteliti.⁸⁷ Penulis menggunakan dua macam sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer yang digunakan bagi penulisan ini antara *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia, Sistem Tanam Paksa di Jawa, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku yang relevan bagi penulisan ini antara lain *Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial-Ekonomi, Sejarah Ekonomi Indonesia, Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme, Perkebunan Indonesia Di masa Depan, Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I, Ekspedisi Anyer-Panaroekan Laporan*

⁸⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1969), hlm. 35.

Jurnalistik Kompas, Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX.

3. Verifikasi atau Kritik Sumber

Tahapan selanjutnya adalah verifikasi atau lebih dikenal dengan kritik sumber. Verifikasi dilakukan untuk menghindari adanya kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.⁸⁸ Pada tahapan verifikasi terdiri dari 2 macam, yaitu kritik ekstern digunakan untuk mendapatkan otensitasnya atau keasliannya dari sumber yang diteliti dan kritik intern digunakan untuk menguji kredibilitas atau kebenaran dari kesaksian yang diberikan itu bisa dipercaya atau tidak. Kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan untuk menulis. Kritik ekstern ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa tulisan, dan jenis huruf yang digunakan, apakah membuktikan sumber yang didapat asli atau tidak. Hasil yang didapat dari kritik ini adalah fakta dasar yang digunakan untuk merekonstruksi peristiwa. Kritik ekstern ini dilakukan pada tulisan-tulisan tentang perkebunan yang sudah dibukukan.

Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber atau data yang diperoleh dapat dipercayai atau tidak, dengan kata lain menilai kebenaran dari isi sumber tersebut. Kritik intern ini lebih ditekankan dan dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga diperoleh fakta yang lebih

⁸⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995) hlm. 98.

jelas dan lengkap, misalnya dalam membahas tentang dibukanya perkebunan kopi di Cirebon. Buku pertama, menulis tentang potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dalam mengembangkan sektor perkebunan yaitu faktor alam yang subur, topografi bergunung memberi perlindungan bagi tanaman kopi dari tiupan angin, dan kepentingan Belanda dalam memenuhi kebutuhan pasar Eropa, sementara buku yang lain akan membahas tentang perubahan sosial ekonomi pada abad ke-19 dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi kolonial yang berorientasi pada tanaman ekspor untuk pasar dunia sehingga menyebabkan dibukanya perkebunan kopi di Cirebon. Kritik intern ini akan memberikan gambaran dan fakta yang lebih jelas tentang pembukaan perkebunan kopi di Cirebon.

4. Interpretasi

Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi adalah suatu langkah yang dilakukan penulis dalam menafsirkan fakta-fakta dan merangkaikan fakta-fakta sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang teruji kebenarannya. Adapun tujuan interpretasi adalah mengurangi unsur subyektivitas dalam penulisan sejarah.

Contoh dari interpretasi adalah dalam bab III tentang peran pelaku perkebunan kopi di Cirebon. Dalam mengkaji permasalahan ini, penulis harus melakukan penafsiran dari sumber-sumber lain yang digunakan oleh penulis. Di dalam sumber-sumber yang digunakan oleh penulis tidak ada sumber yang menjelaskan secara rinci tentang peranan pelaku perkebunan kopi milik

Belanda. Sehingga penulis melakukan analisis data dan mencari keterkaitan antara masalah-masalah yang ada.

5. Historiografi atau penulisan

Tahap terakhir yang dilakukan oleh penulis yaitu penulisan. Penulisan dilakukan oleh penulis berdasarkan data-data yang diperoleh dari suatu sumber yang digunakan dalam penulisan. Dalam penulisan ini penulis harus memperhatikan penyusunan cerita yang berurutan, penyusunan berbagai kejadian sesuai dengan urutan waktu, hal yang berhubungan dengan sebab akibat dari suatu peristiwa, daya pikir untuk menciptakan sesuatu yang ada di pikirannya berdasarkan pengalaman.

Perkembangan perkebunan di wilayah Cirebon merupakan perluasan dari daerah Priangan. Wilayah Cirebon sebelumnya telah mengenal sistem perkebunan, akan tetapi masih bersifat tradisional. Dengan adanya kedatangan Bangsa Barat mulai terjadi perubahan dalam sektor perkebunan. Bangsa Barat memperhatikan kegiatan perkebunan lebih kepada pemenuhan permintaan pasar Eropa, dengan adanya pengenalan komoditi tanaman yang diperkenalkan kepada masyarakat.

a. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai oleh penulis untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon (1850-1870) adalah pendekatan multidisipliner, antara lain :

1. Pendekatan ekonomi digunakan oleh penulis dalam mengkaji tentang perekonomian Hindia Belanda pada tahun 1850-1870 yang bergantung pada perkebunan kopi.
2. Pendekatan historis digunakan oleh penulis untuk mengkaji tentang petani dan perkebunan kopi di Cirebon dengan menggunakan sistem Priangan pada tahun 1850-1870.
3. Pendekatan politik digunakan penulis untuk mengkaji tentang politik pemerintahan Hindia Belanda yang mempengaruhi kebijakan pemerintahan Hindia Belanda khususnya di Cirebon dengan adanya sistem Priangan.
4. Pendekatan Sosiologi adalah pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji peranan pelaku perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1830-1870.
5. Pendekatan psikologi adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji tentang petani di Cirebon, sehingga penulis dapat menguraikan petani. Dengan demikian penulis dapat menguraikan peranan petani bagi perkebunan kopi di Cirebon dengan menggunakan sistem Priangan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon (1850-1870)” ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penulisan, metode dan pendekatan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Bab ini menyajikan uraian tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam perkebunan kopi di Cirebon. Di dalam bab ini kebijakan pemerintah Hindia Belanda sangat penting terutama dalam memaksimalkan potensi lahan-lahan yang subur, lahan-lahan yang belum diolah, dan tenaga kerja penduduk perkebunan kopi di Karesidenan Cirebon.

Bab III Bab ini menyajikan uraian tentang interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870. Di dalam bab ini interaksi petani dan pemilik perkebunan memiliki peran penting di dalam perkebunan baik milik swasta maupun pemerintah. Interaksi petani dan pemilik perkebunan disini mempengaruhi hasil perkebunan, laju pertumbuhan produksi, keterkaitan tanah dan petani.

Bab IV Bab ini menguraikan tentang dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkebunan kopi dengan sistem Priangan di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.

Bab V Bab ini akan menyajikan kesimpulan dari penelitian dan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, IV, V.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam perkebunan kopi dengan sistem Priangan di Cirebon, interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870, serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkebunan kopi dengan sistem Priangan di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

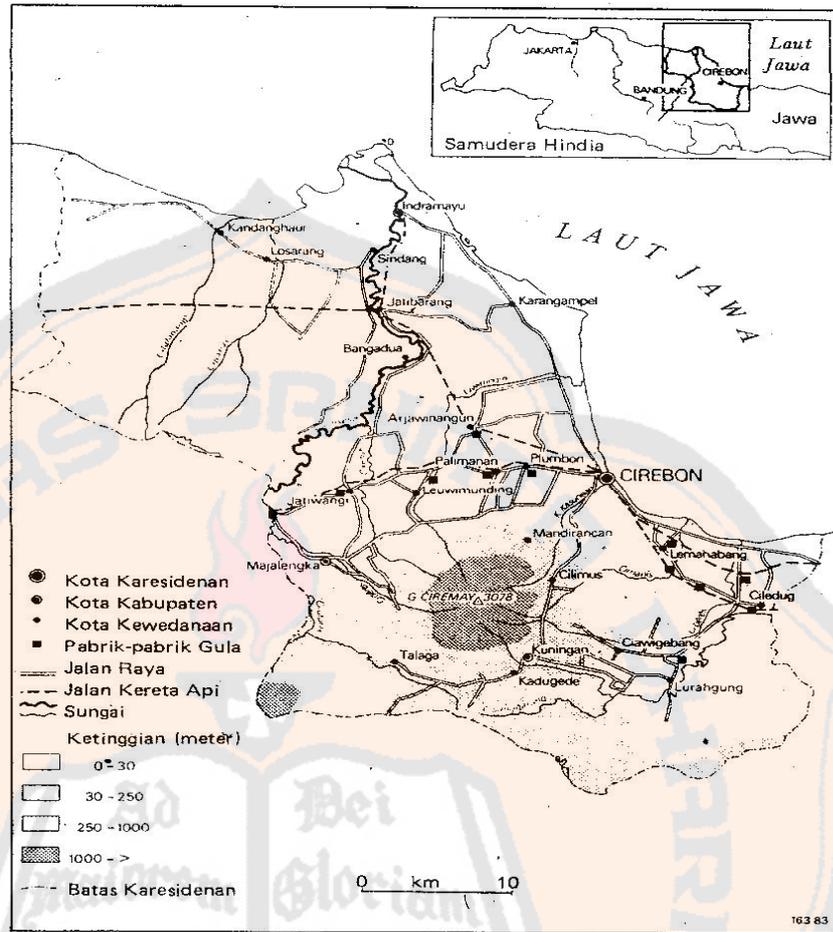
KEBIJAKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAP PERKEBUNAN KOPI DI CIREBON

Daerah Karesidenan Cirebon dikuasai Belanda secara penuh pada 1705.⁸⁹ kekuasaan tersebut diperoleh sebagai bentuk imbalan atas batuan yang diberikan kepada Pakubuwono I dalam menduduki tahta Mataram. Keresidenan Cirebon terbagi menjadi beberapa wilayah, antara lain Indramayu, Gebang, daerah Kesultanan Cirebon, yang meliputi daerah-daerah yang kemudian menjadi wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, serta tanah partikelir di Kandanghaur dan Indramayu; dan daerah Cirebon-Priangan, yang meliputi Galuh, Limbangan, dan Sukapura.⁹⁰

Pada abad ke 19, kopi merupakan minuman yang digemari di kawasan Eropa sehingga Belanda berusaha membudidayakan tanaman kopi di daerah jajahannya, termasuk di Hindia Belanda. Pada awalnya tanaman kopi dibudidayakan di daerah Pringan, Jawa Barat. Dari percobaan yang dilakukan di daerah Priangan tersebut ternyata membawa hasil yang cukup baik. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk memperluas pembudidayaan tanaman kopi di wilayah Jawa Barat. Salah satu tempat yang dipilih adalah Cirebon.

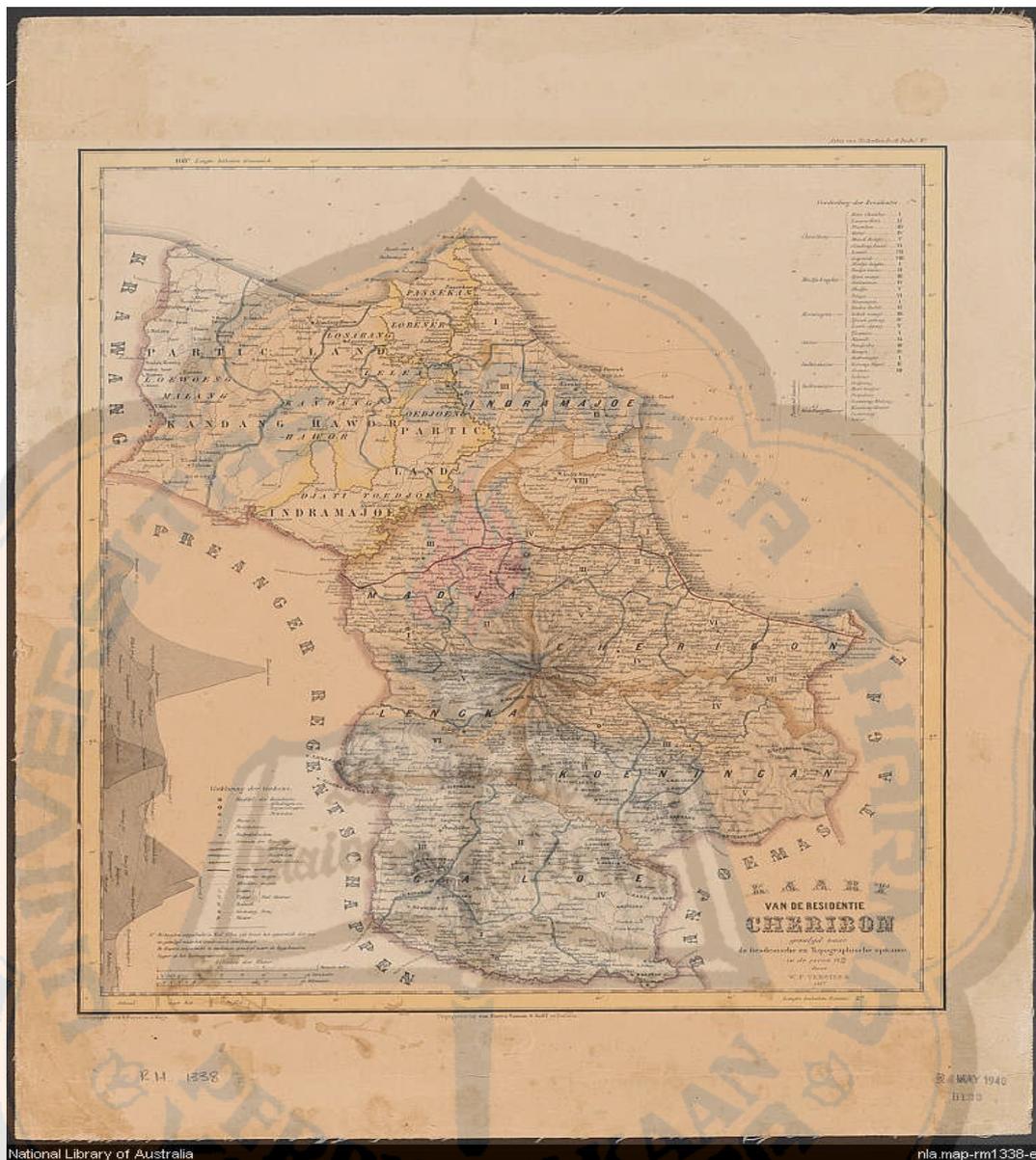
⁸⁹ Pada masa sistem kolonial, pulau Jawa dibagi dalam beberapa Karesidenan. Karesidenan adalah sebuah wilayah administrasi dalam sebuah provinsi di Hindia Belanda. Setiap Karesidenan dipimpin oleh seorang residen, kemudian setiap Karesidenan dibagi dalam beberapa afdeling dipimpin oleh asisten residen. Benny G. setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Transmedia, 2008), hlm. 209.

⁹⁰ _____, *Encyclopaedie Vab Nederlansch-Indie*, 1917, hlm. 475.



Peta Karesidenan Cirebon⁹¹

⁹¹ Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 5.



Peta Karesidenan Cirebon tahun 1857⁹²

⁹²National Library of Australia dalam <http://tatangmanguny.wordpress.com/kontroversi/kerajaan-talaga-melacak-kepenasaran/>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 12:34 PM.



Peta Letak Perkebunan kopi di Karesidenan Cirebon tahun 1857an⁹³

Peta tersebut menunjukkan daerah Karesidenan Cirebon memiliki potensi untuk membudidayakan tanaman kopi, yakni daerah-daerah yang berada di dataran tinggi.⁹⁴ Dataran tinggi itu adalah Majalengka dan Kuningan, keduanya

⁹³National Library of Australia dalam <http://tatangmanguny.wordpress.com/kontroversi/kerajaan-talaga-melacak-kepenasaran/>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 12:34 PM.

⁹⁴Dataran tinggi merupakan bagian dari bentuk muka bumi di wilayah daratan. Dataran tinggi adalah daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nana

terletak di kaki gunung Ciremai.⁹⁵ Karesidenan Cirebon yang terletak di kaki gunung Ciremai memiliki potensi alam yang mendukung bagi perkembangan tanaman kopi. Abu vulkanik yang dihasilkan oleh gunung Ciremai bermanfaat dalam menyuburkan tanah disekitar.⁹⁶ Di wilayah Karesidenan Cirebon terdapat perbedaan tinggi permukaan tanah dan suhu udara yang memungkinkan jenis tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di wilayah ini.⁹⁷ Di dataran rendah seperti daerah Cirebon dapat tumbuh tanaman padi, tebu, jagung, kelapa. Sedangkan di dataran tinggi seperti Majalengka dan Kuningan tumbuh tanaman kopi, teh, dan kina.

Dalam bidang ekonomi Karesidenan Cirebon sangat menguntungkan karena letak geografisnya yang memiliki pesisir pantai pulau Jawa tentu saja termasuk ke dalam mata rantai dalam perdagangan internasional.⁹⁸ Karesidenan Cirebon memiliki pelabuhan yang merupakan pusat ekonomi. Sebagai kota pelabuhan, Cirebon memiliki peran sebagai pusat ekonomi dengan fungsinya sebagai jalur impor dan ekspor ke daerah pedalaman yang terpencil.⁹⁹ Begitu pula sebaliknya pelabuhan Cirebon berfungsi sebagai tempat penampungan barang-barang dari tempat-tempat lain yang tidak dihasilkan oleh wilayah pedalaman.

Pelabuhan Karesidenan Cirebon juga memiliki peranan yang besar, yaitu menghubungkan antara daerah pedalaman sebagai pemasok bahan-bahan

Supriyatna.dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi) untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 10.

⁹⁵ Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat yang sekarang ini terletak di tiga kabupaten, yaitu kabupaten Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Gunung Ciremai termasuk gunung yang masih aktif . Tim Pena Cendekia, *Wahana IPS: Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Pertama 4 A*, (Jakarta: Penerbit Yudistira, 2007), hlm. 23.

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 2.

⁹⁷ *Ibid.* hlm. 3.

⁹⁸ Depdibud, *Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*, (Jakarta: Dpdibud, 1998), hlm. 50.

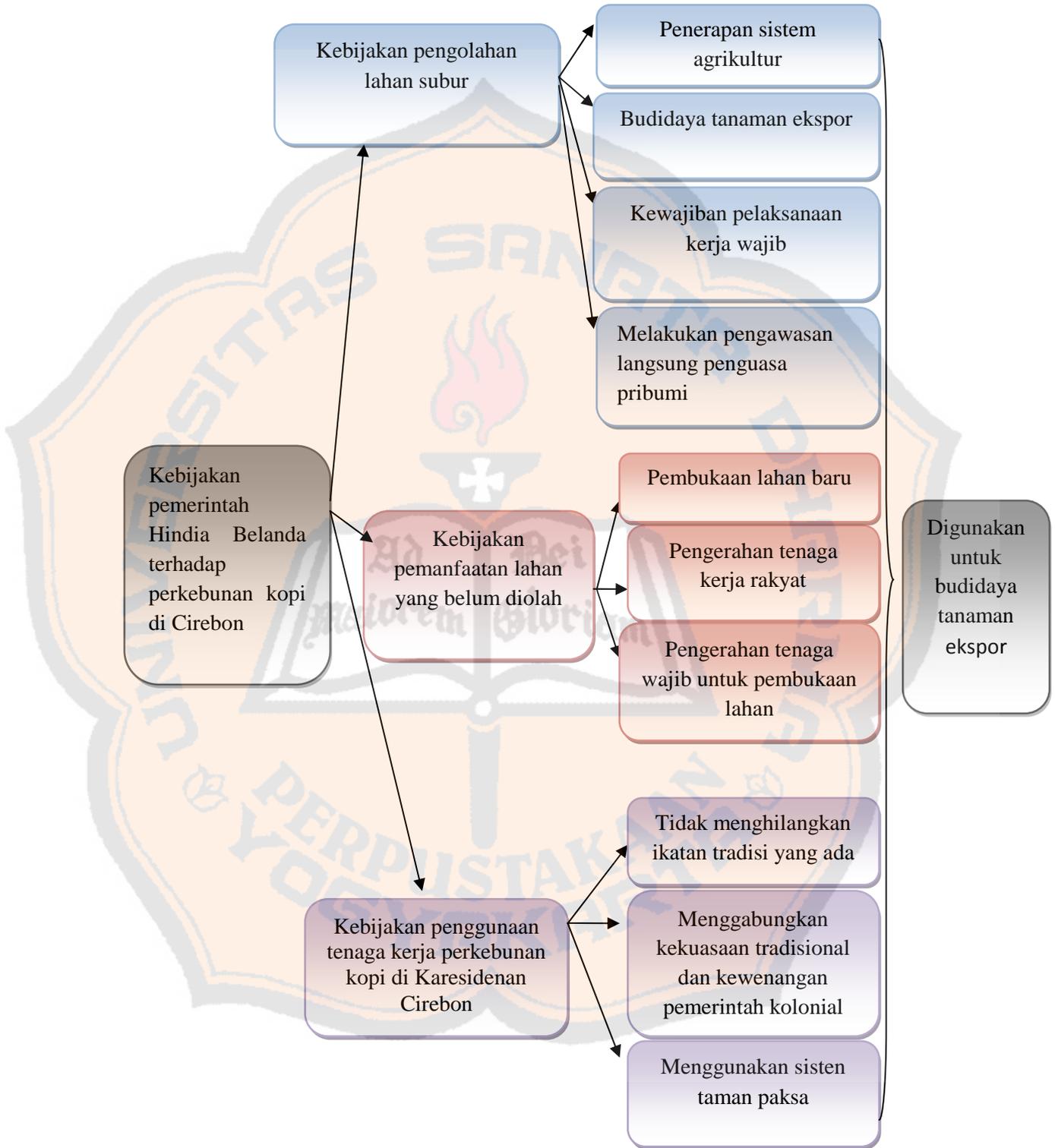
⁹⁹ *Ibid.* hlm. 51.

pertanian dengan daerah pelabuhan. Dari produksi pertanian menjadikan Cirebon sebagai pelabuhan yang ramai dengan menyediakan bahan-bahan pertanian.¹⁰⁰ Pada masa pelaksanaan *Cultuurstelsel* sejak 1830, Karesidenan Cirebon tidak lepas dari instruksi pemerintah kolonial Hindia Belanda.¹⁰¹ Instruksi pemerintah kolonial Hindia Belanda terlihat jelas pada kebijakan-kebijakan dalam memaksimalkan lahan-lahan subur di wilayah Cirebon. Berikut akan digambarkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk bagan:



¹⁰⁰ *Idem.*

¹⁰¹ Depdibud, *Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Jenderal Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 92.



A. Kebijakan Pengolahan Lahan Subur

1. Penerapan Sistem Agrikultur¹⁰²

Untuk mencukupi kebutuhan pasar di Eropa terutama permintaan akan kopi, indigo, dan gula, Negeri Belanda memproduksi komoditas tersebut di wilayah Hindia Belanda,¹⁰³ terutama di Jawa salah satunya adalah Karesidenan Cirebon. Cara atau teknologi produksi yang diterapkan merupakan hasil gagasan Johannes Van den Bosch yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1830-1833. Penerapan sistem agrikultur atau sistem *Cultuurstelsel* di wilayah Karesidenan Cirebon dimaksudkan untuk memaksimalkan lahan yang subur untuk kepentingan negara Induk. Penerapan *Cultuurstelsel* dilaksanakan pada tahun 1830 sampai dengan 1870.

Karesidenan Cirebon merupakan salah satu Karesidenan yang dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan budidaya tanaman ekspor. Karesidenan ini memiliki lahan yang subur untuk menanam beberapa jenis tanaman ekspor yaitu kopi dan tebu. Selain itu Cirebon merupakan salah satu pelabuhan yang sangat berpengaruh pada masa itu. Melalui pelabuhan Cirebon Pemerintah Hindia Belanda mengirim barang-barang dari wilayah Hindia Belanda ke Eropa. Pelabuhan Cirebon bertambah ramai pada masa kolonial, ketika Priangan dan Cirebon menjadi pusat perkebunan teh, kopi, dan tebu.¹⁰⁴

¹⁰²Sahari Besari, *Teknologi di Nusantara: 40 Abad Hambatan Inovasi*, (Jakarta:Penerbit Salemba Teknika, 2008), hlm. 129.

¹⁰³*Idem*.

¹⁰⁴Kompas, *Ekspedisi Anyer-Panaroekan: Laporan Jurnalistik Kompas 200 tahun Anyer-Panaroekan, jalan (untuk) perubahan*, (Jakarta: Penerbit Jakarta), hlm. 109.

Ketika *Cultuurstelsel* diterapkan pada tahun 1830 sampai tahun 1870, mewajibkan petani untuk menggunakan sebagian waktu dan lahannya untuk menanam tanaman wajib yang terdiri dari tarum (indigo), kopi, tebu, dan tembakau bagi keperluan dagang di Eropa. Pada umumnya, bagian lahan yang subur harus dialokasikan bagi tanaman wajib tersebut.¹⁰⁵ Upah atas penanaman itu tidak berupa uang, tetapi diberikan pembebasan dari kewajiban-kewajiban membayar pajak tanah yang sangat berat. Jadi dengan demikian, pajak itu tidak dipungut dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk natura (dalam kerja).¹⁰⁶

Cultuurstelsel ini juga berlaku di Karesidenan Cirebon. Di Cirebon pada tahun 1830-1870 lahan-lahan yang subur dialokasikan untuk menanam tanaman kopi dan tebu. *Cultuurstelsel* yang diterapkan Van den Bosch di Karesidenan Cirebon bertujuan untuk meningkatkan produksi ekspor hasil bumi. Gagasan umum dari *Cultuurstelsel* mengambil dari sistem Priangan yaitu rakyat membayar pajak dengan kopi dan dibebaskan dari semua pajak lain kecuali kewajiban tradisional mereka terhadap bupati.¹⁰⁷ Van den Bosch berharap dengan memperkenalkan aturan tersebut, diharapkan agar penduduk pribumi bisa menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah sebagai ganti pajak uang.

Cultuurstelsel yang dilaksanakan oleh Van den Bosch memakai sistem Priangan yang pernah diterapkan oleh VOC sebagai dasar untuk eksploitasi di

¹⁰⁵*Ibid.* hlm. 124.

¹⁰⁶Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1957), hlm. 190.

¹⁰⁷J. S. Furnivall, *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 123.

Jawa, termasuk di Karesidenan Cirebon. Di daerah Priangan diterapkan “*Stelsel Priangan*” yang cukup lama. Van den Bosch menggunakan cara yang sama dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel*, yakni menggunakan kekuasaan lokal dalam mengambil hati penduduk pribumi.

Cultuurstelsel pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah. Ciri pokok *Cultuurstelsel* terletak pada keharusan rakyat untuk membayar pajak yang berupa hasil tanaman pertanian.¹⁰⁸ Dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel*, Van den Bosch menghendaki campur tangan orang-orang Eropa dalam proses produksi. Van den Bosch menghendaki adanya penyatuan kembali antara pemerintah dan kehidupan perusahaan dalam menangani produksi tanaman ekspor. Dalam *Cultuurstelsel* pemerintah mengorganisir proses penanaman melalui alat birokrasinya, sedangkan para penguasa Barat dan modalnya ditugaskan untuk menangani pengolahan produksi di pabrik-pabrik pengolahan. Dengan demikian, pemerintah bertugas dalam menyediakan bahan mentah bagi pengolahan produksi yang dikerjakan pengusaha di pabrik-pabrik yang mereka dirikan.¹⁰⁹ Dalam sistem ini rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor yang diminta pemerintah di tanah mereka sendiri. Pemerintah Hindia Belanda ingin mempertahankan rakyat pedesaan sebagai rumah tangga produksi.¹¹⁰ Dalam *Cultuurstelsel*, Van den Bosch melibatkan pribumi sebagai rumah tangga yang aktif dalam memaksimalkan lahan subur.

¹⁰⁸Prajudi Atmosudirdjo. *op.cit.* hlm. 54.

¹⁰⁹*Ibid.* hlm. 55.

¹¹⁰*Idem.*

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada dasarnya melibatkan berbagai unsur pokok, antara lain yaitu birokrasi pemerintahan Barat, para kepala-kepala pribumi, organisasi desa, tanah pertanian rakyat, tenaga kerja rakyat, pengusaha dan modal swasta Barat. Tujuan dari *Cultuurstelsel* semata-mata untuk mempertinggi produksi tanaman ekspor yang dilakukan dengan organisasi yang rapi.

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* dijalankan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no.22, berisi usaha-usaha untuk memaksimalkan lahan subur yang ada di wilayah Jawa yang mewajibkan 18 Karesidenan untuk menanam tanaman ekspor di tanah yang memiliki kesuburan, serta pembukaan lahan-lahan baru. *Cultuurstelsel* dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasar Eropa.
- b) Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
- c) Waktu pengerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi waktu pengerjaan yang dibutuhkan untuk menanam padi.
- d) Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
- e) Hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil tanaman

perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisihnya harus diserahkan kepada rakyat.

- f) Kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk;
- g) Penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.¹¹¹

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* sebagian besar dilakukan di daerah Jawa. Di daerah Jawa, pelaksanaan *Cultuurstelsel* terutama dilakukan di daerah yang langsung ada di bawah pemerintahan administratif pemerintah Hindia Belanda, yaitu daerah “*Gubernemen*”.¹¹² Daerah Gubernemen mencakup 18 wilayah Karesidenan. Daerah tersebut yaitu Karesidenan Banten, Priangan, Krawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, Pasuruan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelan, Banyumas, Madiun, dan Kediri.¹¹³

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* di 18 Karesidenan pada kenyataannya tidak sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Sebagai contoh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah tanah yang digunakan untuk membudidayakan tanaman ekspor diminta secara paksa kepada rakyat; rakyat

¹¹¹Sartono, 1977, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka. Jilid IV), hlm. 76-77.

¹¹²Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo. *op.cit.* hlm 57.

¹¹³ *Idem.*

sangat terbebani dengan pajak tanah tinggi yang harus ditanggung; tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan melebihi 1/5 bagian; pembayaran setoran hasil tanaman banyak yang tidak ditepati menurut jumlah yang harus diserahkan; jika terjadi gagal panen maka rakyat yang bertanggung jawab menanggung kerugian; waktu pengerjaan lahan perdagangan lebih banyak sehingga petani tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penyimpangan atau penyelewengan dari *Cultuurstelsel* di tingkat daerah, pada dasarnya merupakan akibat dari adanya ragam perbedaan kondisi daerah.¹¹⁴

Cultuurstelsel merupakan eksploitasi industri agraris terhadap pertanian yang diterapkan di Pulau Jawa.¹¹⁵ Sistem ini dijalankan oleh pemerintah kolonial dengan memanfaatkan wibawa dan pengaruhnya untuk memaksa penduduk pribumi.¹¹⁶ Dalam melaksanakan *Cultuurstelsel* pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain:

a. Kebijakan ekonomi dalam penerapan Cultuurstelsel

Menurut rencana awal, pertanian untuk negara bersifat sukarela, dan pertanian bebas serta perdagangan bebas seharusnya tumbuh seiring pertanian negara dan perniagaan negara melalui *Nederlandsche Handels-Maatschappij* atau NHM.¹¹⁷ Pada pelaksanaannya *Cultuurstelsel* tersebut mengupayakan hasil tanam paksa untuk negara dan mengupayakan untuk negara suatu monopoli perdagangan dan menjadi monopoli produksi. Pada awal pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada tahun 1831 Van den Bosch

¹¹⁴Satono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 62-63.

¹¹⁵Capt. R. P Suyono. *op.cit.* hlm. 54.

¹¹⁶*Idem.*

¹¹⁷J. S. Furnivall, *Hindia Belanda studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 127.

memerintahkan agar di seluruh Jawa ditanami nila, gula, dan kopi, dan pada tahun 1832 Van den Bosch mengharuskan setiap residen menyerahkan hasil bumi ekspor.¹¹⁸ Van den Bosch mulai menerapkan monopoli atas kopi sejak Januari 1833. Kopi diserahkan secara cuma-cuma kepada pemerintah, serta dijual kepada pemerintah dengan harga tetap. Hal ini menghentikan semua perdagangan kopi swasta, dan membuat negara sangat kuat dalam monopoli perdagangan.¹¹⁹

Van den Bosch menerbitkan sebuah edaran dan menggaris bawahi, bahwa desa-desa yang menyisihkan seperlima sawah mereka untuk budidaya tanaman ekspor harus dikecualikan dari sewa tanah.¹²⁰ Penjelasan baru dari Van den Bosch menyatakan bahwa sewa tanah hanya dikecualikan pada wilayah yang disisihkan untuk budidaya tanaman ekspor, sisanya yang empat perlima tetap harus membayar sewa, yang dengan demikian akan tumbuh seiring meluasnya pertanian.¹²¹ Pada pelaksanaan *Cultuurstelsel* pemerintah Hindia Belanda masih memberlakukan sewa tanah.¹²² Peningkatan sewa tanah membuktikan keberhasilan *Cultuurstelsel*, seperti ketika Direktur Kultur pada tahun 1845 memperkirakan bahwa hasil sewa tanah akan segera

¹¹⁸ *Ibid.* hlm. 128.

¹¹⁹ *Idem.*

¹²⁰ *Ibid.* hlm. 143.

¹²¹ *Idem.*

¹²² Sistem sewa tanah (*landelijk stelsel*) menjadi dasar kebijakan ekonomi pemerintahan Raffles selama masa pendudukan Inggris di Indonesia. Raffles ingin menghapus sistem penyerahan wajib dan rodi, dengan segala ikatan feodalnya, yang dianggap member beban kepada penduduk. Sistem sewa tanah dilancarkan dengan pengharapan akan dapat memberikan, di satu pihak, kebebasan dan kepastian hukum, serta merangsang untuk menanam tanaman dagang (cash crops) kepada para petani. Sistem sewa tanah dari Raffles yang muncul awal abad ke-19 itu, merupakan cerminan dari gagasan perekonomian liberal yang menghendaki kebebasan kehidupan perekonomian yang seluas-luasnya, dan membatasi campur tangan pemerintah terhadap urusan perekonomian, serta memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk mengembangkan diri secara leluasa. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 46-47.

meningkat karena *Cultuurstelsel* menghasilkan jutaan gulden lebih banyak dari pada sebelumnya ke dalam tangan rakyat.¹²³ Bahkan sewa tanah sendiri pada *Cultuurstelsel* menjadi pendapatan pemerintah yang cukup menjanjikan.

Pemasukan Pemerintah Hindia Belanda

Jenis pemasukan	Pemasukan pada		Pemasukan pada 1850 (f. juta)
	Tahun	Hasil (f. juta)	
Sewa tanah	1830	4,1	10,7
Izin monopoli	1833	6,1	10,4
Garam	1831	2,1	4,6
Total	1831	18,5	44,0

Sumber: J.S. Furnivall, *Hindia Belanda Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta: Freedom Institute, 2009), hlm. 123.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada penerapan *Cultuurstelsel* di Jawa, sewa tanah memberikan sumbangan besar dalam pendapatan negeri Belanda. Selain menghasilkan hasil bumi yang berupa kopi, gula, dan indigo untuk di ekspor ke pasar Eropa, pemerintah Hindia Belanda tetap menjalankan sewa tanah di Jawa.

Pada bulan Januari 1834 Van den Bosch menyerahkan jabatannya kepada Baud.¹²⁴ Baud mengambil kebijakan memaksakan bahwa tanah tidak boleh diberikan kecuali di daerah yang tidak berpenduduk. Jadi hanya sedikit

¹²³ *Idem.*

¹²⁴ *Ibid.* hlm. 125.

perkembangan perusahaan investor bentuk ini, dan sistem sukarela tidak bisa diperpanjang lebih dari satu tahun.¹²⁵

Pada tahun 1838, De Eerens, menggantikan Baud sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mengeluarkan peraturan baru *Cultuurstelsel* terutama dalam memenuhi permintaan baru atas tanah yaitu memberlakukan peraturan untuk kontrak lima tahunan.¹²⁶ Pertanian swasta meningkatkan permintaan terhadap buruh, menempatkan beban lebih besar pada jalan-jalan, dan cenderung mengancam pasar untuk hasil bumi pemerintah dan membahayakan sistem penyerahan.¹²⁷

Pada tahun 1849, Duymaer van Twist menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Van Twist memperbaiki *Cultuurstelsel* dengan cara memberikan kesempatan baru kepada perusahaan swasta, dan menghapuskan rintangan atas perdagangan yang terjadi karena penjualan izin hak monopoli.¹²⁸ Hal yang dilakukan oleh Van Twist ialah pembukaan Jawa bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya di wilayah Hindia Belanda dalam bentuk sewa tanah. Namun persewaan ini tidak lebih dari 20 tahun, dan tidak bisa dipakai untuk pinjaman.¹²⁹ Pemilik perkebunan lebih suka buruh dari pada tanah, dan karena itu Van Twist menghidupkan kembali peraturan De Eerens yang memperbolehkan pemodal mengadakan kontak kolektif untuk mendapatkan jasa penduduk desa selama periode lima

¹²⁵ *Ibid.* hlm. 129.

¹²⁶ *Idem.*

¹²⁷ *Ibid.* hlm 129.

¹²⁸ *Idem.*

¹²⁹ *Ibid.* hlm.130.

tahun.¹³⁰ Kebijakan lain yang dilakukan oleh Van Twist adalah pada tahun 1850 menghapus monopoli dan menghidupkan kembali kesepakatan individual sehingga muncul kesepakatan para pemodal dengan penguasa lokal.¹³¹

b. Kebijakan administratif dalam penerapan Cultuurstelsel

Dalam kebijaksanaan administrasi pemerintah memberikan kekuasaan pada setiap residen untuk menyusun peraturan-peraturan daerah dan menjatuhkan hukuman administratif serta memberlakukan hukum-hukum baru. Pada tahun 1848 suatu kitab hukum berita acara, kitab hukum perdata, dan kitab hukum perniagaan yang baru disusun untuk orang Eropa dan suatu kitab hukum kepolisian dan acara pidana (*Inlandsch Reglement*) yang baru untuk pribumi.¹³² Van den Bosch juga mengunggulkan bupati di atas jaksa dan menempatkan semua pejabat pribumi di bawah bupati.¹³³ Dalam sistem *Cultuurstelsel* dibentuk *Verschijndagen*, konferensi pejabat-pejabat lokal yang membahas topik-topik administratif. Pada masa itu Asisten Wedana yang menjadi kepala setiap kecamatan yang terdiri kira-kira 15 desa, mengadakan konferensi seminggu sekali dengan kepala desa; setiap wedana sebulan sekali mengadakan konferensi serupa yang dihadiri semua bawahannya dan kepala desa; begitu pula para bupati mengadakan konferensi

¹³⁰ *Idem.*

¹³¹ *Ibid.* hlm. 178.

¹³² *Ibid.* hlm. 133.

¹³³ *Ibid.* hlm. 132-133

sebulan sekali dengan bawahannya, dan begitu pula dengan residen dengan semua pejabat utama Eropa dan pribumi di bawahnya.¹³⁴

2. *Budidaya Tanaman Ekspor*

Dalam rangka menerapkan *Cultuurstelsel* untuk memperoleh tanaman dagang yang bisa diekspor dan laku dijual di pasar Eropa, pemerintah memberlakukan pembudidayaan tanaman ekspor yang telah ditetapkan. Pemerintah memberlakukan pembudidayaan tanaman ekspor dalam rangka memaksimalkan lahan-lahan yang subur di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mewajibkan masyarakat desa di Jawa menanam sebagian dari tanah mereka dengan tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanaman pemerintah harus dirawat oleh warga masyarakat desa sampai masa panen. Mereka memanen dan menyetorkan hasilnya ke pabrik pengolahan atau gudang setempat.¹³⁵

Pada tahun 1699 komoditi yang dibudidayakan dan tumbuh di Jawa yaitu kopi. Sesudah *Cultuurstelsel* pada tahun 1830, penanaman kopi dipertahankan sebagai tanaman wajib tanam yang diperluas sampai ke seluruh Jawa hingga pulau-pulau lain. Kopi Jawa pada masa VOC dan *Cultuurstelsel* menjadi primadona bagi bangsa Eropa. Kopi Jawa menjadi barang ekspor yang sangat menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda. Kopi Jawa pada masa *Cultuurstelsel* diangkut dari perkebunan-perkebunan dataran tinggi melalui jalan Raya Pos (*De Grote Postweg*) untuk diekspor ke Eropa.¹³⁶ Pada masa

¹³⁴ *Idem.*

¹³⁵ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa Di Jawa*, (Jakarta: LP3ES, 2003), hlm 175.

¹³⁶ Kompas, *op.cit.* hlm. 159.

Cultuurstelsel tidak hanya fokus dalam membudidayakan tanaman kopi, akan tetapi membudidayakan tanaman lainnya seperti gula tebu, teh, kina, karet, kelapa sawit, tembakau, dan indigo.

Di Karesidenan Cirebon tanaman ekspor yang dibudidayakan oleh pemerintah antara lain tanaman kopi dan tebu. Tanaman kopi dibudidayakan di wilayah pedalaman dan lereng-lereng gunung di pedalaman Karesidenan Cirebon dengan ketinggian 1.000-1.700 m.¹³⁷ Di Karesidenan Cirebon hanya tanaman kopi yang banyak menggunakan tanah-tanah yang belum diolah oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan pengerahan tenaga kerja rakyat yang besar untuk membuka dan menggarap lahan penanaman.¹³⁸

Tanaman kopi di Karesidenan Cirebon ditanam di dataran tinggi dan pedalaman Cirebon seperti daerah Majalengka dan Kuningan. Tanaman kopi termasuk jenis tanaman ekspor yang bisa ditanam di semua daerah Karesidenan.¹³⁹ Pemerintah Hindia Belanda membudidayakan tanaman kopi di daerah tersebut karena daerah tersebut merupakan dataran tinggi. Keputusan tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang ingin memaksimalkan lahan yang subur untuk menghasilkan barang-barang yang laku di pasar Eropa. Sedangkan untuk dataran rendah pemerintah mewajibkan tanaman tebu sebagai tanaman yang harus ditanam oleh warga masyarakat Karesidenan Cirebon.

¹³⁷ Depdibud, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra* (Jakarta: CV. Defit Prima, 1996), hlm. 115-116.

¹³⁸ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Surya, *op.cit.* hlm.57.

¹³⁹ *Ibid.* hlm. 59.

3. *Kewajiban pelaksanaan kerja wajib*

Dalam *Cultuurstelsel* tidak hanya tanah dan tanaman saja yang menjadi unsur terpenting, akan tetapi tenaga kerja juga menjadi sangat penting. Pada masa *Cultuurstelsel* rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor pada tanah mereka sendiri. Sebagai upah atas penanaman itu tidak diberikan uang tetapi diberikan pembebasan kewajiban.

Melalui *Cultuurstelsel* dimungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal dan membuktikan bahwa koloni ini dapat memberikan hasil yang cukup maksimal. Setiap desa pada prinsipnya harus menyisakan seperlima dari lahan subur untuk pemerintah dan setiap petani dewasa harus meluangkan seperlima dari waktu kerjanya.¹⁴⁰ Ketentuan pelaksanaan *Cultuurstelsel* dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1834 no.22.¹⁴¹ Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa penyerahan tanah adalah atas dasar persetujuan penduduk, dengan pembebasan pajak bumi pada bagian tanah yang terkena kebijakan *Cultuurstelsel*.¹⁴²

Karesidenan Cirebon yang termasuk dalam daerah pelaksanaan *Cultuurstelsel* juga memiliki kewajiban kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menyisakan 1/5 dari lahan yang subur untuk ditanami tanaman ekspor. Tanah desa yang disisakan untuk pemerintah Hindia Belanda digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanam tanaman kopi dan tebu, desa harus menyediakan tenaga kerja untuk menggarap lahan-lahan yang ditanami tanaman

¹⁴⁰Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan Volume I*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 75.

¹⁴¹Mubyarto.dkk, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1992), hlm. 33.

¹⁴²*Ibid.* hlm. 33.

ekspor. Setiap desa di Karesidenan Cirebon harus menyisihkan lahan untuk tanaman wajib dan bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja untuk perkebunan kopi. Desa-desa yang terdapat dalam 18 karesidenan tersebut menjelaskan pula bahwa ada keluwesan lembaga-lembaga tradisional. Van den Bosch melibatkan desa dalam pengelolaan lahan dan tenaga kerja.

4. Budidaya Tanaman wajib di bawah pengawasan penguasa pribumi

Pelaksanaan penanaman tanaman ekspor (kopi, tebu, teh) dilakukan dengan saluran birokrasi pemerintah, yang melibatkan pejabat-pejabat pribumi dan Eropa. Pemerintah Hindia Belanda melakukan kerjasama dengan para *priyayi* dan pejabat-pejabat di pulau Jawa. Pejabat-pejabat pribumi mencakup para bupati ditingkat kabupaten sampai kepala-kepala desa di tingkat desa, dengan ikatan tradisionalnya, yang bertugas langsung dalam pelaksanaan penanaman tanaman pemerintah. Sedangkan pejabat-pejabat Eropa, meliputi para residen, asisten residen kontrolir, direktur tanaman, bertugas sebagai pengawas jalannya pelaksanaan *Cultuurstelsel*.¹⁴³

Pada pelaksanaan *Cultuurstelsel* kedudukan golongan *priyayi* mengalami perubahan, jika dahulu golongan *priyayi* merupakan perantara kepercayaan dari elite kekuasaan lokal kemudian golongan *priyayi* menjadi perantara antara kaum petani dengan pejabat pribumi. Skema berikut menggambarkan unit-unit administrasi dan kedudukannya terhadap daerah-daerah yang diawasi, yaitu tanah-tanah pemerintahan di Jawa termasuk Karesidenan Cirebon.

¹⁴³ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1991), hlm. 56-57.

Unit administrasi dan kedudukan pejabat-pejabat lokal

Unit administrasi	Pejabat Belanda	Pejabat Pribumi
Karesidenan ↓ Kabupaten ↓ Distrik ↓ Subdistrik ↓ Desa	Residen ↓ Asisten Residen ↓ Kontrolir ↓ Aspiran kontrolir	Bupati ↓ Wedana ↓ Camat ↓ Kepala desa

Sumber: Soediono M.P.Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 40.

Pada skema di atas terdapat kedudukan pejabat Belanda di wilayah Karesidenan yang terdiri dari Residen, Asisten Residen, Kontrolir merupakan korps pemerintahan Belanda (*Nederlands Bestuur corps*) atau BB (*Binnenlands Bestuur*).¹⁴⁴ Pada tingkat paling atas dalam pejabat Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal diangkat dengan keputusan raja negara Belanda, berdasarkan usulan menteri penjajahan, untuk waktu yang tidak ditentukan.¹⁴⁵ Gubernur Jenderal harus seorang Belanda, berumur sedikitnya 30 tahun. Tanggung jawab seorang Gubernur Jenderal yaitu menyelenggarakan pemerintah umum sesuai dengan ketentuan serta petunjuk-petunjuk pemerintah dan parlemen Belanda.¹⁴⁶ Gubernur Jenderal mempunyai kekuasaan pelaksanaan pemerintahan maupun kekuasaan perundang-undangan.

Provinsi dibagi dalam *Afdeling*, yang masing-masing dikepalai oleh Residen. Residen sebagai kepala *Afdeling* mempunyai tugas untuk

¹⁴⁴ Bayu Surianingrat, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*, (Jakarta: Dewaruri Press, 1981), hlm. 52.

¹⁴⁵ *Ibid.* hlm. 36.

¹⁴⁶ *Idem.*

memimpin dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah *Afdeling*, terutama dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Pemerintah kabupaten selalu mendapat perhatian dari Residen. Setiap *Afdeling* terdiri dari 2-6 kabupaten. Pada umumnya kabupaten merupakan wilayah kerja seorang Asisten Residen (*Asistent Resident-A. R.*). Asisten Residen bukanlah kepala wilayah, A. R. hanya merupakan pelengkap dan mempunyai tugas khusus dibidang pertahanan dan polisi. Kepada A.R. diperbantukan beberapa Kontrolir (*Controleur*), kadang-kadang Kontrolir menjadi sekertaris *Afdeling*. Selain Kontrolir terdapat juga Adspirant Kontralir (*Adspirant Controleur*), mereka adalah tenaga muda pada pemerintahan umum, yang sebenarnya sedang mengikuti pendidikan praktek.¹⁴⁷

Dalam skema tersebut selain pejabat Belanda juga terdapat pejabat lokal atau pribumi di unit administrasi. Jumlah pejabat pribumi jauh lebih banyak dari pada B.B. Belanda. Pejabat pribumi ini merupakan korps pemerintah pribumi (*Inlandse Binnenlands Bestuur*).¹⁴⁸ B.B. pribumi berada di bawah pengawasan B.B. Belanda. Pejabat pribumi dalam skema di tersebut menduduki pemerintahan kabupaten. Kabupaten diperintah oleh B.B. pribumi, yaitu bupati (*Regent*), tiap bupati dibantu oleh seorang patih.¹⁴⁹ Kabupaten (*Regentschap*) dibagi lebih lanjut dalam kawedanan atau distrik (*District*) yang dikepalai oleh seorang wedana (*Districtshoofd*), tiap distrik dibagi dalam beberapa kecamatan (*Onder District*) yang dikepalai oleh camat (*Asistent Wedana*).¹⁵⁰ *Afdeeling* dan kabupaten terdiri atas beberapa kecamatan masing-masing membawahi sejumlah desa.¹⁵¹ Desa-desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa merupakan pejabat pribumi yang paling rendah, tetapi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* di Pulau Jawa.

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 34.

¹⁴⁸ *Idem.*

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm. 35.

¹⁵⁰ *Idem.*

¹⁵¹ Heliuss Sjamsuddin dan Edi S. Ekadjati, *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1992), hlm. 7.

Dalam unit administrasidi tersebut pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mentransformasikan birokrasi pemerintah tradisional menjadi modern. Secara hirarkhis disusunlah suatu birokrasi pemerintah modern dengan kekuasaan tertinggi berada ditangan raja Belanda.¹⁵² Sesuai dengan birokrasi modern, hubungan antara para pejabat itu atasan dan bawahan (subordinasi) terletak pada kewajiban bawahan untuk menjalankan apa yang telah diputuskan oleh atasan.¹⁵³ Dengan demikian semua perintah dari Raja dan Gubernur Jenderal secara herarkis dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Hindia Belanda.¹⁵⁴

Walaupun Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mentransformasikan birokrasi pemerintah tradisional ke arah yang modern akan tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak menghapus ciri-ciri birokrasi tradisional yang masih menggunakan garis keturunan dalam memerintah daerahnya.¹⁵⁵ Dengan demikian kedudukan dan peranan bupati dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda sangat penting, di satu pihak sebagai bawahan Belanda harus menjalankan semua peraturan yang ditetapkan oleh Belanda sebagai atasannya, dan di lain pihak tetap menjadi *Volkshoofd* yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan sendiri untuk memerintah rakyat di daerahnya.

Dalam tulisannya Van den Bosch memiliki pandangan pemerintahan di Hindia Belanda yang harus mengadakan kerjasama dengan pemimpin pribumi:

”Menurut saya, dengan segala cara, kita harus membuat agar para pemimpin pribumi bergantung kepada kita, itulah yang saya coba lakukan, sedapat mungkin dengan selalu menghormati hak-hak mereka yang turun

¹⁵² P.J. Suwarno, *Sejarah Birokrasi Pemerintah Indonesia Dahulu dan Sekaranag*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1989), hlm. 41.

¹⁵³ *Idem.*

¹⁵⁴ *Ibid.* hlm. 42.

¹⁵⁵ *Idem.*

temurun, dengan menjaga agar mereka diberlakukan dengan kehormatan yang semestinya, bahkan dengan penuh perhatian, selalu memberi bantuan jika mereka mendapat kesulitan keuangan dan memberikan hak milik atas tanah yang mereka incar singkatnya buat sedemikian rupa sehingga mereka merasa berbahagia berada di bawah pemerintahan raja mereka....". Van den Bosch terutama menekankan pentingnya "stabilitas" yang tak ada pada para bangsawan Jawa, yang oleh Batavia dapat ditegakkan tanpa banyak makan biaya:"semakin kita hormati hak-hak kekeluargaan para pemimpin itu, mereka akan semakin bergantung kepada kita, karena sebenarnya yang mereka dambakan adalah mempertahankan hak-haknya itu. Hal yang tidak pernah dapat dijamin oleh para raja mereka..."¹⁵⁶

Dengan menawarkan persekutuan kepada para bupati, Van den Bosch telah menyerahkan nasib rakyat kecil kepada kehendak para bupati. Pada tahun 1831 Van den Bosch ternyata menulis¹⁵⁷

"Kita tidak saja harus merangkul kaum ningrat, tetapi juga memberi mereka sarana untuk melayani kepentingan kita. Hingga saat ini, orang selalu berusaha membela rakyat jelata terhadap penindasan penguasa mereka. Niat itu tentu saja patut dipuji tetapi keamanan kita sendiri telah dirugikan..."¹⁵⁸

Belajar dari pengalaman Raffles yang menunjukkan bahwa ikatan-ikatan feodal dan organisasi desa masih besar pengaruhnya, maka Van den Bosch memandang perlu untuk mengembalikan peran mereka sebagai perantara dalam pemungutan hasil bumi dari penduduk.¹⁵⁹ Alasan Van den Bosch menghidupkan kembali peran ikatan-ikatan feodal adalah untuk mempermudah penanganan, para petugas ini membebaskan penyediaan tanah dan tenaga kerja kepada desa.¹⁶⁰

Dari tulisan Van den Bosch, dia ingin menghidupkan kembali lembaga-lembaga tradisional yang ada di Jawa. Van den Bosch ingin memikat hati para

¹⁵⁶ *Ibid.* hlm. 106.

¹⁵⁷ *Ibid.* hlm. 107.

¹⁵⁸ *Ibid.* hlm. 107.

¹⁵⁹ Mubyarto.dkk, *op.cit.* hlm. 34.

¹⁶⁰ *Ibid.* hlm. 35.

penguasa lokal untuk membantunya dalam menyelenggarakan *Cultuurstelsel*, serta bergantung pada pemerintahan Hindia Belanda. Cara yang digunakan oleh Van den Bosch untuk menarik simpati para penguasa lokal di Jawa yaitu dengan melibatkan penguasa-penguasa lokal tersebut dalam *Cultuurstelsel* yang dijalankan, menghormati hak-hak pemimpin pribumi atau penguasa lokal yang telah mereka peroleh secara turun temurun, membantu perekonomian dengan memberikan tanah kepada para penguasa lokal. Usaha Van den Bosch tersebut ternyata berhasil dalam memikat para pemimpin atau penguasa pribumi di Jawa sehingga pemimpin lokal bergantung dan taat pada pemerintah Hindia Belanda.

B. Kebijakan Pemanfaatan Lahan yang Belum Diolah

1. Membuka Lahan baru

Dalam rangka memanfaatkan lahan yang subur maka pemerintah Hindia Belanda membuka lahan yang belum diolah. Lahan-lahan yang belum diolah digunakan untuk menanam berbagai tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa. Salah satu tanaman ekspor yang memerlukan lahan adalah kopi. Tanaman kopi dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda untuk ditanam di lahan-lahan yang belum digarap oleh penduduk.

Tanah-tanah yang belum digarap memerlukan banyak perawatan, dan butuh pengerahan tenaga rakyat untuk membuka dan menggarap lahan tanaman. Penduduk diminta untuk menyerahkan tenaga kerja wajib atau kerja paksa (*beerendiensten*) untuk mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan

pemerintah, seperti untuk membuka lahan, pembuatan atau perbaikan jalan, saluran irigasi, pengangkutan dan berbagai pelayanan kerja lainnya¹⁶¹

Dalam rangka membuka lahan baru untuk perkebunan kopi tanah hitam yang bercampur pasir merupakan tanah paling ideal untuk tanaman kopi. Pemilihan kebun kopi harus mempertimbangkan tempat yang ideal, ketinggian tanah yang tepat, tidak terlalu banyak mendapat sinar matahari, dan juga tidak terlalu banyak terkena hujan yang bisa menghanyutkan tanah yang subur. Tempat terbaik adalah lembah di kaki gunung, atau di lereng perbukitan yang rendah, dan di daerah dekat gunung berapi.¹⁶²

Setelah memilih tempat yang akan dijadikan kebun, langkah selanjutnya adalah membersihkan tanah disekitarnya dari berbagai semak, rumput liar atau buluh yang disebut gelaga. Semua rumput dan semak dikumpulkan membentuk satu gundukan lalu dibakar, dan abunya dapat digunakan sebagai pupuk. Ketika ada pohon besar yang akarnya kuat tumbuh di situ, akan ditebang sampai setinggi lima kaki dari tanah dan dibiarkan membusuk. Setelah lahan ini bersih, kemudian dibuat 3-4 lubang dalam jarak yang berdekatan untuk tanaman bibit. Pagar hidup ditempatkan di sekeliling lubang, biasanya berupa pohon jarak atau *palma chisti*, atau pohon dadap atau pohon kapas.¹⁶³

2. Pengerahan Tenaga Kerja Rakyat

Pengerahan kerja paksa selama *Cultuurstelsel* dilaksanakan, terbagi atas tiga pelayanan, yaitu kerja wajib umum (*beerendienst*), kerja wajib pancen

¹⁶¹Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 57.

¹⁶²*Ibid.* hlm. 82.

¹⁶³*Idem.*

(*pancen diestren*), dan kerja wajib garap penanaman (*cultuurdienstern*).¹⁶⁴ Pengerahan kerja pertama, kerja wajib umum (*beerendienstern*) pengerahan tenaga kerja mencakup pelayanan kerja untuk umum, seperti pembuatan atau perbaikan jalan, pembuatan bangunan gedung perkantoran, penjaga tawanan, dan sebagainya.¹⁶⁵ Pengerahan kerja kedua, kerja wajib pancen (*pancen diestren*) pengerahan kerja yang menyangkut tugas pelayanan kerja pertanian di tanah milik para kepala-kepala pribumi.¹⁶⁶ Pengerahan kerja ketiga, kerja wajib garap penanaman (*cultuurdienstern*) pengerahan tenaga kerja yang menyangkut dengan pengerahan kerja paksa untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen dari lahan panen ke tempat penimbunan (kopi), atau ke pabrik pengolahan, dan kerja lain di perkebunan pemerintah.¹⁶⁷

Pengerahan tenaga kerja di Karesidenan Cirebon untuk perkebunan kopi lebih kepada pengerahan tenaga kerja yang ketiga yaitu kerja wajib garap penanaman (*cultuurdienstern*). Di Karesidenan Cirebon wajib garap penanaman (*cultuurdienstern*) sangat diperlukan dalam pembukaan perkebunan kopi. Hal ini dikarenakan, kopi biasanya ditanam di tiga tempat, yaitu di kebun, hutan, dan pekarangan. Hanya keluarga tani yang dikerahkan untuk bekerja di kebun-kebun dan hutan. Untuk menanam dan merawat lebih dari 200 pohon kopi di Jawa pada tahun 1840-an dikerahkan sekitar 400-500 ribu keluarga sebagai tenaga kerja.

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm. 59.

¹⁶⁵ *Idem.*

¹⁶⁶ *Ibid.* hlm. 60.

¹⁶⁷ *Idem.*

Seluruh keluarga bekerja dalam berbagai tahapan yang umumnya bersifat musiman. Letak perkebunan kopi yang jauh dan sistem pengangkutan yang masih tradisional menyebabkan pekerjaan menjadi lebih berat.¹⁶⁸ Pekerjaan yang lebih berat adalah ketika biji kopi telah berwarna hitam berkilau, biji kopi tersebut harus diambil dari pohon dengan hati-hati menggunakan sebatang bambu, tidak boleh merontokkan bunga atau buah yang belum masak. Wanita dan anak-anak bertugas mengambil buah sementara suami mereka mengerjakan tugas yang lebih berat.¹⁶⁹

3. Pengerahan Tenaga Wajib atau Tanaga Paksa untuk membuka lahan

Dalam pelaksanaan *Cultuurselsel* selain tanah juga membutuhkan pengerahan tenaga kerja rakyat secara besar-besaran untuk penggarapan tanah, penanaman, pemanenan, pengangkutan dan pengolahan di pusat-pusat pengolahan atau pabrik-pabrik. Pengerahan tenaga kerja yang dibutuhkan itu dilakukan dengan menggunakan ikatan tradisional yang ada di desa.¹⁷⁰

Sama halnya dengan pengerahan tenaga kerja untuk penggarapan tanah, penanaman, pemanenan, pengangkutan, pengolahan di pusat-pusat pengolahan, dan penyerahan wajib untuk pembukaan lahan juga diatur melalui ikatan tradisi. Petani di Karesidenan Cirebon bekerja di bawah perintah langsung kepala desa dan atasan mereka sebagai persembahan tradisional untuk penguasa yang lebih tinggi.¹⁷¹

¹⁶⁸Robert van Niel.*op.cit.* hlm 91-92.

¹⁶⁹Thomas Stamford Raffles, *op.cit.* hlm. 83-84.

¹⁷⁰Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 67.

¹⁷¹*Ibid.* hlm. 271.

Dalam rangka pembukaan lahan yang baru ikatan tradisi sangat berperan besar dalam penyediaan tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut disediakan oleh ikatan tradisional atau desa. Tenaga kerja yang digunakan dalam pembukaan lahan yang baru untuk tanaman ekspor yang disediakan oleh desa disebut dengan tenaga wajib. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah menganggap diri mereka adalah pemimpin tertinggi sehingga desa harus menyediakan yang dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda termasuk juga tenaga kerja untuk pembukaan lahan baru. Dalam masyarakat pedesaan yang bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja wajib adalah *sikep*.¹⁷² *Sikep* bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga wajib yang diminta oleh pemerintah Hindia Belanda.

C. Kebijakan Dalam Menggunakan Tenaga Kerja Perkebunan Kopi di Karesidenan Cirebon

Eksplorasi ekonomi atas tanah dan tenaga kerja di Hindia Belanda dilakukan oleh kolonial Belanda ketika terjadi kelangkaan modal di negeri Belanda. Pelaksanaan *Cultuurstelsel* ternyata kemudian didukung oleh kenyataan bahwa pada masa pra-industrial tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang memadai, tidak bebas, dan kegiatan kolektif yang dilakukannya masih berdasarkan ikatan tradisi. Kebijakan pemerintah dalam rangka menggunakan tenaga kerja di perkebunan kopi Jawa tidak terkecuali karesidenan Cirebon antara lain:

¹⁷²Suhartono, *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) hlm. 41.

1. Tidak menghilangkan ikatan-ikatan tradisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat Jawa

Dalam kehidupan ekonomi di Jawa sebelumnya terdiri atas dua bagian, yakni dunia ekonomi desa dan dunia ekonomi yang berada di atasnya. Di desa-desa terdapat ikatan desa, yaitu dunia kehidupan ekonomi yang sederhana dari penduduk tani, yang menghasilkan barang-barang untuk pemenuhan langsung atas kebutuhan sendiri. Kebutuhan-kebutuhan dan cara produksi mereka ditentukan oleh tradisi, seperti halnya seluruh kehidupan desa mengandung sifat-sifat yang turun temurun.¹⁷³ Dalam kehidupan masyarakat tradisional Jawa, pemindahan hak atas tanah, hubungan tenaga kerja dan penyerahan hasil tanah dilakukan tidak dengan perjanjian yuridis ekonomi.¹⁷⁴ Di dalam kebutuhan hidup masyarakat pedesaan dicukupi dengan cara tolong menolong dan gotong royong. Karena itu alat organisasinya terdiri dari ikatan-ikatan komunal, yakni rasa persaudaraan antara penduduk desa dan rasa tunduk desa kepada kepala desa mereka,¹⁷⁵ sehingga kepala desa mempunyai kedudukan yang tinggi di desa tersebut dan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Dengan demikian kehidupan desa merupakan hubungan yang turun temurun dan tidak terpisah-pisah. Ikatan mendatar (horizontal), yaitu rasa persaudaraan, dan ikatan tegak lurus (vertikal), yaitu rasa tunduk kepada kepala desa.¹⁷⁶

Dalam *Cultuurstelsel* desa merupakan unsur yang penting bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam organisasi-organisasi yang dibutuhkan,

¹⁷³Prajudi Atmosudirdjo, *op.cit.* hlm. 104.

¹⁷⁴*Ibid.* hlm. 105.

¹⁷⁵*Idem.*

¹⁷⁶*Ibid.* hlm. 106.

kepala desa dipergunakan sebagai organisator-organisator kecil.¹⁷⁷ Dalam rangka eksploitasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap masyarakat dan penduduk Hindia Belanda, ada tiga aspek kajian dalam membahas pelaksanaan *Cultuurstelsel*, yaitu aspek ekonomi yang menitik beratkan mengenai terjadinya perluasan lapangan kerja.¹⁷⁸ Pemerintah Hindia Belanda tidak berkeinginan mengubah pola tradisional kehidupan desa, melainkan menjalin hubungan kerjasama dengan para penguasa Jawa hingga tingkat kepala desa.

Hubungan kerjasama yang terjalin tidak dapat selalu berjalan dengan mulus, sehingga terpaksa digunakan elite tradisional sebagai perantara untuk masuk ke desa dan mendorong komponen tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pelayanan kerja tradisional lainnya.¹⁷⁹ Kepala desa pada masa pemerintahan Hindia Belanda termasuk dalam golongan pamong desa. Yang dimaksud dengan pamong desa yaitu lurah, wakil lurah, carik, ulu-ulu, jagabaya. Mereka dipilih oleh masyarakat yang bersangkutan secara adat. Pamong desa sendiri sangat melekat di kehidupan masyarakat Jawa. Sebutan lengkap untuk perangkat desa tersebut berbeda di beberapa tempat seperti dicantumkan dalam tabel:

¹⁷⁷ *Ibid.* hlm. 211.

¹⁷⁸ Akatiga, *Jurnal Analisis Sosial: Volume I*, (Bandung: Yayasan Akatiga Pusat Analisis Sosial), hlm. 148.

¹⁷⁹ Robert van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Jakarta:LP3ES, 2003), hlm. 143-144.

Istilah-Istilah Asli untuk Pamong Desa

DAERAH	ISTILAH PAMONG DESA
Banten	-
Krawang	-
Kabupaten-kabupaten Priangan	-
Cirebon	<i>perintah desa (deso), priyayi kolot, kekolot, sesaka, panjenengan mupakat</i>
Tegal	<i>desa, panjenengan, wong gawe desa, junjang krawat</i>
Banyumas	-
Pekalongan	<i>perintah deso, junjang krawat</i>
Bagelen	<i>junjangkrawat, prabot desa</i>
Semarang	<i>sarekat deso, punggowo, pametengan, konco, wong polisi</i>
Jepara	<i>perintah deso</i>
Rembang	<i>perintah deso</i>
Mediun	<i>perintah deso, babau desa</i>
Kediri	-
Surabaya	-
Pasuruhan	<i>perintah deso</i>
Probolinggo	<i>kepolo deso, kepolo=kepolo</i>
Besuki	<i>Klorahan</i>
Banyuwangi	-
Madura	-

Sumber: Soediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 42.

Banyak sebutan yang berlainan bagi kepala desa dalam bahasa asli, Karesidenan Cirebon juga memiliki sebutan khusus untuk sebutan kepala desa.

Adapun sebutan kepala desa di 18 Karisidenan seperti yang tercantum dalam tabel:

Istilah-Istilah Asli untuk Kepala Desa

DAERAH	ISTILAH KEPALA DESA
Banten	<i>jaro, juragan</i>
Krawang	<i>Mandor</i>
Kabupaten-kabupaten Priangan	<i>lurah, kuw</i>
Cirebon	<i>Kuwu</i>
Tegal	<i>bekel, kuwu</i>
Banyumas	<i>bekel, lurah</i>
Pekalongan	<i>Lurah</i>
Bagelen	<i>bekel, lurah</i>
Semarang	<i>Lurah</i>
Jepara	<i>Petinggi</i>
Rembang	<i>Petinggi</i>
Mediun	<i>bekel, lurah</i>
Kediri	<i>Kepolo</i>
Surabaya	<i>petinggi, lurah</i>
Pasuruhan	<i>Petinggi</i>
Probolinggo	<i>Petinggi</i>
Besuki	<i>Petinggi</i>
Banyuwangi	<i>Petinggi</i>
Madura	<i>Kliwon</i>

Sumber: Eindresume, III, hlm. 209.

Penyediaan tenaga kerja dengan biaya murah merupakan syarat pokok bagi penanaman hasil bumi berorientasi ekspor. Pada abad ke 19, penguasaan atas tenaga kerja jauh lebih penting ketimbang penguasaan tanah.¹⁸⁰ Melalui

¹⁸⁰ *Ibid.* hlm. 270.

Cultuurstelsel pola tradisional tenaga kerja Jawa lewat wajib setor hasil bumi dan tenaga kerja kepada penguasa lebih tinggi. Sejak awal kaum petani Jawa wajib memenuhi berbagai tugas kemasyarakatan. Petani harus menyerahkan sebagian hasil bumi kepada penguasa lebih tinggi dan selama beberapa waktu setiap tahun mengerjakan berbagai tugas yang ditentukan oleh kepala-kepalanya. Tugas yang dikerjakan oleh kaum petani sebagai ungkapan solidaritas sosial.

Dalam memperkenalkan *Cultuurstelsel* tersebut pada tahun 1830, pemerintah kolonial menerapkan sistem VOC dengan label baru, yakni pengawasan tanah dan tenaga kerja untuk produksi pemerintah yang digabungkan dengan manajemen bisnis “modern” dan menggunakan kekuasaan memaksa institusi tradisional yang ada, khususnya kepala desa dan pejabat pribumi.¹⁸¹ Perekrutan tenaga kerja Lurah (kepala desa) sangat besar peranannya sebagai mediasi antara pemerintah dengan kaum petani yang akan dijadikan buruh.

Kerja wajib untuk para pejabat Jawa dan kepala desa juga meningkat, walaupun pemerintah bertugas memeriksa apakah terjadi pelanggaran. Pengerahan tenaga kerja dilakukan langsung oleh pejabat, dalam hal ini petani akan menggarap lahan yang tersedia dengan perintah langsung kepala desa. Para petani tidak hanya dipaksa menanam tanaman perdagangan di ladang, sawah, dan tanah-tanah milik mereka sendiri akan tetapi diharuskan membangun dan

¹⁸¹ J. Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 221.

menjaga fasilitas infrastruktur, melayani para pejabat, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban lain.¹⁸²

Di Cirebon sendiri pamong desa dikenal dengan sebutan *perintah desa* (*deso*), *priyayi kolot*, *kekolot*, *sesaka*, *panjenengan mupakat*. Pemerintah Hindia Belanda bekerja sama dengan pamong desa dengan tujuan supaya dapat masuk ke dalam kehidupan desa baik dalam sektor ekonomi maupun tenaga kerja. Dengan ikatan-ikatan tradisonal yang ada tersebut pemerintah Hindia Belanda dapat lebih mudah menggunakan tenaga-tenaga kerja yang ada di setiap desa di Karesidenan Cirebon. Pada permulaan abad ke-20, ciri penting masyarakat tani di Jawa yang terbagi ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada kepemilikan tanah tetap berlaku di pedesaan. Masyarakat itu pada hakikatnya terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama, yaitu golongan masyarakat desa yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang hak penggarapan tanah komunal. Golongan itu umumnya disebut sebagai *sikep*, *kuli kenceng*, *kuli kendo*. Golongan kedua yaitu golongan yang tidak mempunyai hak apapun atas tanah. Umumnya mereka itu disebut dengan *wuwungan*, *bujang*, *tlosor*.

Di Cirebon pada pertengahan abad ke- 19 menyebutkan bahwa para petani kaya di daerah Cirebon mempekerjakan sejumlah pekerja atau *bujang* yang berasal dari keluarga-keluarga miskin sedesa ataupun dari desa tetangga. Para petani di daerah Cirebon menggunakan sistem *cacah* untuk mendapatkan tenaga kerja. *Cacah* digambarkan sebagai suatu rumah tangga bersama yang merupakan

¹⁸²Robert van Niel, *op.cit.* hlm. 141.

unit dasar bagi masyarakat petani di Jawa pada awal terbentuknya kolonial.¹⁸³ *Cacah* ialah sekelompok dari beberapa rumah tangga atau sekitar 20 anggota, yang dipimpin oleh seorang *sikep*. *Cacah* berada dibawah pengawasan seorang bangsawan supra-lokal yang memperoleh sejumlah besar atau kecil rumah tangga bersama petani tersebut.

Istilah bagi Orang yang Diharuskan Melakukan Kerja Wajib

DAERAH	ISTILAH ORANG MELAKUKAN KERJA WAJIB
Cirebon	<i>sikep, kuren tani, tani laku gawe, cekel gawe, jalma pegang sawah, tani buku, cacah</i>
Tegal	<i>kuli, janggol, kerik sikep</i>
Banyumas	<i>kuli, kerik</i>
Pekalongan	<i>Sikep</i>
Bagelan	<i>kuli, kerik</i>
Semarang	<i>wong tani, sikep</i>
Jepara	<i>wong tani, wong kwencen, sikep, gogol</i>
Rembang	<i>kraman kenceng, gogol, sikep kuli kenceng</i>
Madiun	<i>kuli kenceng</i>
Kediri	<i>kuli kenceng</i>
Surabaya	<i>gogol, kraman</i>
Pasuruhan	<i>gogol, gogol sawah, wong tani</i>
Probolinggo	<i>wong kenceng, oreng kenceng</i>
Madura	<i>oring kuat, tani</i>

Sumber: *Eindresume*, I, hlm. 60-61; II, hlm. 193-198.

¹⁸³Breman 1980 dalam Jan Breman, *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta:LP3ES, 1986), hlm. 15.

2. *Menggabungkan kekuasaan tradisional dan kewenangan pemerintah kolonial Belanda*

Pola kekuasaan tradisional yang digabungkan dengan kewenangan pemerintah kolonial Belanda mendorong petani Jawa (18 Karesidenan) untuk terlibat dalam produksi komoditas yang bisa dijual di pasar.¹⁸⁴ Dalam pelaksanaannya Van den Bosch melibatkan ikatan tradisional untuk menjalankan *Cultuurstelsel*. Para kepala-kepala pribumi, organisasi-oraganisasi desa menjadi salah satu unsur yang penting dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel*. Dengan mengadakan kerjasama dengan penguasa lokal atau ikatan-ikatan tradisional *Cultuurstelsel* akan berjalan dengan baik. Pelaksanaan *Cultuurstelsel* dilakukan melalui saluran birokrasi pemerintah, dengan melibatkan pejabat-pejabat pribumi dan Eropa. Pejabat-pejabat pribumi mencakup para bupati di tingkat kabupaten-kabupaten sampai kepala-kepala desa di tingkat desa.¹⁸⁵

Kekuasaan tradisional yang ada di setiap Karesidenan termasuk Karesidenan Cirebon bertugas langsung dalam pelaksanaan penanaman tanaman pemerintah (kopi dan tebu). Kekuasaan tradisional mengawasi jalannya penanaman tanaman pemerintah di setiap desa-desa. Desa menjadi unit dasar pemerintah. Kepala desa merupakan mata rantai antara petani dengan pejabat-pejabat tradisional.¹⁸⁶ Bupati bertanggung jawab kepada pemerintah Eropa, tetapi para pejabat Eropa juga terlibat pada tingkatan-tingkatan yang lebih rendah. Kehadiran para pejabat Eropa di tingkat desa menunjukkan kepada rakyat Jawa bahwa hidup masyarakat Hindia Belanda dikendalikan oleh

¹⁸⁴Robert van Niel. *op.cit.* hlm 115.

¹⁸⁵Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 56-57.

¹⁸⁶M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 262.

pemerintah kolonial.¹⁸⁷ Dengan menggabungkan kekuasaan tradisional maka pemerintah Hindia Belanda dapat dengan mudah memperkuat kekuasaannya. Sebab dalam masyarakat Jawa ikatan-ikatan tradisional yang telah ada merupakan suatu ikatan yang sangat dihormati.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam budidaya tanaman ekspor dengan menjalankan politik eksploitasi langsung. Politik eksploitasi dijalankan melalui birokrasi pemerintah yang berfungsi sebagai pelaksana langsung dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan yang berupa tanah dan tenaga kerja.¹⁸⁸ *Cultuurstelsel* mengisyaratkan bahwa pemerintah kolonial selain berfungsi sebagai badan pemerintah sekaligus juga berfungsi menjadi badan pengusaha. Dalam proses eksploitasi produksi perkebunan ini, peranan perangkat birokrasi menjadi pusat.

Birokrasi pemerintah Hindia Belanda pada *Cultuurstelsel* terdapat sentralisasi administrasi pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Dengan adanya sentralisasi administrasi membawa dampak perubahan pemerintah desa yang semula bersifat semi otonom berubah menjadi bagian sentral pemerintah Hindia Belanda.¹⁸⁹ Dengan keadaan yang seperti ini maka perangkat pemerintah desa menjadi ujung tombak birokrasi kolonial, dan menjadi alat pelaksana semua kebijaksanaan pemerintah pusat, termasuk kebijaksanaan pelaksanaan sistem perkebunan.¹⁹⁰

3. Pemerintah kolonial Belanda lebih memilih sistem tenaga paksa

¹⁸⁷ *Idem.*

¹⁸⁸ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 10-11.

¹⁸⁹ *Idem.*

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 12.

Dalam hal memenuhi tenaga kerja pemerintah kolonial Belanda memilih untuk memakai sistem tenaga paksa daripada tenaga kerja (bayaran) bebas di perusahaan swasta. D.H. Burger menyatakan bahwa pemerintah kolonial menerapkan kebijakan tersebut karena kehidupan ekonomi di Jawa pada permulaan abad ke- 19 masih ditentukan oleh ikatan feodal dan komunal.¹⁹¹

Pemerintah Hindia Belanda sendiri mengambil kebijakan sesuai dengan keadaan yang ada di tanah jajahan. Pada *Cultuurstelsel*, pemerintah kolonial melakukan kebijakan penggunaan tenaga kerja disesuaikan dengan tradisi yang ada. Pada masa *Cultuurstelsel* di Karesidenan Cirebon masih terikat dengan ikatan feodal dan komunal sehingga berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah terutama dalam hal tenaga kerja perkebunan tanaman ekspor (kopi, teh, nila, tebu, dan tembakau). Dengan kata lain, pengenalan *Cultuurstelsel* dengan kerja pakasanya sesuai dengan tahapan perkembangan sosial dan ekonomi di Jawa pada awal abad ke- 19 tidak dapat dilepaskan dari sistem tradisional yang ada dalam masyarakat Hindia Belanda.

Selain itu untuk menangani kekurangan tenaga kerja pemerintah lebih memilih tenaga kerja paksa dibandingkan tenaga kerja bayaran. Adapun alasan pemerintah kolonial menggunakan tenaga kerja paksa yaitu pertama, kepentingan ekonomi Belanda berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, khususnya Inggris. Belanda yang sama sekali belum mengembangkan industri modern di negaranya sendiri, tidak memerlukan koloni sebagai pasar produk-produk industri, melainkan sebagai sumber produk untuk perdagangan ekspor

¹⁹¹ J. Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 214.

yang menguntungkan. Ini berbeda sekali dengan Inggris yang sejak akhir abad ke 18 telah mengembangkan ekonomi industri yang perlu melakukan perluasan pasar ke luar negeri, seperti ke koloni-koloninya.¹⁹² Kedua, pemerintah Belanda sangat membutuhkan uang untuk membayar kembali utang-utangnya sebagai akibat perang melawan Belgia dan Perang Jawa (1825-1830) dan untuk membangun kembali perekonomian kolonial yang telah hancur akibat perang. Mengembangkan ekonomi yang cepat menghasilkan keuntungan di Jawa melalui usaha yang bebas dan tenaga kerja bayaran dianggap sulit.¹⁹³

¹⁹² A. M. Djuliaty Suroyo, Conditions and Systems of Exploitation; Some Preliminary Remarks on the Colonial Exploitation System in Java and India in the Nineteenth Century, *Intinerario* 11 (1987) I, hlm 61-76 dalam J. Thomas Lindblad, *op.cit.*, hlm. 215.

¹⁹³ *Ibid.* hlm. 215-216.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

INTERAKSI PETANI DAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA SELAKU PEMILIK PERKEBUNAN KOPI DI CIREBON

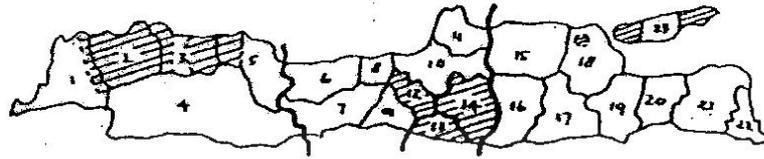
Pada permulaan abad ke-19 basis agraria memiliki karakter komunal, terutama di daerah-daerah Jawa.¹⁹⁴ Watak komunal juga di jalankan di daerah Cirebon. Tanah-tanah komunal dijalankan pada tahun 1830 ketika *Cultuurstelsel* mulai berlaku.¹⁹⁵ Kebijakan itu dilakukan oleh pemerintah karena terjadi kelangkaan tenaga kerja, sehingga pemerintah perlu membagi-bagikan tanah sawah kepada seluruh penduduk desa. Pada tahun 1831 Van den Bosch melalui edaran resmi mendukung tulisan *Le Clercq* yang menyatakan lurah desa menggunakan kebijakannya sendiri dalam membagi-bagikan tanah persawahan setiap tahun kepada seluruh penduduk desa. Akibatnya, setiap penggarap lalu menjadi *sikep* (peserta pemilik tanah persawahan), dan berdasarkan alasan tersebut maka *sikep* wajib menyediakan jasa tenaga kerja.¹⁹⁶ Walaupun tanah dibagi-bagikan kepada penduduk, tanah-tanah di Jawa tetap berada di bawah pengawasan langsung pemerintah Hindia Belanda di semua Karesidenan di Jawa dan Madura, kecuali Jakarta, Kedu, dan Yogyakarta serta Surakarta (tanah-tanah partikelir di Karesidenan-Karesidenan tersebut dikecualikan).¹⁹⁷

¹⁹⁴Jan Breman, *Penguasa Tanah dan Tenaga Kerja Jawa di Masa Kolonial*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 10.

¹⁹⁵*Idem.*

¹⁹⁶*Ibid.* hlm. 12.

¹⁹⁷Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 43.



Jawa Barat

1. Banten
2. Jakarta
3. Krawang
4. Kabupaten-kabupaten Priangan
5. Cirebon

Jawa Tengah

6. Tegal
7. Banyumas
8. Pekalongan
9. Bagelen
10. Semarang
11. Jepara
12. Kedu
- Kerajaan*
13. Yogyakarta
14. Surakarta (Solo)

Jawa Timur

15. Rembang
16. Madiun
17. Kediri
18. Surabaya
19. Pasuruan
20. Probolinggo
21. Besuki
22. Banyuwangi
23. Madura

Dalam peta di atas, tanah di Karesidenan Cirebon tetap berada di bawah pengawasan langsung pemerintah Hindia Belanda. Selain Karesidenan Cirebon tanah yang berada dalam pengawasan pemerintah yaitu Banten, Kabupaten-kabupaten Priangan, Tegal, Banyumas, Pekalongan, Bagelen, Semarang, Jepara, Rembang, Madiun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Besuki, Banyuwangi dan Madura. Sedangkan pada gambar peta yang di arsir (Jakarta, Krawang, Kedu, Yogyakarta, Surakarta) tanah tidak langsung diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda.

Dapat digambarkan keadaan sosial pedesaan Cirebon selama abad ke-19. Lapisan teratas di pedesaan Karesidenan Cirebon adalah penguasa desa (lurah desa) dan golongan *priyayi*, sehubungan dengan lapisan teratas yang hidup dari hasil tanah.¹⁹⁸ Lapisan kedua, *sikep* (yang juga dikenal dengan sebutan *cacah, bumi, gogol, wong kenceng*) merupakan penggarap yang umumnya merupakan

¹⁹⁸ Jan Breman, *op.cit.* hlm. 13.

tulang punggung perekonomian tani.¹⁹⁹ *Sikep* merupakan keturunan dari *cikal bakal* desa. Lapisan ketiga adalah lapisan bawah pertama yang sering disebut *wuwungan, orang penumpang, tangkong*.²⁰⁰ Lapisan bawah yang lainnya adalah *wong kenceng* atau kuli kenceng dan orang penumpang (*numpang karang, tangkong, kuli kendo*). Lapisan bawah ini akan tetap menjadi seorang petani pekerja. Hal ini diperkuat dengan tulisan Van Deventer

Tidak sepetak sawah pun diberikan kepada mereka, dengan demikian terpaksa mereka menyambung hidupnya dengan tetap menjadi pelayan bagi salah satu di antara tiga lapisan yang tersebut di atas.

Setiap *sikep*, setiap *priyayi*, setiap lurah desa, dengan demikian mempunyai sejumlah wuwung berikut keluarga mereka yang sama sekali bergantung kepadanya, baik karena memang dikuasakan untuk itu oleh administrasi desa dengan memberikan sawah kepadanya, atau karena ia berhasil mengikat mereka sebagai pelayannya melalui perjanjian secara sukarela.²⁰¹

Berbicara secara khusus tentang keadaan Cirebon dalam *Cultuurstelsel* Residen Cirebon mengemukakan:

“Wuwung benar-benar merupakan hewan penarik bagi masyarakatnya. Mereka menunaikan tugasnya yang paling berat, dan oleh induk semangnya mereka pun dipaksa untuk melakukan kerja wajib dan pelayanan lainnya tanpa pengupahan, tugasnya yang oleh para induk semangnya itu sendiri hendak dielakkannya, misalnya pekerjaan perawatan jalan raya, ronda malam dan tugas-tugas keamanan lainnya, mengangkut harta benda dan pendapatan pemerintah, dan lain-lain”.²⁰²

Gambaran keadaan sosial di daerah Karesidenan Cirebon di atas, menjelaskan adanya interaksi antara pemilik perkebunan dengan petani di daerah tersebut. Pemilik perkebunan kopi maupun perkebunan yang lainnya adalah pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perkebunan tersebut melibatkan elite desa seperti kepala desa, golongan *priyayi* maupun

¹⁹⁹ *Ibid.* hlm. 14.

²⁰⁰ *Idem.*

²⁰¹ Van Deventer 1866,II:270 dalam Jan Breman, *op.cit*, hlm. 14.

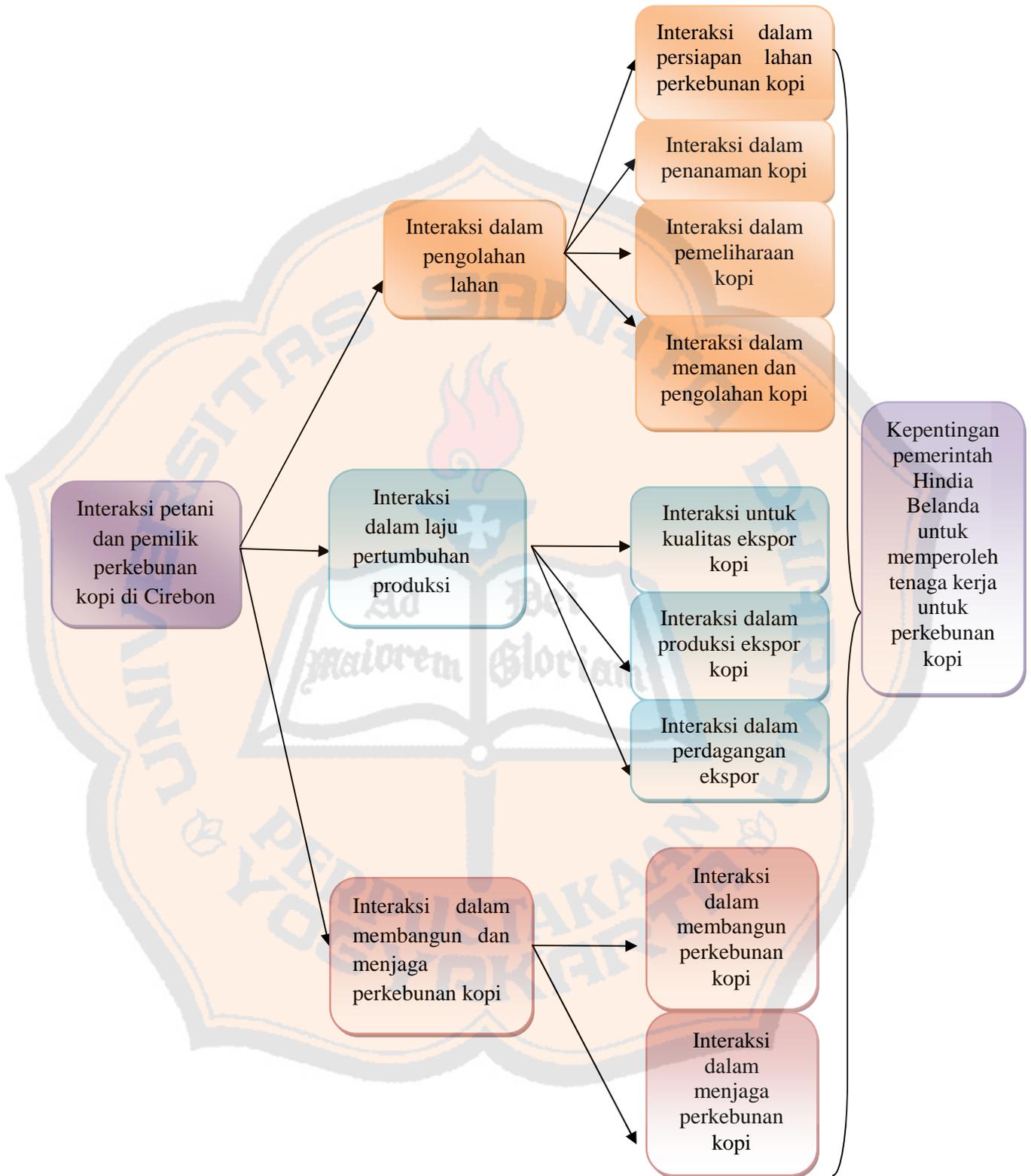
²⁰² Van Denventer 1866, II ck. 270.Cf. De Haan, yang menunjukkan pada sebuah laporan dari pedalaman Cirebon, dalam Jan Breman, *op.cit*, hlm. 18.

petani. Elite desa tersebut merupakan penghubung antara pemerintah Hindia Belanda dengan penduduk Karesidenan Cirebon. Golongan *priyayi*, yaitu kelompok sosial yang sesungguhnya terdiri dari para punggawa (pejabat), tetapi secara berangsur-angsur akhirnya mencakup juga para anggota keluarga dan keturunannya.²⁰³

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada dasarnya dilaksanakan oleh elite desa dan golongan *priyayi* di bawah pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan cara kerja *Cultuurstelsel* pemerintah sendiri tidak mengadakan perjanjian dengan petani perorangan melainkan dengan para petani dari satu desa secara menyeluruh. Dalam hal ini kepala desa bertindak sebagai wakil atau sebagai kuasa usaha desa.²⁰⁴ Pelaksanaan *Cultuurstelsel* menimbulkan terjadinya beberapa interaksi yaitu interaksi yang terjalin antara pemerintah Hindia Belanda dengan elite desa di Karesidenan Cirebon, dan interaksi yang terjalin antara petani dengan elit desa. Interaksi tersebut terlihat dalam pengolahan lahan perkebunan kopi, laju pertumbuhan produksi kopi di Karesidenan Cirebon dan membangun serta menjaga perkebunan.

²⁰³Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 110.

²⁰⁴Depdibud, *Sejarah Daerah Jawa Barat*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 134.



A. Interaksi dalam Pengolahan Lahan

Cultuurstelsel 1830-1870, merupakan perwujudan industri perkebunan negara, kelanjutan dari politik eksploitasi (*drainage politiek*).²⁰⁵ Apabila pada zaman VOC eksploitasi dilakukan melalui kepala pemerintahan feodal setempat maka eksploitasi pemerintah kolonial Hindia Belanda dilakukan melalui sistem perkebunan negara.²⁰⁶ Sistem eksploitasi baru ini dilaksanakan dengan alat birokrasi pemerintah yang berfungsi langsung sebagai pelaksana dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris tanah jajahan, yaitu penguasa atas tanah dan tenaga kerja.²⁰⁷ Pelaksanaan eksploitasi tidak dapat dilepaskan dengan interaksi. Interaksi dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan kerjasama yang baik dengan penguasa pribumi. Di Karesidenan Cirebon pemerintah Hindia Belanda mengadakan interaksi dengan para penguasa pribumi. Dalam rangka penanaman kopi diperlukan beberapa persiapan yang berhubungan dengan lahan yang akan ditanami. Oleh karena itu interaksi sangat dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda.²⁰⁸ Beberapa persiapan tersebut antara lain:

1. *Persiapan Lahan Perkebunan Kopi*

Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pertama kali adalah mempersiapkan lahan untuk dipergunakan sebagai perkebunan kopi. Secara ekonomis pertumbuhan dan produksi tanaman kopi sangat tergantung

²⁰⁵ Iyung Pahan, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit :Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 43.

²⁰⁶ *Idem*.

²⁰⁷ *Ibid*. hlm. 44.

²⁰⁸ Capt. R. P. Suyono, *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 55.

pada keadaan iklim dan tanah yang digunakan untuk menanam.²⁰⁹ Lahan yang digunakan untuk perkebunan kopi di Karesidenan Cirebon adalah tanah hutan rimba atau hutan belukar, dan tanah tegal atau ladang. Penanaman kopi menghendaki tanah yang lapisan atasnya gembur, subur, dan banyak mengandung humus.²¹⁰

Dalam mempersiapkan lahan untuk penanaman kopi, diperlukan pengerahan tenaga kerja yang besar karena lahan yang akan digunakan dapat berupa lahan hasil pembukaan hutan; tanah bukaan ulang, yaitu tanah bekas tanaman kopi yang dibongkar untuk ditanami kembali kopi; tanah rotasi, yaitu yang secara bergantian ditanami kopi dan tanaman lain; tanah konversi, tanah alih fungsi dari tanaman lain. Ketersediaan lahan tersebut secara langsung berkaitan dengan pembudidayaan dan penyediaan bahan tanaman, lahan harus dalam kondisi baik. Tanah harus bersih dari sisa-sisa akar dan tunggul agar tidak menjadi sumber infeksi penyakit.²¹¹

Dalam rangka membuka perkebunan kopi, pemerintah sebagai pemilik usaha mengadakan interaksi dengan petani. Pada mulanya ketika *Cultuurstelsel* pertama kali diperkenalkan, masih tersedia lahan, tetapi tenaga kerja langka sehingga Pemerintah mengadakan interaksi dengan kepala desa yang merupakan bagian dari unit administrasi paling bawah untuk bekerjasama membudidayakan kopi.

²⁰⁹ AAK, *Budidaya Tanaman Kopi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1988), hlm. 23.

²¹⁰ *Idem*.

²¹¹ N.D Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, *Kopi Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), Hlm. 24.

Kepala desa memiliki peranan penting dalam organisasi desa, akan tetapi tugas yang lebih penting yang diemban adalah sebagai penghubung antara petani dengan pemerintah Belanda sebagai pemilik perkebunan.²¹² Kepala desa merupakan alat yang digunakan pemerintah Hindia Belanda, untuk memperoleh tenaga kerja yang siap bekerja di perkebunan-perkebunan milik pemerintah.

Dalam rangka persiapan lahan untuk penanaman kopi, pemerintah tidak hanya berinteraksi dengan kepala desa akan tetapi juga dengan golongan *priyayi* yang memiliki tanah. Dengan menggunakan ikatan adat, interaksi petani dengan pemerintah Hindia Belanda terjalin melalui desa. Penduduk desa dipaksa untuk membuka lahan, menanam, mengolah, dan dipaksa untuk bekerja di perkebunan kopi yang akan dibuka. Untuk mempersiapkan lahan perkebunan kopi, pemerintah bekerjasama dengan perangkat desa.

Di desa terdapat kepala desa dan golongan *priyayi* yang terpisah jauh dari produksi²¹³ sehingga terjalin interaksi antara pemerintah Hindia Belanda dengan petani penguasa tanah (*sikep*). *Sikep* bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja untuk mempersiapkan lahan tanaman kopi. Seorang *sikep* mempunyai *numpang* (tanggungan) yang disebut dengan *bujang*.²¹⁴ *Sikep* mempergunakan petani *numpang* untuk melakukan kerja bakti bagi negara²¹⁵ termasuk juga kerja paksa dalam persiapan lahan untuk perkebunan-perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda. Dengan mengadakan kerjasama, pemerintah Hindia Belanda memperoleh kemudahan dalam mencari tenaga kerja

²¹² Prajudi Atmosudirdjo, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1983), hlm. 211.

²¹³ Soediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *op.cit.* hlm. 43.

²¹⁴ *Ibid.* hlm. 8

²¹⁵ *Idem.*

perkebunan kopi. *Sikep* atau petani penguasa tanah dengan mudah memperoleh tenaga kerja karena adanya tradisi yang sangat kuat dalam masyarakat Jawa. Tradisi tersebut sangat dipatuhi oleh anggota desa setempat. Di dalam struktur masyarakat Jawa lapisan terendah memiliki kewajiban untuk bekerja kepada lapisan di atasnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, golongan yang menduduki tempat tertinggi adalah bangsawan atau *priyayi* serta penguasa pribumi, sedangkan golongan bawah terdiri dari petani, pedagang, dan buruh tetap masih menjadi golongan abdi yang sangat setia kepada gusti.²¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa dalam persiapan lahan perkebunan kopi cara yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah mengadakan interaksi serta kerjasama dengan penguasa setempat dan petani penguasa tanah. Di dalam prakteknya interaksi yang dilakukan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik karena menggunakan penguasa-penguasa pribumi sebagai penghubung dengan orang-orang pribumi. Bahkan dalam interaksi yang terjadi antara petani dan pemilik perkebunan digambarkan sebagai hubungan antara *Kawula-Gusti*, dimana petani menjadi pengikut kepala desa maupun golongan *priyayi* yang memiliki kewajiban kerja paksa untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda dan golongan *priyayi* ataupun kepala desa. Pada *Cultuurstelsel* penguasa lokal tetap menjalin hubungan erat dengan rakyat, dalam istilah Jawa disebut *manunggaling kawula lan Gusti* artinya bersatu manunggal antara hamba dan raja dalam arti duniawi.²¹⁷ Rakyat harus tunduk dan patuh kepada pemimpinnya sebagai pengganti raja. Raja dan rakyat merupakan dua komponen yang

²¹⁶ Suhartono, *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1995), hlm. 40.

²¹⁷ *Ibid.* hlm. 49.

simbiotik, saling menghidupi karena keduanya mempunyai kebutuhan yang berbeda yang tidak dapat dipenuhi sendiri.²¹⁸

2. Penanaman Kopi

Setelah pembukaan lahan atau persiapan lahan untuk perkebunan kopi, Pemerintah Hindia Belanda juga memerlukan tenaga kerja dalam rangka penanaman kopi. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda tetap melakukan kerjasama dan interaksi dengan penguasa pribumi di Karesidenan Cirebon.

Selain penyiapan lahan, petani juga harus tunduk kepada pemerintah untuk melaksanakan kerja paksa dalam penanaman kopi.²¹⁹ Penanaman kopi diawali dengan pembuatan lubang tanaman. Pembuatan lubang tanaman dilakukan 3-6 bulan sebelum menanam kopi. Pembuatan lubang dan luasnya tergantung pada struktur tanah. Semakin berat struktur tanah maka semakin lama lubang yang akan dibuat, semakin besar, dan semakin luas lubang yang harus dipersiapkan. Jarak tanaman harus dipilih sesuai dengan jenis kopi, kesuburan tanah, dan tipe iklim. Untuk jenis kopi Arabika dan Robusta memiliki perbedaan dalam menentukan jarak penanaman. Beberapa jarak tanam yang lazim dipakai antara lain terlihat dalam tabel :

Jarak Tanaman Kopi Robusta dan Arabika

Sistem	Robusta (meter)	Arabika (meter)
Segi Empat	2,50 x 2,75	2,00 x 2,50
	2,75 x 2,50	2,50 x 2,50
Pagar	1,75 x 3,50	1,50 x 3,00
Pagar ganda	2,0 x 2,0 x 3,50	1,5 x 1,5 x 3,0
	2,0 x 2,0 x 4,0	1,5 x 1,5 x 4,0

Sumber: M. Yahmadi, 1979, *Pedoman Praktek Budi Daya dan Pengolahan Kopi*. SBPB, tabel 11. hlm. 16.

²¹⁸ *Idem*.

²¹⁹ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hlm 55.

Dengan melihat rentang waktu yang dibutuhkan dalam penanaman tanaman kopi maka pemerintah Hindia Belanda memerlukan tenaga kerja untuk menanam kopi. Pada saat *Cultuurstelsel* kerja wajib sangat dituntut oleh pemerintah, karena untuk penanaman kopi memerlukan pengerahan tenaga kerja rakyat yang cukup banyak. Pengerahan tenaga kerja rakyat ini juga memerlukan ikatan desa.²²⁰ Tenaga petani dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga mereka para petani tidak dapat menanam tanaman untuk kebutuhan mereka sendiri. Petani harus memberikan layanan kerja kepada perkebunan yang diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan.²²¹

Sistem *Cultuurstelsel* memungkinkan eksploitasi pedesaan Jawa secara maksimal, didukung dengan adanya sistem bonus dan insentif dari Van den Bosch berhasil mengarahkan para bupati Jawa untuk mengawasi penanaman dan pengangkutan.²²² Sistem bonus dan insentif menyebabkan para kepala bersedia serta patuh diberi tugas pimpinan oleh Van den Bosch.²²³ Beban berat ditanggung oleh penduduk, hal tersebut semakin diperburuk dengan penyelewengan lembaga tradisional yang bekerjasama dengan pemerintah. Dalam penanaman kopi yang berkaitan dengan persiapan lahan, ikatan desa bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja. Selain para pemilik tanah,

²²⁰*Ibid.* hlm. 67.

²²¹*Idem.*

²²² Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu: JaringanAsia Volume 2*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm. 75.

²²³ Prajudi Atmodirdjo, *op.cit.* hlm 212.

kepala desa juga bertanggungjawab kepada pemerintah dalam melaksanakan budidaya kopi sebab desa berada pada kedudukan paling bawah.²²⁴

Dari keadaan yang digambarkan, dapat dijelaskan bahwa interaksi yang terjadi antara petani dengan pemilik perkebunan terlihat jelas. Interaksi yang terjalin antara petani dan pemerintah Hindia Belanda dilakukan karena adanya kepentingan pemerintah Hindia Belanda akan hasil perkebunan. Komunikasi yang terjalin antara mereka tentu saja tidak dapat lepas dari kepala desa maupun para *priyayi*. Kepala desa merupakan penghubung paling utama antara petani dengan pemerintah Hindia Belanda. Secara tradisional kewajiban desa terhadap pemerintah terdiri atas dua macam, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan secara rutin atau terus menerus dan kewajiban yang dikerjakan sewaktu-waktu saja jika ada perintah dari atasan.²²⁵ Kewajiban rutin berupa *pancen* dan *seba*.²²⁶ *Pancen* adalah pengerahan tenaga kerja rakyat secara bergilir untuk kepentingan pejabat di atasnya, seperti membersihkan rumah-rumah, kantor beserta halamannya, dan mengolah tanah jabatan atau tanah pribadi.²²⁷ *Seba* (upeti) adalah penyerahan hasil bumi dari rakyat kepada pejabat atas.²²⁸ Semua itu dilaksanakan oleh para penduduk pribumi dan para petani. Petani merupakan lapisan paling bawah yang harus mengabdikan diri kepada lapisan atasnya. Di dalam perkebunan sendiri petani menjadi alat produksi tanaman kopi bagi

²²⁴ Edi S, Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 161.

²²⁵ *Idem*.

²²⁶ *Ibid.* hlm. 162.

²²⁷ *Idem*.

²²⁸ *Ibid.* hlm. 165.

pemerintah Hindia Belanda. Karena berhasil atau tidaknya hasil yang diperoleh tergantung pengolahan lahan yang dilakukan para petani.

3. *Pemeliharaan Tanaman Kopi*

Interaksi yang terjalin antara pemerintah Hindia Belanda dengan penduduk pribumi tidak hanya berhenti pada penanaman kopi saja akan tetapi juga dalam pemeliharaannya. Pemerintah tidak dapat melakukan pemeliharaan tanaman kopi tanpa bantuan penduduk pribumi. Dengan adanya interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penguasa pribumi maupun dengan penduduk pribumi maka pelaksanaan tersebut dapat dibebankan kepada penduduk pribumi. Pemeliharaan tanaman merupakan kegiatan yang terus menerus harus dilakukan agar diperoleh hasil optimal. Kegiatan pemeliharaan pertama, pemeliharaan tanah atau lahan dimaksudkan untuk menjaga agar media tanam kopi tetap dalam kondisi baik. Di sini yang perlu diperhatikan oleh petani adalah pertumbuhan gulma yang dapat menyaingi proses penyerapan sari makanan. Dalam perkebunan masih terdapat pekerjaan lain yaitu pemeliharaan prasaranan fisik seperti jalan-jalan, pembatasan maupun gorong-gorong.²²⁹ Kegiatan pemeliharaan kedua, pemeliharaan tanaman pokok dapat berupa pemangkasan dan penyulaman. Tujuan pemangkasan adalah untuk mengatur pertumbuhan vegetatif ke arah generatif yang lebih produktif. Terdapat tiga macam pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, serta pemangkasan rejuvinasi. Pemangkasan bentuk bertujuan untuk membentuk kerangka tanaman yang kuat dan seimbang. Sedangkan pemangkasan produksi

²²⁹ *Ibid.* hlm. 26.

bertujuan mempertahankan keseimbangan kerangka tanaman yang telah diperoleh melalui pemangkasan bentuk. Sementara itu pemangkasan rejuvinasi bertujuan untuk peremajaan batang.²³⁰

Selain pemangkasan pada perkebunan kopi perlu diadakan juga penyulaman dan peremajaan, dengan maksud untuk mengganti tanaman yang sudah tua. Peremajaan tidak hanya mengganti tanaman yang sudah tua atau rusak dengan yang baru, tetapi juga pergantian varietas atau klon yang unggul serta perbaikan kultur teknis. Rejuvinasi (peremajaan) dapat dilakukan secara total, yaitu dengan mengganti seluruh pohon kopi di suatu areal; selektif, yang dipilih pada pohon-pohon yang jelas sudah tua atau rusak dan produksinya rendah; sistematis, yaitu peremajaan bertahap untuk diremajakan seluruhnya.²³¹

4. Panen dan Pengolahan Kopi

Dalam memanen dan pengolahan kopi pemerintah Hindia Belanda juga memerlukan ikatan desa. Dengan ikatan desa pemerintah Hindia Belanda dapat memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja yang diperlukan dalam perkebunan kopi. Dalam pemanenan kopi pemerintah juga memerlukan pengerahan tenaga kerja yang banyak karena kopi berbuah tidak serentak, maka panen juga tidak dapat dilakukan sekali saja. Ada tiga tahap pemetikan untuk menghasilkan kopi bermutu tinggi, yakni²³²:

- a. Petik pendahuluan, yaitu pemetikan pada buah-buah yang berwarna kuning sebelum berusia 8 bulan.
- b. Panen raya, yaitu pemetikan sistem petik merah dapat berjalan 4-5 bulan.

²³⁰ *Idem.*

²³¹ *Ibid.* hlm. 27.

²³² *Ibid.* hlm. 30.

c. Racutan, yaitu pemetikan terakhir tanpa dipilih. Petik ini dilakukan bila terdapat sisa kopi.

Setelah melakukan panen maka petani juga harus melakukan pengolahan. Pada prinsipnya pengolahan kopi bertujuan memisahkan daging buah, kulit, dan kulit ari, serta mendapatkan biji dengan kadar air tertentu. Cara pengolahan kopi, yaitu dengan cara pengolahan kering. Pengolahan kering meliputi 3 tahapan yaitu:²³³

- a. Penjemuran gelondong, dalam penjemuran ini kopi harus dilakukan pembalikan-pembalikan dan memakan waktu 2-3 pekan.
- b. Pengerebusan, pengerebusan dimaksudkan untuk memisahkan biji dari daging buah, kulit tanduk, dan kulit ari.
- c. Sortasi, biji kopi yang sudah melalui proses pengerebusan kemudian di sortasi. Sortasi yaitu penjemuran ulang. Tujuan dari sortasi yaitu memisahkan biji-biji yang baik dari biji pecah kena bubuk, biji hitam, rusak dan kotoran.

Dalam rangka pembudidayaan tanaman kopi diperlukan interaksi antara pemerintah Hindia Belanda, elite desa dan petani. Interaksi ini terjalin karena pemerintah Hindia Belanda ingin menggalakkan produksi kopi di tanah jajahan. Untuk ini maka pemerintah memerlukan tenaga kerja yang terjamin dan tersedia guna melayani melalui kerja rodi.²³⁴ Kepala desa dan golongan *priyayi* bersedia untuk menyediakan tenaga kerja di perkebunan kopi. Rakyat desa tidak dapat menghindar dari tuntutan kerja paksa penanaman kopi²³⁵ di bawah pemerintah

²³³ *Ibid.* hlm. 31.

²³⁴ Elizabeth E. Graves, *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 132

²³⁵ *Idem.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hindia Belanda. Interaksi petani dan pemilik perkebunan di Karesidenan Cirebon sangat memiliki arti penting dalam rangka pengolahan lahan. Karena pengolahan lahan merupakan tahapan awal untuk memperoleh hasil yang menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda. Dalam pengolahan lahan pemerintah Hindia Belanda mengadakan kerjasama dengan pribumi. Rakyat yang terlibat dalam penanaman pemerintah termasuk kopi di Karesidenan Cirebon digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Keterlibatan Penduduk Pedesaan Dalam Pelaksanaan Sistem Tanam Di Jawa, Periode 1837-1845

Karesidenan	Persentase keterlibatan penduduk dalam:						Persentase penggunaan tanah		
	Seluruh tanaman pemerintah			Seluruh tanaman pemerintah kecuali kopi			untuk penanaman, kecuali kopi		
	1837	1840	1845	1837	1840	1845	1837	1840	1845
Banten	76	92	48	2	20	25	2	4	7
Priangan	86	65	67	2	9	9	3	2	2
Krawang	25	42	37	25	42	37	-	-	-
Cirebon	73	69	54	55	49	36	11	11	8
Tegal	51	44	36	35	28	23	7	6	10
Pekalongan	57	59	55	37	46	40	13	15	12
Semarang	35	30	25	5	5	10	6	1	2
Jepara	37	35	35	16	24	25	3	5	6
Rembang	35	31	25	5	14	21	0,5	1	2
Surabaya	29	32	33	28	31	31	3	3	4
Pasuruhan	77	59	64	54	31	33	13	11	12
Besuki	40	47	54	12	19	24	4	6	7
Pacitan	60	72	63	22	-	-	-	-	-
Kedu	86	79	97	6	1	6	5	2	1
Bagelen	35	81	62	23	54	43	6	15	11
Banyumas	77	68	74	35	33	36	12	12	9
Kediri	59	61	61	24	23	19	7	6	4
Madiun	60	59	51	26	23	23	4	5	4
Seluruh Jawa	54	57	53	20	25	25	4	6	6

Sumber: Djoko Suryo, 1989, *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, hlm. 23.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat keterlibatan penduduk terhadap *Cultuurstelsel* antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama.²³⁶ Salah satu sebabnya ialah karena adanya perbedaan kondisi setempat terhadap kecocokan penanaman jenis tanaman yang ditentukan.²³⁷ Selain keterlibatan dalam penanaman, penduduk masih terlibat dalam pengerahan kerja paksa, yang tidak tercakup dalam tabel.²³⁸ Pengerahan kerja paksa mencakup tugas-tugas pertanian di tanah kepala-kepala pribumi. Pengerahan kerja paksa digunakan untuk mengerjakan pekerjaan pembukaan lahan perkebunan, pembuatan dan perbaikan irigasi, kegiatan penanaman, pengangkutan hasil panen dari lahan panen ke tempat penimbunan.²³⁹

Pelaksanaan *Cultuurstelsel* di Karesidenan Cirebon memerlukan keterlibatan penduduk pribumi. Tabel tersebut menunjukkan perbandingan keterlibatan penduduk pedesaan di Karesidenan Cirebon dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada awal pelaksanaannya. Pada tahun 1837 seluruh penanaman ekspor di Karesidenan Cirebon menggunakan tenaga kerja penduduk sebesar 73%. Kemudian pada tahun 1840 total keterlibatan penduduk untuk seluruh tanaman pemerintah mencapai 69% dan pada tahun 1845 menurun sebesar 54%. *Cultuurstelsel* telah merubah kehidupan masyarakat pedesaan Jawa. Pertama desa sebagai organisasi harus diikutsertakan untuk berproduksi secara besar-besaran.²⁴⁰ Kedua, petani di Jawa kedudukannya merosot menjadi kuli karena

²³⁶ *Idem.*

²³⁷ *Ibid.* hlm. 59.

²³⁸ *Idem.*

²³⁹ *Ibid.* hlm. 60.

²⁴⁰ D. H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: PT. Bhratara Karya Anksara, 1977), hlm. 3

kebun budidaya memerlukan pengetahuan teknis yang semakin luas, maka selama berlakunya *Cultuurstelsel* rakyat harus bekerja menurut petunjuk para penguasa Eropa.²⁴¹ Pemerintah mulai mencampuri kehidupan desa, dengan langkah pertama membaaur dalam lapisan feodal kemudian bisa masuk dalam kehidupan desa.²⁴²

B. Interaksi dalam Laju Pertumbuhan Produksi

Sejak diperkenalkannya kopi jenis Arabica dari Malabar ke Jawa di sekitar tahun 1699 oleh kaum kapitalis Belanda, tanaman kopi ini mengalami perkembangan yang amat pesat. Perkembangan tanaman kopi tidak dapat dilepaskan dari *Cultuurstelsel* yang diperkenalkan pemerintah kolonial pada tahun 1830. Pelaksanaan *Cultuurstelsel* di Karesidenan Cirebon juga merupakan usaha pemerintah dalam membudidayakan tanaman kopi. Kontur tanah di Karesidenan Cirebon yang subur sangat cocok bagi tanaman kopi. Melalui beberapa usaha yang ditempuh pemerintah menyebabkan Karesidenan Cirebon menjadi salah satu daerah penghasil kopi. Kopi yang dihasilkan Karesidenan Cirebon ikut menyumbang jumlah ekspor Hindia Belanda. Antara tahun 1830-1834 produksi kopi Arabica di Jawa baru mencapai 26.600 ton, produksi kopi meningkat 30 tahun kemudian menjadi 77.600 ton.²⁴³ Adanya tanah yang subur dan iklim yang cocok di Jawa, serta pengerahan tenaga kerja melalui sistem *Cultuurstelsel*, ditambah pula dengan dipegangnya monopoli perdagangan kopi

²⁴¹ *Ibid.* hlm. 9.

²⁴² *Ibid.* hlm. 13.

²⁴³ Creutzberg, 1975, *Changing Economy in Indonesia: The Export Crops 1816-1940*. Amsterdam, tabel 12, dalam N.D Retnandari dan Moeljarto Tjokrowinoto, *Kopi Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), Hlm. 14-15.

di tangan pemerintah, telah memungkinkan eksploitasi dan mentrasfer nilai lebih (*surplus values*) yang cukup besar ke negeri Belanda, yang ikut menopang pertumbuhan ekonomi Belanda secara tajam.²⁴⁴ Nilai ekspor kopi antara tahun 1865-1870 rata-rata mencapai 25.965.000 gulden.²⁴⁵

1. Kualitas ekspor kopi Hindia Belanda

Kuantitas ekspor kopi Hindia Belanda pada tahun 1830-1870 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1830 kuantitas ekspor Hindia Belanda sebesar 17.833 ton. Sedangkan pada tahun 1840 kuantitas ekspor meningkat sebesar 52.008 ton menjadi 69.841 ton. Kuantitas ekspor pada tahun 1850 menurun menjadi 50.571 ton. Akan tetapi pada tahun 1860 kuantitas ekspor kembali naik sebesar 12.630 menjadi 63.201 ton dan pada tahun 1870 kuantitas ekspor kembali naik menjadi 82.343 ton. Kuantitas ekspor kopi Hindia Belanda digambarkan dalam tabel berikut:

Kuantitas ekspor Kopi Indonesia Tahun 1823-1870²⁴⁶

Tahun	Kuantitas (Ton)
1823	17.611
1830	17.833
1840	69.841
1850	50.571
1860	63.201
1870	82.343

Sumber: Bart van Ark, "The Volume and Price of Indonesian Exports, 1823 to 1940: The Long Term Trend and Its Measurement" *Bulletin of Indonesian Studies* Vol. 24 No. 3 (Dec., 1988) hlm. 87-120.

Sistem pengolahan tanah (*cultivation system*) yang diterapkan di Karesidenan Cirebon dan seluruh Jawa dapat meningkatkan total produksi. Pada

²⁴⁴ *Ibid.* hlm. 15.

²⁴⁵ N.D Retnandari dan Moeljarto. *op.cit.* hlm. 15.

²⁴⁶ James J. Spillane, *Komoditi Kopi: Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 43.

tahun 1830-1834 dan 1860-1864 total produksi rata-rata tahunan meningkat dari 26.600 sampai 79.600 ton, yang kebanyakan merupakan pajak wajib yang diserahkan kepada Belanda.²⁴⁷

Selama periode 1832-1867 *Cultuurstelsel* berhasil mendatangkan keuntungan sebesar 823 juta gulden dan pada periode 1867-1877 sebesar 287 juta gulden.²⁴⁸ Pada periode 1831-1877, negeri Belanda memperoleh surplus ekonomi sebesar 832 juta gulden.²⁴⁹ Menurut taksiran kasar Pieter Creutzberg dan *JTM. Van Laanen*, dalam periode 1830-1850, jumlah rata-rata kiriman saldo plus tiap tahun berkisar antara 3-4 juta gulden, sekitar 7-8 juta gulden dalam periode 1850-1860 dan sekitar 13 juta gulden dalam periode 1860-1867. Data selengkapnya ada dalam tabel di bawah ini:

Penerimaan Pemerintah dan Sumbangan kepada Kas Negara Negeri Belanda 1817-1877 Rata-Rata Setahun dalam Jutaan Gulden

Periode	Jumlah Penerimaan	Sumbangan	Saldo
1817-1826	(20,9)	0,7	-
1831-1840	45,1	9,3	5,4
1841-1850	70,5	14,1	10,7
1851-1860	97,3	24,4	29,5
1861-1866	118,6	32,4	30,9
1867-1877	146,7	13,9	16,0

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M Van Laanen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 182.

Dengan keuntungan sebesar 92,5 *Cultuurstelsel* berhasil membawa keberhasilan bagi pemerintah Hindia Belanda. *Cultuurstelsel* memiliki andil mendanai kebangkitan industri Belanda, sekaligus membiayai kebangkitan

²⁴⁷ Robert Mcstocker, "The Indonesian Coffee industry" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Vol. 23 No. 1 (April, 1987), hlm. 41. Dalam James J. Spillane. *op.cit.* hlm. 42.

²⁴⁸ Rikardo Simarmata, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 44.

²⁴⁹ *Idem.*

kekuatan modal kelas pengusaha swasta. Pernyataan ini diperkuat dengan tulisan

Geertz:

Cultuurstelsel telah menyebabkan kepengusahaan swasta, yang pada mulanya menghadapi rintangan kekurangan modal, sedikit demi sedikit masih lebih mungkin berjalan. Sejauh yang mengenai persediaan modal, usaha swasta di negeri Belanda memainkan peranan yang jauh kurang dari besarnya dalam penunjang pengganti-pengganti *Cultuurstelsel*.²⁵⁰

Cultuurstelsel tidak hanya meningkatkan ekonomi Belanda, sistem ini juga mampu membangkitkan ekonomi Hindia Belanda. Pada periode 1830-1850, sistem ini mampu menyeimbangkan anggaran keuangan pemerintah Hindia Belanda dan melunasi warisan hutang pemerintah sebelumnya. Menginjak periode 1830-1850 peran sistem ini ditinggikan, yakni menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda dengan semakin mengoptimalkan industri perkebunan.²⁵¹ Pembangunan sektor industri perkebunan memancing pertumbuhan sektor transportasi, perdagangan, dan industri manufaktur serta industri perbankan.²⁵²

2. Produksi ekspor kopi Hindia Belanda

Produksi Ekspor Pemerintah dan Swasta 1865-1884

Tahun	Produksi ekspor pemerintah sebagai % nilai total	Produksi ekspor swasta sebagai % nilai total	
		Perusahaan perkebunan	Pribumi
1865	57	38	2
1866	56	38	3
1867	53	41	2
1868	49	45	3
1869	53	42	2
1870	52	43	2

²⁵⁰ Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologis di Indonesia* (Jakarta: Bharatara KA, 1976, hlm. 72, dalam Rikardo Simarta, *op.cit.*, hlm. 47.

²⁵¹ *Ibid.* hlm. 64.

²⁵² *Ibid.* hlm. 65.

Tahun	Produksi ekspor pemerintah sebagai % nilai total	Produksi ekspor swasta sebagai % nilai total	
		Perusahaan perkebunan	Pribumi
1871	45	47	3
1872	23	70	2
1873	19	72	3
1874	23	70	3
1884	13	79	7

Sumber: Cowan, 1961, hlm. 76 dalam Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1991), hlm. 85.

Tabel di atas menunjukkan perbandingan produksi ekspor pemerintah pada tahun 1865 yang mencapai 57% dari nilai total ekspor Hindia Belanda, sedangkan ekspor swasta hanya mencapai 38%. Komposisi tersebut enam tahun kemudian berubah menjadi 45% ekspor pemerintah dan 47% ekspor swasta.²⁵³

Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan petani sangat mempengaruhi laju pertumbuhan produksi. Dengan adanya interaksi yang baik antara pemerintah dengan penduduk pribumi melalui para penguasa pribumi, priyayi maupun bangsawan dapat meningkatkan hasil perkebunan. Produksi tanaman ekspor di wilayah Hindia Belanda terutama di daerah Jawa tidak dapat dilepaskan dari peranan petani. Petani berpengaruh dalam peningkatan hasil perkebunan kopi maupun perkebunan milik pemerintah lainnya.

²⁵³ Rikardo Simarmata, *op.cit.* hlm. 67.

Produksi Tanaman Ekspor Terpenting 1823-1860 dalam Metrik Ton

Tahun	Kopi	Gula	Tembakau	Teh
1823	20.000	X	-	-
1824	17.000	X	-	-
1825	20.000	X	-	-
1826	25.000	X	-	-
1827	28.000	2.150	-	-
1828	29.000	4.440	-	-
1829	20.000	X	-	-
1830	22.000	X	-	-
1831	24.000	6.700	-	-
1832	25.000	7.600	-	-
1833	28.000	X	-	-
1834	34.000	X	-	-
1835	29.000	X	20	16
1836	44.000	X	2.100	x
1837	43.000	X	2.200	33
1838	40.000	X	2.500	97
1839	64.000	X	3.643	127
1840	54.000	58.000	390	88
1841	65.000	56.000	530	103
1842	71.000	64.000	700	161
1843	76.000	66.000	810	205
1844	69.000	74.000	1.500	321
1845	51.000	78.000	1.850	402
1846	65.000	80.000	1.590	459
1847	57.000	80.000	1.890	451
1848	62.000	88.000	450	465
1849	38.000	86.000	700	475
1850	74.000	102.000	1.000	410
1851	85.000	100.000	1.300	480
1852	71.000	100.000	1.600	520
1853	59.000	106.000	2.400	650
1854	86.000	104.000	2.000	770
1855	91.000	102.000	2.100	730
1856	66.000	112.000	3.000	930
1857	80.000	122.000	4.000	860
1858	74.000	126.000	5.000	1.020
1859	65.000	122.000	5.000	1.020
1860	83.000	130.000	6.000	1.030

Sumber: Creutzberg dan Laaneen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 146.

Produksi Tanaman Ekspor Terpenting 1861-1894 dalam Metrik Ton

Tahun	Kopi	Gula	Tembakau	The	Kina
1861	74.000	134.000	7.000	1.020	-
1862	61.000	132.000	8.500	950	-
1863	90.000	134.000	8.000	1.250	-
1864	50.000	130.000	8.000	1.200	-
1865	81.000	142.000	8.000	1.300	-
1866	90.000	150.000	9.000	1.600	-
1867	81.000	154.000	9.500	1.680	-
1868	59.000	156.000	7.500	1.590	-
1869	85.000	162.000	8.500	1.310	-
1870	90.000	172.000	8.000	1.470	4
1871	52.000	174.000	12.500	1.540	8
1872	84.000	196.000	15.000	1.580	18
1873	73.000	200.000	20.500	1.720	25
1874	93.000	204.000	14.000	1.990	33
1875	58.000	203.000	13.000	1.990	45
1876	109.000	230.000	14.000	2.780	47
1877	89.000	249.000	14.500	2.420	52
1878	78.000	229.000	14.000	2.900	79
1879	113.000	238.000	8.500	2.650	76
1880	64.000	221.000	14.000	2.380	150
1881	97.000	288.000	47.000	2.270	110
1882	101.000	297.000	34.000	2.760	170
1883	111.000	330.000	34.000	2.350	390
1884	99.000	401.000	45.000	2.630	530
1885	66.000	387.000	44.000	2.650	550
1886	88.000	391.000	55.000	3.510	1.040
1887	43.000	409.000	52.000	3.290	1.250
1888	71.000	388.000	74.000	3.380	1.750
1889	78.000	367.000	57.000	3.730	2.350
1890	28.000	423.000	55.000	3.480	2.750
1891	56.000	435.000	64.000	3.630	3.150
1892	82.000	455.000	62.000	4.330	3.150
1893	24.000	502.000	64.000	4.130	3.200
1894	63.000	531.000	69.000	4.100	3.250

Sumber: Creutzberg dan Laaneen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 147.

Produksi Tanaman Ekspor Kopi 1831-1870 dalam Metrik Ton

Tahun	Kopi
1850	74.000
1851	85.000
1852	71.000
1853	59.000
1854	86.000
1855	91.000
1856	66.000
1857	80.000
1858	74.000
1859	65.000
1860	83.000
1861	74.000
1862	61.000
1863	90.000
1864	50.000
1865	81.000
1866	90.000
1867	81.000
1868	59.000
1869	85.000
1870	90.000

Sumber: Creutzberg dan Laaneen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 146-147.

Tabel di atas, menunjukkan produksi tanaman penting untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Salah satunya adalah kopi yang merupakan tanaman ekspor terpenting pada tahun 1850-1870. Nilai metrik untuk kopi pada tahun 1850 mencapai 74.000 ton; pada tahun 1851 nilai untuk kopi naik 11.000 menjadi 85.000 ton; pada tahun 1852 produksi kopi menurun 14.000 menjadi 71.000 ton; pada tahun 1853 produksi kopi kembali menurun sebesar 12.000 menjadi 59.000 ton; akan tetapi pada tahun 1854 produksi kopi kembali meningkat sebesar 27.000 menjadi 86.000 ton; pada tahun 1855 produksi kopi kembali naik 5000 menjadi 91.000 ton; pada tahun 1856 produksi kopi kembali turun 25.000 menjadi 66.000 ton; pada tahun 1857 produksi kopi naik hingga 14.000 menjadi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

80.000 ton; pada tahun 1858 produksi kopi menurun 6000 menjadi 74.000 ton; pada tahun 1859 produksi kopi kembali menurun 9.000 menjadi 65.000 ton; pada tahun 1860 terjadi peningkatan dalam produksi kopi 18.000 menjadi 83.000 ton; pada tahun 1861 produksi kopi menurun 9000 menjadi 74.000 ton, pada tahun 1862 produksi kopi kembali menurun 13.000 menjadi 61.000 ton, pada tahun 1863 produksi kopi kembali naik 29000 menjadi 90.000 ton akan tetapi pada tahun 1864 produksi kopi turun 40000 menjadi 50.000 ton, pada tahun 1865 produksi kopi kembali naik 31.000 menjadi 81.000 ton, pada tahun 1866 produksi kopi kembali meningkat sebesar 9000 menjadi 90.000 ton, pada tahun 1867 produksi kopi menurun 9000 menjadi 81.000 ton, pada tahun 1868 kopi kembali turun 22.000 menjadi 59.000 ton, pada tahun 1869 nilai produksi kopi kembali naik sebesar 26.000 menjadi 85.000 ton, dan pada tahun 1870 nilai produksi kembali menunjukkan kenaikan sebesar 5.000 menjadi 90.000 ton. Pada periode 1850-1870 semakin besar gelombang kapitalisme industrial di Belanda menjadikan kenaikan volume penanaman modal di negeri jajahan.²⁵⁴

Perdagangan Ekspor 1850-1870

Tahun	Jumlah nilai Ekspor (f.000)	Nilai ekspor ke Nererl and (f.000)	Perincian					
			Kopi		Gula		Indigo	
			Pikul (000)	Nilai (f.000)	Pikul (000)	Nilai (f.000)	Pikul (000)	Nilai (f.000)
1850	57.740	45.223	818	18.720	1.383	17.044	1.256	4.193
1855	78.758	62.642	1.264	32.398	1.662	20.435	926	3.250
1860	99.147	76.808	899	29.825	2.081	31.982	-	3.452
1865	101.375	80.806	807	33.659	2.205	32.398	-	4.229
1870	107.759	82.423	-	44.140	-	32.299	-	3.227

Sumber: Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), Jilid I, hlm. 324.

²⁵⁴ Rikardo Simarmata, *op.cit.* hlm. 87.

Perdagangan Ekspor Kopi 1850-1870

Tahun	Nilai Kopi
1850	18.720
1855	32.398
1860	29.825
1865	33.659
1870	44.140

Sumber: Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), Jilid I, hlm. 324.

Dari tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan dalam perdagangan ekspor untuk hasil budidaya tanaman kopi, gula, dan indigo. Untuk tanaman kopi pada tahun 1850 mencapai nilai 18.720 atau 818 pikul. Pada tahun 1855 perdagangan kopi meningkat menjadi 32.398 atau 1.264 pikul yang menandakan bahwa kopi Hindia Belanda laku di pasaran Eropa. Sedangkan pada tahun 1860 perdagangan ekspor kopi menurun menjadi 29.825 atau 899 pikul. Akan tetapi pada tahun 1865 perdagangan ekspor kopi kembali meningkat menjadi 33.659 atau 807 pikul. Dan pada tahun 1870 perdagangan ekspor kopi kembali meningkat menjadi 44.140.

Ikatan feodal sendiri mempengaruhi besar kecilnya laju produksi pada masa *Cultuurstelsel*. Ikatan tradisional ini menjadi perantara yang paling menguntungkan bagi pemerintah Hindia Belanda dimana pemerintah menggantungkan urusan tenaga kerja dan tanah kepada penguasa-penguasa pribumi. Dalam laju pertumbuhan produksi setiap tahun penduduk diwajibkan menyerahkan hasil pertanian sejumlah tertentu pada pemerintah, dan menyumbangkan tenaganya dalam pekerjaan pembangunan serta memelihara fasilitas umum.²⁵⁵ Dengan adanya pengawasan dari pejabat pemerintahan dan

²⁵⁵ P. Nas, Martien de Vletter, *Masa Lalu dan Masa Kini: Arsitektur di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 129.

pejabat pribumi maka laju pertumbuhan produksi akan maksimal. Pengawasan dari pejabat pribumi secara langsung membawa hasil yang menguntungkan bagi pemerintah.

C. Interaksi dalam Membangun dan Menjaga Perkebunan Kopi

Dalam membangun dan menjaga perkebunan kopi tetap memanfaatkan organisasi desa. Penanaman kopi di Cirebon berlangsung sejak adanya kerja paksa di masa kumpeni dan kemudian diperluas oleh Deandels. Raffles pada masa pemerintahannya memberikan kebebasan kepada para petani untuk penanaman kopi, akan tetapi hasilnya mengalami kemunduran.²⁵⁶ Pada masa itu banyak pohon kopi yang ditebang karena penduduk merasa tidak diuntungkan dalam kegiatan penanaman kopi.²⁵⁷ Kemudian komisaris-komisaris jenderal Belanda menyewakan kebun-kebun kopi kepada kepala-kepala desa dengan kewajiban memelihara kebun dengan sebaik-baiknya. Pemerintah Belanda bermaksud untuk mengubah penanaman paksa menjadi penanaman sukarela agar penduduk tertarik menanam kopi.

Pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari *stelsel* tanah memberikan pelajaran bahwa kekuasaan feodal masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jawa dan harus dihormati.²⁵⁸ Van den Bosch sangat memperhatikan kehidupan masyarakat desa di Jawa terutama dalam kekuasaan feodal. Penerapan politik *Cultuurstelsel* disesuaikan dengan adat pribumi yang ada di

²⁵⁶ Saiful Bachri, *Sejarah Perekonomian Cetakan I*, Surakarta: Surakarta LPP dan UNS Press, 2005. Hlm. 104.

²⁵⁷ *Idem.*

²⁵⁸ *Ibid.* hlm. 115.

setiap daerah termasuk Karesidenan Cirebon. Pemerintah kolonial mengembalikan kembali kedudukan kaum bangsawan Jawa pada posisi lama.²⁵⁹ Kedudukan kaum bangsawan Jawa dimanfaatkan untuk menggerakkan rakyat menjalankan pekerjaan perkebunan. Pemerintah kolonial bergantung pada kepala-kepala pribumi dan bawahan mereka dalam hal membangun dan memelihara perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda termasuk perkebunan kopi.

Sistem penanaman wajib atas kopi berjalan dengan baik. Apabila pemerintah kolonial akan memperluas perkebunan-perkebunan besar memerlukan dua macam pegawai yang mampu bekerja sama secara baik.

Kategori pertama adalah pegawai pribumi yang bertanggung jawab untuk pengawasan, artinya mampu menegakkan kepatuhan dalam perkebunan-perkebunan negara. Kategori kedua adalah para pegawai Belanda yang mengontrol seluruh operasi *Cultuurstelsel*.²⁶⁰

Dengan keadaan seperti itu maka Gubernur Jenderal menggunakan ikatan tradisonal untuk membangun dan menjaga perkebunan kopi. Interaksi yang terjadi di dalam perkebunan kopi sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh. Peran petani sendiri sangat penting bagi perkebunan baik perkebunan kopi dan perkebunan lainnya. Petani dan anggota keluarganya menyediakan tenaganya²⁶¹ yang digunakan dalam perkebunan.

Interaksi yang terjalin antara pemerintah Hindia Belanda dan petani masih dihubungkan oleh organisasi-organisasi desa yang ada. Melalui organisasi desa pemerintah Hindia Belanda dapat memperoleh tenaga kerja untuk

²⁵⁹ Suwarno, *Latar Belakang dan Fase Awal Pertumbuhan Kesadaran Nasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). hlm. 9.

²⁶⁰ *Idem*.

²⁶¹ Tri Haryanto, dkk, *Ekonomi Pertanian*, Surabaya: Airlangga University Press, 2009, hlm. 25.

membangun dan memelihara perkebunan. Organisasi desa memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga kerja atau petani untuk membangun dan memelihara perkebunan kopi. Petani di setiap desa memiliki ikatan yang kuat dengan organisasi desa sehingga para petani tunduk dan taat kepada organisasi desa yang ada. Jadi dapat dikatakan bahwa petani di setiap desa untuk membangun dan memelihara perkebunan kopi tidak dilakukan dengan sukarela melainkan kewajiban tradisional.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

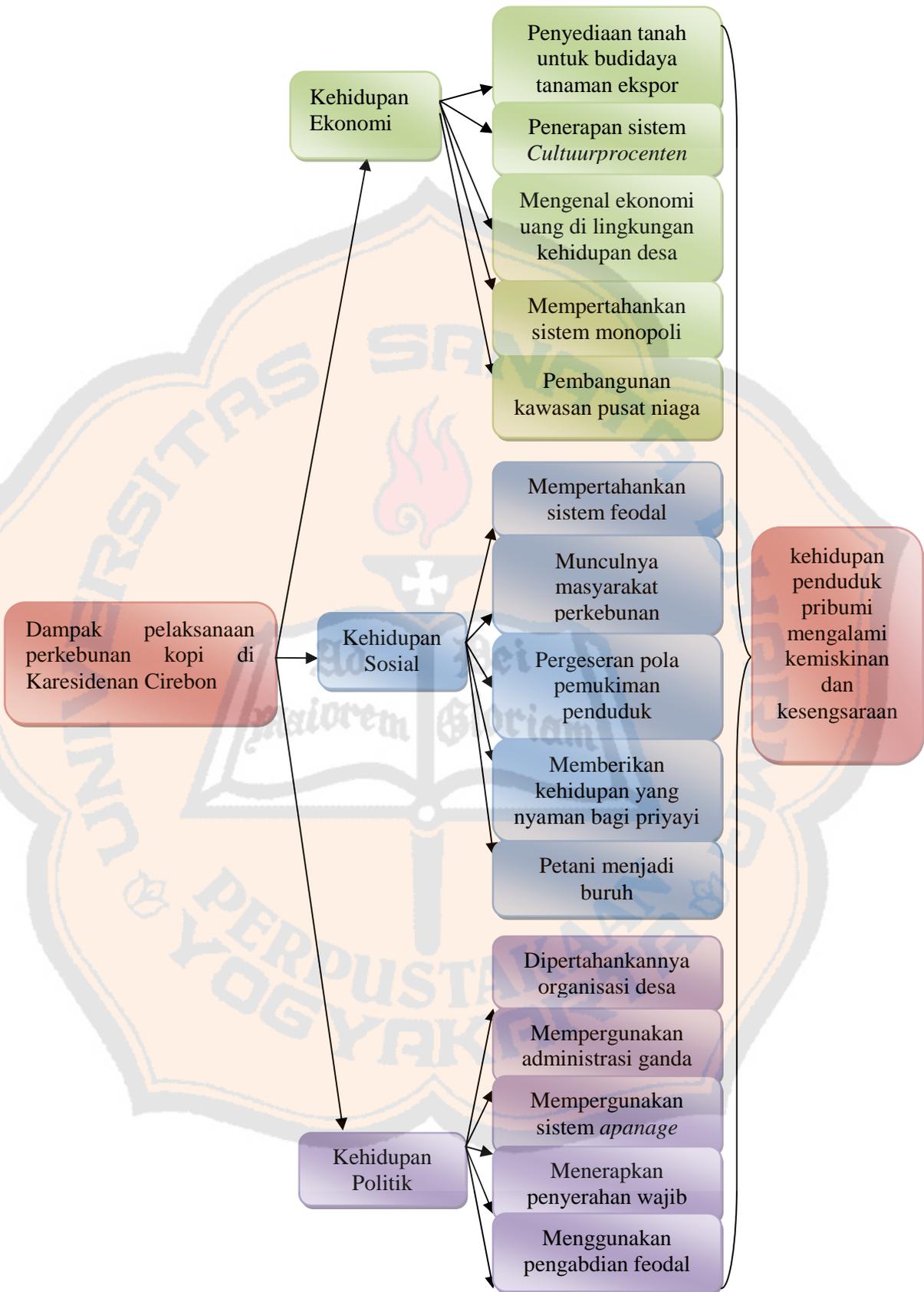
BAB IV

DAMPAK PELAKSANAAN PERKEBUNAN KOPI DI KARESIDENAN

CIREBON

Pelaksanaan sebuah sistem dalam masyarakat tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar dalam berbagai bidang. Seperti kebijakan *Cultuurstelsel* pada tahun 1830-1870 yang berkaitan dengan perkebunan wilayah Hindia Belanda. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada masa *Cultuurstelsel* telah mempengaruhi unsur-unsur pokok dalam masyarakat Jawa. Unsur-unsur pokok dalam kehidupan yang dipengaruhi kebijakan Hindia Belanda tentu saja berdampak positif bagi pemerintah Hindia Belanda, tetapi sebaliknya bagi penduduk pribumi berdampak negatif. Dampak yang ditimbulkan dalam sistem tersebut tentu saja mempengaruhi kehidupan ekonomi, sosial maupun politik.



A. Dampak Ekonomi

Dalam bidang ekonomi *Cultuurstelsel* memberikan dampak yang sangat besar bagi wilayah Hindia Belanda, yaitu membuat rakyat Hindia Belanda sangat menderita dan sangat sengsara. Dalam melakukan kebijakannya, pemerintah Hindia Belanda melakukan strategi-strategi yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi di Hindia Belanda. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan yang dijalankan terasa sampai ke tingkat pedesaan di Jawa termasuk Karesidenan Cirebon. Strategi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda antara lain:

1. Penyediaan tanah untuk budidaya tanaman ekspor

Strategi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang pertama yaitu membuat ketentuan yang mengatur tentang penyediaan tanah oleh penduduk pribumi. Pemerintah memberikan Lembaran Negara (*Staatsblad*) yang berisi tentang ketentuan penyediaan tanah yang dipergunakan untuk menanam tanaman wajib ekspor. Dalam ketentuan tersebut tertulis

Tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.²⁶²

Ketentuan tersebut bertujuan agar rakyat percaya kepada pemerintahan. Dengan adanya Lembaran Negara (*Staatsblad*) pemerintah hanya mengambil seperlima dari tanah pertanian milik penduduk desa. Akan tetapi pada akhirnya strategi yang dijalankan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat. Banyak penyimpangan-penyimpangan yang

²⁶²SartonoKartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media Yogyakarta, 1991), hlm. 56.

terjadi pada saat pelaksanaan budidaya tanaman ekspor tersebut. Salah satu penyimpangan yang terjadi di lapangan adalah dalam penyediaan tanah untuk budidaya tanaman ekspor. Dalam ketentuan yang pertama dan kedua dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no 22 disebutkan bahwa:

Melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa serta tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk desa.²⁶³

Lembaran Negara menyebutkan tanah yang diharuskan untuk ditanami tanaman wajib tidak boleh melebihi 1/5, akan tetapi dalam pelaksanaan budidaya tanaman ekspor melebihi 1/5 bagian.²⁶⁴ Tanah yang digunakan untuk *Cultuurstelsel* pada prakteknya sendiri 1/3 atau bahkan 1/2 dari tanah desa. Tanah yang dipilih oleh pemerintah Hindia Belanda merupakan tanah yang subur sehingga tidak menguntungkan bagi para petani. Dalam *Cultuurstelsel* juga tanah yang digunakan dalam penanaman wajib tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Penyediaan tanah yang menurut ketentuan adalah dengan “persetujuan” dalam praktiknya adalah dengan “paksaan”.²⁶⁵ Petani dirugikan akibat tidak memiliki kesempatan untuk menanam tanaman pangan karena sepanjang tahun tanah hanya digunakan untuk menanam tanaman ekspor. Jika petani melalaikan pekerjaannya, maka

²⁶³ *Ibid.* hlm. 55.

²⁶⁴ *Ibid.* hlm. 63.

²⁶⁵ Mubyarto, *Tanah dan tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 34.

sinder-sinder Belanda dan mandor-mandor sudah siap sedia untuk memberi hukuman pada para petani dengan pukulan rotan.²⁶⁶

Pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan pajak tanah kepada para petani. Tanah yang terkena kebijakan *Cultuurstelsel* tetap terkena pajak tanah. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ke empat dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no 22:

Bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.²⁶⁷

Ketentuan menyatakan bahwa tanah yang digunakan tidak akan dipungut pajak tanah.²⁶⁸ Akan tetapi, Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya mengambil dari tanah untuk membudidayakan tanaman ekspornya tetapi pemerintah Hindia Belanda juga masih menetapkan pajak tanah. Perjanjian semula tentang tanah sendiri sebenarnya tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor tidak dipungut biaya pajak sebab menanam tanaman ekspor sebagai ganti untuk membayar pajak tanah.

Pada masa *Cultuurstelsel* sistem pajak tanah yang diterapkan sama dengan yang dilakukan oleh Raffles, berpangkal pada peraturan tentang pemungutan hasil penanaman baik di lahan sawah maupun tegalan. Penetapan pajak tanah tersebut didasarkan pada klasifikasi kesuburan tanah

²⁶⁶ HM. Nasruddin Ansyoriy, *Bangsa Gagal: Mencari Identitas Kebangsaan*, (Yogyakarta:LKiS, 2008), hlm. 99.

²⁶⁷ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 56.

²⁶⁸ Sistem pajak tanah, diperkenalkan oleh Raffles pada mas Inggris berkuasa di Nusantara, pajak tanah merupakan bagian integral dari gagasan pembaharuan tentang sistem sewa tanah (*landelijk stelsel*) di tanah jajahan. Gagasan ini muncul dari upaya memperbaiki sistem paksa dari kumpeni (VOC) yang dianggap memberatkan dan merugikan penduduk. Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta: Penerbit Aditya Media Yogyakarta, 1991), hlm. 43.

masing-masing,²⁶⁹ dan terdiri atas tiga klasifikasi, yaitu terbaik (I), sedang (II) dan kurang (III). Rincian penetapan pajak itu sebagai berikut:²⁷⁰

A. Pajak Tanah Sawah:

Golongan I	1/2	hasil panen
Golongan II	2/5	hasil panen
Golongan III	1/3	hasil panen

B. Pajak Tanah Tegal:

Golongan I	2/4	hasil panen
Golongan II	1/3	hasil panen
Golongan III	1/4	hasil panen

Pajak pada masa *Cultuurstelsel* dibayarkan dalam bentuk hasil budidaya tanaman ekspor yang ditanam oleh para petani. Pajak yang harus dibayar oleh petani kopi di Karesidenan Cirebon pada masa *Cultuurstelsel* yaitu sepikul kopi (65kg) dibayar 25 gulden akan tetapi masih harus dikurangi 10 gulden untuk pajak tanah dan 3 gulden untuk biaya administratif.²⁷¹ Berbeda dengan pemerintahan Raffles, pemerintah kolonial Belanda mempertahankan kedudukan bupati sebagai penguasa feodal (tradisional).

Dapat disimpulkan dampak yang ditimbulkan dengan dijalankan strategi ini sangat menguntungkan bagi pihak pemerintah Hindia Belanda yang dapat melaksanakan budidaya tanaman ekspor di lahan pertanian milik penduduk desa. Pemerintah dengan leluasa menggunakan tanah milik penduduk desa melebihi dari ketentuan yang ada. Penduduk desa juga mengalami dampak yang ditimbulkan dari strategi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kerugian yang dialami oleh penduduk sangat

²⁶⁹SartonoKartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit*, hlm. 44.

²⁷⁰ *Idem*.

²⁷¹Parakitri Tahi Simbolon, *Menjadi Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006) hlm. 130.

besar sehingga beban berat harus ditanggung, dan kehidupan ekonomi penduduk desa menjadi sangat bergantung pada pemerintah Hindia Belanda.

2. Memberlakukan sistem *Cultuurprocenten* atau pemberian premi

Strategi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu memberlakukan sistem *Cultuurprocenten*. *Cultuurprocenten* merupakan pemberian premi kepada petugas apabila hasil yang dicapai melebihi target produksi yang telah ditentukan pada setiap desa.²⁷² Pemberian premi ini dilakukan oleh pemerintah supaya dalam menjalankan kebijakan dapat berjalan lancar, penduduk tetap taat dan setia, untuk mendapatkan kinerja yang baik dari para pegawai, dan supaya pegawai-pegawai pemerintahan dapat menyerahkan hasil tanaman ekspor yang telah ditentukan.

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pegawai pengawas *Cultuurstelsel* akan mendapat persenan atau hadiah, bila dapat menyerahkan hasil tanaman lebih dari yang ditentukan.²⁷³ Makin banyak setoran, makin banyak hadiahnya.²⁷⁴ Pemberian premi yang dimaksudkan agar para petugas itu bekerja dengan baik ternyata telah disalahgunakan demi mengejar premi yang sebanyak-banyaknya.²⁷⁵ Para petugas pemerintah yang mendapatkan *Cultuurprocenten* tidak hanya berasal dari kalangan pejabat Belanda akan tetapi juga petugas pribumi. Intensif yang diberikan kepada petugas berupa tanda jasa dan komisi agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Dengan adanya sistem *Cultuurprocenten* mengakibatkan para petugas menilai suatu

²⁷²HM. Nasruddin Ansyoriy, *op.cit.* hlm. 99.

²⁷³Tugiono, *Pengetahuan Sosial Sejarah SMP kelas 2*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 9.

²⁷⁴*Idem.*

²⁷⁵HM. Nasruddin Ansyoriy, *op.cit.* hlm. 99.

daerah dan menentukan besar pajak berupa komoditi yang harus disetor dengan sewenang-wenang.²⁷⁶ Mereka memaksa rakyat pedesaan agar menyerahkan tanahnya maupun hasil tanamannya lebih dari ketentuan.²⁷⁷ Situasi demikian memojokkan petani, karena para petani hanya digunakan sebagai alat kekuasaan dari kepala desa ataupun pejabat di atasnya untuk mendapatkan premi dari pemerintah.

Penyimpangan tidak hanya terjadi pada masalah tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor akan tetapi juga untuk upah para petani. Bagian upah yang seharusnya diterima oleh penduduk, seringkali tidak sampai kepada penduduk. Penyebab penyimpangan tersebut antara lain karena adanya pemberian *Cultuurprocenten*. Karena Belanda sangat kikir sifatnya, uang gaji hanya sedikit jumlahnya sehingga tidak dapat memberi nafkah yang cukup.²⁷⁸

Melalui strategi pemberian premi, pemerintah memperoleh hasil yang diinginkan yaitu memperoleh hasil dari tanaman ekspor sesuai dengan ketentuan bahkan jika pejabat-pejabat pemerintahan maupun pejabat pribumi hanya mengejar premi. Selain pemerintah yang mendapatkan keuntungan pejabat pemerintahan maupun pejabat pribumi juga mendapatkan keuntungan dari adanya pemberian premi. Akan tetapi dipihak lain dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem premi yang dijalankan yaitu membuat penduduk pribumi menjadi miskin. Penduduk pribumi terus menerus menjadi sapi perahan bagi pemerintah Hindia Belanda dan para pemimpin mereka.

²⁷⁶ *Idem*.

²⁷⁷ Tugiono dkk, *op.cit.* hlm. 9.

²⁷⁸ HM. Nasruddin Ansoryiy, *op.cit.* hlm. 99.

3. Pengenalan ekonomi uang ke dalam lingkungan kehidupan desa

Strategi ekonomi yang ketiga yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu dengan mengenalkan ekonomi uang ke dalam lingkungan desa. Dengan memperkenalkan uang dalam lingkungan desa maka pemerintah Hindia Belanda dapat menjalankan *Cultuurstelsel* dengan baik. Pemerintah Hindia Belanda menggaji para pegawai pemerintahan termasuk pula pegawai pribumi dengan uang. Pengenalan ekonomi uang terbatas pada pegawai-pegawai pemerintahan dan para pekerja perkebunan.

Sistem upah yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda ini juga menandakan dikenalkan sistem ekonomi uang di wilayah Hindia Belanda. Pelaksanaan *Cultuurstelsel* besar artinya dalam mengenalkan ekonomi uang ke dalam lingkungan kehidupan pedesaan agraris.²⁷⁹ Kehidupan perekonomian desa yang semula masih tradisional, secara berangsur-angsur mulai mengenal ekonomi uang.²⁸⁰ Akan tetapi yang menggunakan uang sebagai alat transaksi sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda sampai tahun 1870.²⁸¹ Pada saat *Cultuurstelsel* uang perak merupakan satu-satunya alat perdagangan.

²⁷⁹ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 68.

²⁸⁰ *Idem.*

²⁸¹ Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Leenen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 295.

Cadangan perak dan uang kertas di Javasche Bank, 1829-1840, dalam jutaan gulden Hindia Belanda tiap 31 Maret

Tahun	Cadangan Perak	Uang kertas yang dikeluarkan	Persentase perak tiap helai uang kertas
1829	2,087	2,167	96,3
1830	1,171	2,972	39,4
1831	1,609	3,076	52,3
1832	1,807	4,016	45,0
1833	0,897	4,212	21,3
1834	1,180	4,893	24,1
1835	1,725	5,181	33,3
1836	2,675	5,995	44,6
1837	0,525	6,013	8,7
1838	1,854	7,244	25,6
1839	1,203	7,477	16,1
1840	0,754	7,235	10,4

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Leenen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 301.

Pada tabel di atas menjelaskan perbandingan cadangan perak pada *Javasche Bank* terhadap uang kertas yang dikeluarkan dari tahun 1829-1840. Selama tahun 1830-an, istilah gulden Hindia Belanda mewakili 4 bentuk yaitu *gulden zilver* (gulden perak) yang dapat dibayarkan dalam koin perak (atau emas) sesuai dengan harga yang ditetapkan secara sah, atau dalam bentuk uang kertas bank.²⁸² Bentuk kedua adalah *gulden koper* (gulden tembaga) yang dibayarkan dalam bentuk koin tembaga.

Pada tahun 1846 pemerintah melakukan usaha pembaharuan sistem keuangan dengan membuat koin tembaga yang dapat dikonversi menjadi surat berharga dari pemerintah yang dikenal dengan nama *recepis*.²⁸³ Usaha pembaharuan sistem keuangan dilakukan karena adanya kekacauan sistem

²⁸² *Ibid.* hlm. 301.

²⁸³ *Ibid.* hlm. 304.

keuangan yang mempengaruhi perkembangan nilai tukar.²⁸⁴ Penjelasan tentang pembaharuan sistem keuangan dijelaskan di dalam tabel di bawah ini:

Peredaran *recepis* dan pembaharuan koin tahun 1846-1861 dalam jutaan gulden Hindia Belanda tiap 31 Desember

Tahun	<i>Recepis</i>			koin		
	Jumlah yang dikeluarkan	Pada kantor kas negara	Pada <i>Javasche bank</i>	Dalam peredaran	Pada kantor kas negara	Dalam peredaran
1846	12,60	4,40	(0,67)	(7,53)	16,97	22,86
1847	15,00	5,09	(1,26)	(8,65)	20,45	19,38
1848	15,00	4,14	(2,26)	(8,60)	21,11	18,72
1849	17,40	3,41	(3,18)	(10,81)	22,98	16,85
1850	21,00	6,80	(1,71)	(12,50)	26,14	13,69
1851	23,30	5,91	(1,10)	(16,30)	28,60	11,21
1852	24,30	6,24	(1,89)	(16,16)	28,16	11,67
1853	24,30	6,07	(3,07)	(15,16)	28,79	11,04
1854	26,60	6,48	(2,52)	(17,60)	31,55	8,28
1855	26,60	5,24	(1,37)	(20,10)	30,51	9,32
1856	26,60	7,87	(1,18)	(17,50)	30,01	9,75
1857	24,59	6,95	(0,64)	(17,00)	30,34	9,49
1858	17,08	2,83	(0,26)	(14,00)	32,03	7,80
1859	12,93	2,28	(0,64)	(10,00)	32,50	7,33
1860	6,99	1,92	(0,80)	(4,27)	32,94	7,33
1861	0,29	-	-	(0,29)	32,94	7,33

Sumber: Pieter Creutzberg dan J.T.M. van Leenen, *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 305.

Dengan mengenalkan ekonomi uang kepada pejabat pribumi setidaknya pemerintah Hindia Belanda juga dapat memperoleh hasil yang diinginkan. Kehidupan mewah para pejabat pribumi menyebabkan kebutuhan uang yang lebih. Akan tetapi di sisi lain penduduk pribumi sendiri mendapatkan beban yang cukup berat dengan keadaan tersebut. Penduduk dipaksa menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda.

²⁸⁴ *Idem.*

4. Mempertahankan sistem monopoli²⁸⁵

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda masih sama dengan masa sebelumnya (VOC), pemerintah menerapkan sistem monopoli untuk barang-barang yang dihasilkan oleh tanah jajahan. Pada masa *Cultuurstelsel* diseluruh wilayah Hindia Belanda termasuk tanah Jawa diberlakukan sistem monopoli. Sistem ini tetap dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda karena dengan sistem ini pemerintah Hindia Belanda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari wilayah Hindia Belanda.

Karesidenan yang ditunjuk dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* menjadi tempat yang sangat strategis untuk melakukan penjajahan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan kata lain, daerah jajahan berfungsi sebagai daerah eksploitasi bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda.²⁸⁶ Dalam sistem *Cultuurstelsel* hak monopoli pemerintah meliputi memegang kekuasaan ekonomi yang dominan, pengerahan tanah, tenaga rakyat, dan memproduksi berbagai komoditi.²⁸⁷

Penerapan monopoli oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan dari penjualan hasil bumi yang laku di Eropa.²⁸⁸ Tanaman-tanaman yang ditanam ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda dan sebagian dari hasil panen diserahkan kepada

²⁸⁵ Istilah monopoli berasal dari kata mono; satu atau tunggal dan polein; menjual. Jadi monopoli dapat diartikan hanya ada satu pembeli untuk barang tertentu. Monopoli merupakan keadaan pasar dimana hanya ada satu produsen atau penjual yang menguasai seluruh (atau sebagian besar) suplai satu barang/jasa tertentu, barang/jasa yang dijual tidak ada pengganti yang baik, pasaran atau bidang usaha yang bersangkutan tidak dapat dimasuki pihak lain. T. Gilarso, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003), hlm.177.

²⁸⁶ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 79.

²⁸⁷ *Idem.*

²⁸⁸ A. Kardiyat Wiharyanto, *op.cit.* hlm. 23.

Belanda.²⁸⁹ Pemerintah Hindia Belanda tetap menerapkan sistem monopoli dalam hal penguasaan atas produksi dan pemasaran barang terutama tanaman ekspor. Pemerintah sebagai produsen menentukan sendiri harga dan pengontrol harga pasar.²⁹⁰

Sistem monopoli yang diterapkan oleh pemerintah pihak yang paling dirugikan paling besar adalah petani pribumi. Petani tidak mendapatkan keuntungan karena harus menyerahkan hasil bumi berupa tanaman ekspor kepada pemerintah dengan harga murah. Dengan kata lain sistem monopoli melemahkan perdagangan dan tenaga kerja rakyat.²⁹¹ Sedangkan pihak yang paling diuntungkan adalah pihak pemerintah Hindia Belanda sebab mereka membeli kopi dari petani dengan harga yang rendah dan menjual di pasaran Eropa dengan harga yang sangat tinggi.

5. Munculnya kawasan pusat niaga di Karesidenan Cirebon

Pada masa pemerintahan VOC maupun pemerintahan Hindia Belanda, terjadi perubahan pusat niaga di Karesidenan Cirebon. Seperti yang telah diberitakan Tom Pires, jika pada masa Kesultanan Cirebon masih berkuasa pusat kegiatan ekonomi berada di pasar dalam kawasan kraton, setelah Belanda berhasil merampas kekuasaan politik dan ekonomi maka pusat kegiatan niaga beralih ke pelabuhan, tempat Belanda memusatkan aktivitasnya baik di bidang politik maupun ekonomi.²⁹² Tidak hanya

²⁸⁹ *Idem.*

²⁹⁰ Tri Kurawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Makro*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 217.

²⁹¹ H.M. Nasruddin Anshoriy, *op.cit.*, hlm. 20.

²⁹² Debdibud, *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra: Kumpulan Makalah Diskusi Ilmiah*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai

pemerintah Hindia Belanda akan tetapi pihak swasta juga memusatkan perekonomiannya juga di pelabuhan.²⁹³ Banyak gudang, kantor dagang, serta pabrik didirikan di kawasan pelabuhan. Beberapa contoh dapat disebutkan disini antara lain *Nederlandsch-Indische Escompto Hij, Internationale Crediet en flandelsvereeniging "Rotterdam", N.V. Exploitatie en Handel Haatschappij, Bataafsche Petroleum Maatschappij, Tegelsehe Prauwenver, Internatio Bank, British-American Tobacco, Koninklijke Pakketvaart Haatschappij, Nederlandsch flandelg Mantschappij Sub-Agent, Empacement SCS, Empacement SS.*²⁹⁴ Dan pada akhirnya pertumbuhan kawasan pusat niaga bukan hanya di dalam kawasan pelabuhan saja tetapi juga meluas ke luar kawasan pelabuhan.²⁹⁵ Meskipun begitu perluasan daerah pusat niaga masih tetap memusat dekat dengan kawasan pelabuhan.²⁹⁶ Pelabuhan Cirebon pada mulanya juga berfungsi sebagai pusat pengendalian politik kawasan di sekitarnya dan Belanda mulai membangun kantor-kantor pemerintahan di luar kawasan pelabuhan, baik yang terletak di dekat kawasan pelabuhan maupun yang terletak ke arah Utara kota menjauhi kraton-kraton Cirebon. Jadi pada masa pemerintahan Belanda di Nusantara kawasan pelabuhan menjadi pusat aktivitas ekonomi.²⁹⁷

Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), hlm. 128.

²⁹³ *Idem.*

²⁹⁴ *Ibid.* hlm. 129.

²⁹⁵ *Idem.*

²⁹⁶ *Ibid.* hlm. 128.

²⁹⁷ *Ibid.* hlm. 129.

B. Dampak Sosial

Sama halnya dengan kehidupan ekonomi dalam kehidupan sosial di Karesidenan Cirebon pemerintah memiliki strategi-strategi untuk dapat menguasai kehidupan sosial yang ada di wilayah tersebut. Strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda tentu untuk kepentingan pemerintah sendiri. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam kehidupan sosial masih berhubungan dengan tenaga kerja dan tanah.

Strategi yang dilakukan dalam rangka budidaya tanaman ekspor di wilayah Karesidenan Cirebon juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sosial di wilayah ini. Budidaya tanaman ekspor ini membawa dampak sosial yang luar biasa bagi kehidupan di wilayah pedesaan. Adapun strategi sosial yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan diberlakukannya budidaya tanaman ekspor yaitu:

1. Menggunakan sistem feodal yang ada dalam kehidupan masyarakat desa

Secara sosial budaya, masyarakat Jawa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, *wong gedhe* (orang besar) yang terdiri dari *priyayi* (bangsawan), yang merupakan pejabat pemerintahan. Kelompok kedua, *wong cilik* (orang kecil) terdiri dari rakyat biasa.²⁹⁸ Jumlah penduduk yang melaksanakan *Cultuurstelsel* sangat besar dibandingkan luas tanah yang ditanami.

²⁹⁸ Soetarman Soediman Partonadi, *Komunitas Sadrach dan Akar Kontektualnya: Suatu Ekspresi Kekeristenan Jawa Pada Abad XIX*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2001), hlm. 13.

Sistem feodal masih sangat kenal dalam kehidupan kemasyarakatan desa. Dalam sistem feodal, kaum *priyayi* memerintah di atas tingkatan desa.²⁹⁹ Pada adat istiadat orang Jawa terdapat rasa pengabdian dan kepatuhan kepada atasannya.³⁰⁰ Kerukunan dan kepatuhan penduduk desa merupakan ikatan desa, sedangkan kehidupan ekonomi pada tingkat di atas desa yang memenuhi kebutuhan raja dan bangsawan didasarkan atas pungutan barang dan jasa yang dinamai ikatan feodal.³⁰¹ Ikatan tradisional inilah yang meresap ke seluruh kehidupan ekonomi dan sosial lainnya dari masyarakat Jawa.³⁰² Karena itu, pimpinan produksi bukan terletak di tangan pengusaha melainkan di tangan para kepala atau pemimpin rakyat.

Kaum ningrat atau *priyayi* bergabung dalam sistem pemerintahan Belanda sejak abad ke 18.³⁰³ Pada masa *Cultuurstelsel* ikut membongkar tatanan sosial kaum petani, merenggut tanah mereka dan memaksakan pembudidayaan tanaman untuk hasil ekspor.³⁰⁴ Dengan bergabungnya kaum ningrat atau *priyayi* ke dalam birokrasi pemerintahan Hindia Belanda merugikan kaum petani. Hal ini disebabkan golongan elite desa atau *priyayi* yang dulu menjadi pelindung rakyat pribumi dimanfaatkan sebagai alat untuk melangsungkan segala perintah pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat.³⁰⁵ Elit desa atau *priyayi* menjadi setia terhadap pemerintah karena banyak

²⁹⁹ Tineke Hellwing, *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 24.

³⁰⁰ Koentjaraningrat 1985, hlm 459.

³⁰¹ Ibnu Qoyim, *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di masa Kolonial*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 39.

³⁰² *Idem.*

³⁰³ Tineke Hellwing., *op.cit.* hlm. 24.

³⁰⁴ *Ibid.* hlm. 25.

³⁰⁵ HM. Nasruddin Ansyoriy, *op.cit.* hlm 100.

jaminan untuk naik pangkat dan menerima premi.³⁰⁶ Kebijakan pemerintah Hindia Belanda adalah memerintah secara tak langsung dengan slogan "memerintah rakyat melalui penguasa pribumi".

Hubungan antara *priyayi* dan *wong cilik* berpolakan hubungan *kawula gusti* (pelayan dan majikan).³⁰⁷ Seperti dinyatakan D. Bekker, kepatuhan masyarakat *priyayi* bagaikan budak. Hal ini merupakan semacam bentuk strata sosial karena status seseorang seolah hanya berdasarkan garis keturunan.³⁰⁸ Masyarakat biasa hanya merupakan *kawula* (pelayan) dan tidak memiliki hak untuk ambil bagian dalam urusan pemerintahan. Peran utama mereka adalah melayani *gusti* mereka. Hubungan bersifat otoriter dan paternalistik.³⁰⁹

Di bawah pemerintahan Hindia Belanda strata sosial yang ada di masyarakat Jawa tidak dihilangkan atau dihapus. Pemerintah memiliki alasan dimana *priyayi* diharapkan mengasuh petani seperti anak sendiri yang memimpin dan memerintah dengan tangan besi.³¹⁰ Secara ekonomi rakyat biasa adalah pembayar pajak yang setia. Secara sosial mereka merupakan warga yang berdedikasi, patuh pada peraturan yang dikeluarkan atas nama raja dan pemerintah kolonial. Rakyat menanam tanaman-tanaman ekspor yang dikehendaki oleh pemerintah kolonial dipimpin oleh para kepala pribumi yang berada dibawah pengawasan pegawai-pegawai Eropa.³¹¹ *Cultuurstelsel* yang lebih maju memperkenalkan sebuah kelas baru yang mempunyai hak-hak

³⁰⁶ *Idem.*

³⁰⁷ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: 1984), hlm. 47.

³⁰⁸ D. Bekker, "Het Schoolbezeft van de Javanen," *De Macedonier 15* (1911), hlm. 241. Dalam

³⁰⁹ Soetarman Soediman Partonadi, *op.cit.* hlm. 15.

³¹⁰ *Idem.*

³¹¹ Saiful Bachri, *op.cit.* hlm. 115.

khusus di dalam masyarakat desa, yakni kepala desa dan para pejabatnya yang menikmati banyak keuntungan dan hak-hak istimewa termasuk bebas dari kewajiban-kewajiban *Cultuurstelsel*.³¹² Proses ini memperkuat struktur masyarakat desa yang tidak seimbang tersebut.³¹³

Dengan adanya *Cultuurstelsel*, petani di tindas oleh para penguasa pribumi. Biasanya pejabat hanya mengurus pertanian tanaman ekspor dan mengabaikan pertanian padi sehingga menyebabkan petani pribumi dirugikan. Selain itu pejabat juga lebih mementingkan komisi dari tanaman ekspor, atau reputasi mereka di mata pemerintah, daripada kesejahteraan petani, membiarkan atau merancang agar proporsi tanah yang lebih dari seharusnya dipakai untuk tanaman ekspor.³¹⁴

Dengan demikian pejabat pribumi dari kepala desa, wedana, camat dan bupati yang semula merupakan abdi raja sekarang menjadi abdi pemerintah Hindia Belanda. Pada awalnya, mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga raja, sekarang mereka memenuhi ambisi pemerintah Hindia Belanda dalam rangka memperoleh barang dagangan semurah-murahnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-sebesarnya di pasaran dunia.³¹⁵

Dengan keadaan yang seperti itu kehidupan sosial di wilayah Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dengan tradisi korupsi dikalangan para pegawai-pegawai pemerintahan pada waktu itu. Korupsi seolah telah menjadi

³¹² J. Thonas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hlm. 225.

³¹³ *Idem*.

³¹⁴ J.S . Furnivall, *op.cit.* hlm. 146.

³¹⁵ P.J. Suwarno: *Sejarah Birokasi Pemerintah Indonesia Dahulu dan Sekarang*, (Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1986), hlm. 32.

budaya.³¹⁶ Pada saat pemerintah menerapkan sistem *Cultuursettsel* sistem birokrasi Hindia Belanda mengenal dua sistem *Bestuurs Beambten* (BB) dan Pangreh Praja, yang justru memicu tindakan korupsi dalam bentuk lain.³¹⁷ Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda tidak hanya melibatkan pegawai yang berasal dari Belanda akan tetapi juga menggunakan ikatan feodal yang ada di Hindia Belanda. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan menggunakan bantuan kaum elite bangsawan atau *priyayi*. *Cultuurstelsel* menjadi mudah untuk dijalankan karena dapat menghubungkan antara pemerintah dengan petani. Akan tetapi dengan menggunakan para *priyayi* menjadi sumber korupsi. Di daerah Jawa misalnya saja *bekel* atau petugas pemungut pajak menaikkan nilai pajak hingga 20 kali lipat dari yang seharusnya dibayar masyarakat.

Para petani desa dieksploitasi secara besar-besaran baik oleh pemerintah Hindia Belanda maupun dari para pemimpin pribumi. Penerapan sistem feodal menjadikan ketidakseimbangan struktur masyarakat yang telah ada dan kemudian menyebabkan munculnya budaya korupsi dikalangan pejabat pemerintah dan para pejabat pribumi.

2. Memberlakukan pembagian kerja dalam perkebunan

Strategi kedua yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu memberlakukan pembagian kerja. Pembagian kerja untuk perkebunan tanaman ekspor ternyata membentuk golongan-golongan dalam masyarakat. Secara umum pembagian tenaga kerja perkebunan dibedakan menjadi 4 golongan.³¹⁸

³¹⁶Garda Maeswara, *Cikeas Menjawab: Tentang Yayasan-Yayasan Cikeas*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), hlm. 130.

³¹⁷*Idem*.

³¹⁸Mubyarto, *op.cit.* hlm. 115.

Pertama administrator; *kedua*, pegawai staf; *ketiga*, pegawai non-staf; dan *keempat* buruh perkebunan.³¹⁹ Dalam struktur organisasi perkebunan terdapat pembagian tugas yang jelas.³²⁰

Pejabat administrator, pegawai staf dan non-staf perkebunan termasuk dalam kelompok pertama, sedangkan bangsa pribumi hanya menempati posisi sebagai buruh rendahan.³²¹ Dalam perkebunan, tanggung jawab terbesar dan puncak dipegang oleh *administratur* yang dibantu oleh seorang penasihat dan *kontrolir* yang disebut pegawai staf.³²² Seorang *kontrolir* membawahi beberapa kepala bagian antara lain kepala bagian tanaman, bagian teknik, bagian pabrik, dan staf administrasi.³²³ Masing-masing kepala bagian membawahi seorang asisten yang langsung diberi wewenang di lapangan. Dalam melaksanakan tugas dan pengawasan langsung di lapangan, seorang asisten dibantu oleh beberapa orang mandor sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan mereka, misalnya saja mandor tanam, panen, pengolahan, sorotasi, pengepakan.³²⁴ Para mandor biasanya adalah penduduk pribumi yang berasal dari keluarga penguasa desa yang bekerja di perkebunan.³²⁵

Hubungan dalam struktur perkebunan biasanya bersifat paternalistik dan otoriter.³²⁶ Sebagai gambaran mengenai perbedaan kelas dalam masyarakat perkebunan, dapat dijelaskan pada skema hirarkis piramidal berikut ini³²⁷

³¹⁹ *Idem.*

³²⁰ *Ibid.* hlm. 116.

³²¹ *Ibid.* hlm. 115.

³²² *Ibid.* hlm. 116.

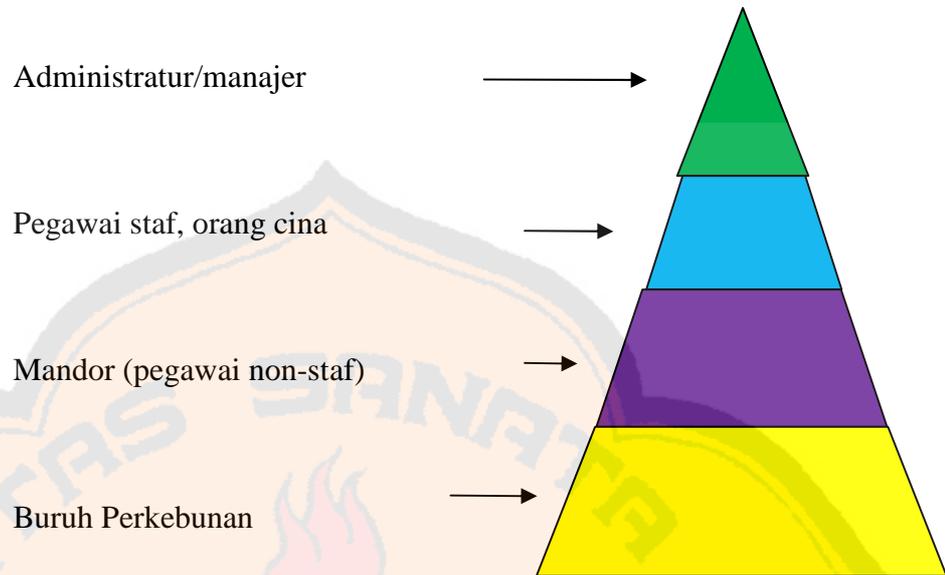
³²³ *Idem.*

³²⁴ *Ibid.* hlm. 115.

³²⁵ *Idem.*

³²⁶ *Ibid.* hlm. 116.

³²⁷ *Idem.*



Dengan adanya strategi pembagian kerja di dalam perkebunan terjadi perbedaan kelas yang sangat menyudutkan para petani di pedesaan Jawa. Dalam gambaran masyarakat perkebunan petani di Jawa hanya dijadikan sebagai buruh di perkebunan. Padahal para petani tersebut pada dasarnya adalah pemilik dari tanah yang dijadikan lahan perkebunan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani di pedesaan terjadi pada saat *Cultuurstelsel* berlangsung karena petani diturunkan strata sosialnya menjadi buruh perkebunan.

Kesengsaraan petani dengan adanya *Cultuurstelsel* bertambah dengan adanya kerja rodi.³²⁸ Pekerjaan-pekerjaan umum dibebankan kepada petani.³²⁹ Pekerjaan-pekerjaan umum ini diselenggarakan terutama untuk penyediaan dan

³²⁸ Kerja rodi, di Jawa kerja rodi pada awalnya dilakukan untuk kepentingan raja dan anggota keluarganya, para pembesar, para kepala, dan para pegawai lainnya, serta untuk kepentingan bersama, seperti pembuatan jalan dan jembatan. Rodi, digunakan untuk segala macam keperluan, seperti mendirikan benteng, pabrik, jalan, dan pengangkutan barang. Oleh karena itu tidak ada control maka rodi berkembang menjadi sistem kerja yang merugikan penduduk. Abdul Jalil, *Teologi Buruh*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm.39.

³²⁹ Saiful Bachri, *op.cit.* hlm. 132.

perbaikan prasarana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan dan keberhasilan *Cultuurstelsel*. semakin pentingnya pulau Jawa bagi Belanda, diperlukan pengerahan sejumlah besar tenaga petani untuk membangun tempat-tempat pertahanan.³³⁰ Segala beban yang alami oleh petani membawa dampak yang buruk bagi rakyat terutama petani. Kelaparan yang melanda Jawa disebabkan oleh kemelaratan petani dan keserakahan orang-orang pemegang kekuasaan terutama para pejabat pribumi yang tidak membela rakyat.

3. Memindah pola pemukiman penduduk Karesidenan Cirebon

Strategi ketiga yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu memindah pola pemukiman penduduk di Karesidenan Cirebon. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda ini bertujuan untuk memperbesar pengaruhnya di wilayah Hindia Belanda. Hal yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu menggeser pusat pemerintahan dan perekonomian ke daerah pelabuhan.

Pola pemukiman penduduk di karesidenan Cirebon mengalami pergeseran, pada masa para Sultan Cirebon masih mempunyai kekuasaan, pusat orientasi pemukiman berada di lingkungan kraton sebab dalam tradisi Jawa baik pada kerajaan pedalaman maupun pantai, lingkungan kraton bukan hanya menjadi pusat kekuasaan politik tetapi juga merupakan pusat segalanya termasuk pusat ekonomi dan ditandai adanya pasar yang dekat dengan kraton.³³¹ Pola pemukiman yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda jauh berbeda dengan yang telah ditetapkan oleh kerajaan tradisional. Pihak

³³⁰ *Idem*.

³³¹ Debdibud, *op.cit.* hlm. 127.

pemerintah Hindia Belanda tidak menempatkan kraton sebagai pusat pemerintahan, tetapi pusat pemerintahan maupun perekonomian di geser di daerah pelabuhan. Pada saat itu pemerintahan tradisional dan kraton semakin tidak memiliki kekuasaan politik dan ekonomi sehingga lingkungan kraton tidak lagi menjadi pusat orientasi pemukiman penduduk.³³²

Pada tahun 1865 pemerintah Hindia Belanda membangun pelabuhan untuk mendukung lalu lintas perdagangan. Sejarawan Cirebon TD. Sudjana mengatakan, komoditas perkebunan terutama kopi, teh, dan gula dulu dikirim dari pusat perkebunan ke pelabuhan.³³³ Pelabuhan Cirebon sendiri yang menggerakkan urat nadi perekonomian Cirebon.³³⁴

Struktur birokrasi jajaran tertinggi pemerintahan kolonial di Karesidenan Cirebon adalah Gubernur Jenderal yang dibantu oleh Dewan Hindia (*Raad van Indie*) sebagai penasihat beserta departemen-departemennya.³³⁵ Wilayah jajahannya dibagi atas provinsi dan residensi-residensi. Para residen dibantu oleh para asisten residen yang membawahi para *kontroleur* (kontrolir) yang menjadi ujung tombak pelaksanaan *Cultuurstelsel*. Sedangkan pemimpin pribumi jabatannya dibawah para pemimpin Eropa.³³⁶ Bupati tetap di tempatkan pada jajaran struktur pemerintahan pribumi. Dibawah bupati masih terdapat pejabat daerah yaitu wedana dan camat yang membawahi kepala desa.

³³² *Idem.*

³³³ *Ibid.* hlm. 128.

³³⁴ *Idem.*

³³⁵ Marwati Djoened Poesponegoro, *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1992), hlm. 4.

³³⁶ *Idem.*

Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda pola pemukiman yang sebelumnya telah dimiliki oleh Karesidenan Cirebon telah digeser oleh pemerintah Hindia Belanda. Sehingga dampak yang ditimbulkan Sultan di Karesidenan Cirebon tidak memiliki wewenang untuk mengatur kehidupan sosial di Karesidenan Cirebon karena pusat ekonomi, sosial, maupun politik telah berpindah ke dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda.

4. Memberikan kehidupan yang nyaman bagi para *priyayi*

Strategi keempat yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu dengan jalan memberikan kehidupan yang nyaman bagi para *priyayi*. Strategi ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda supaya para *priyayi* dapat bekerjasama dengan baik. Cara untuk masuk ke dalam kehidupan sosial para *priyayi* di Jawa yaitu dengan menyediakan apa yang dikehendaki oleh para *priyayi*.

Dampak sosial yang ditimbulkan di daerah Karesidenan Cirebon sama dengan di wilayah Jawa. Bagi kalangan *priyayi*, *Cultuurstelsel* merupakan masa yang sangat menguntungkan. Kedudukan feodal mereka menjadi lebih aman, karena ketentuan jabatan yang diwariskan secara turun temurun.³³⁷ Pada dasarnya, kaum elite bangsawan atau *priyayi* selama masa *Cultuurstelsel* menjadi alat kekuasaan pemerintah kolonial Belanda.³³⁸ Untuk mendapatkan

³³⁷ Suwarno, *op.cit.* hlm. 10.

³³⁸ *Idem.*

komisi atau keuntungan lebih maka kaum *priyayi* harus melakukan pemaksaan kepada para petani.³³⁹

Para *priyayi* bergantung secara langsung pada kekuasaan Belanda untuk kedudukan dan penghasilannya. Perlakuan khusus diterapkan dalam kehidupan kaum *priyayi* diantara sering menjadi sasaran pengawasan pemerintah, terpisah dari masyarakat, dan terbebas dari tekanan sanksi-sanksi.³⁴⁰ Dengan adanya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut petani menjadi dirugikan. Para bangsawan ataupun para penguasa pribumi lebih tunduk dan taat pada pemerintah dan meninggalkan rakyat dalam keadaan menderita.

5. Petani menjadi buruh

Pada dasarnya petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah pedesaan. Penerapan *Cultuurstelsel* mengubah pulau Jawa menjadi sebuah perkebunan luas, di mana para petani diturunkan derajatnya menjadi “buruh *Cultuurstelsel*” di atas tanah miliknya sendiri.³⁴¹ Bagi penduduk yang tidak menjadi petani diharuskan dan dipaksa bekerja seperlima waktu dari satu tahun untuk kepentingan Gubernur.³⁴² Dengan cara tersebut dapat diperoleh tenaga-tenaga murah yang dapat dipekerjakan untuk berbagai bidang seperti

³³⁹ *Ibid.* hlm. 11.

³⁴⁰ *Ibid.* hlm. 265.

³⁴¹ Capt. R. P. Suyono, *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm. 56.

³⁴² *Idem.*

memelihara jalan raya, jembatan, dan semua pekerjaan umum yang berada di bawah perintah Gubernur.³⁴³

Ketidakadilan yang dialami oleh para petani dimulai pada tahun 1830-1870 dimana sistem *Cultuurstelsel* menggalakkan tanaman ekspor yang laku di Eropa mulai dibudidayakan di wilayah Jawa khususnya 18 Karesidenan yang terkena kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda. Selain menjadi buruh di tanah mereka sendiri para petani semakin dibebani pajak untuk menunjang ekonomi supradesa.³⁴⁴ Para petani tidak hanya terikat kewajiban terhadap sistem feodal dan pedesaan, tetapi juga diharapkan membayar pajak dan upeti.³⁴⁵ Ketika perkebunan mulai merambah ke desa, para petani semakin terjebak dan tercekik karena beban pajak, kerja paksa, dan upeti-upeti yang semakin berat. Keadaan pedesaan semakin diperburuk dengan gangguan alam yang datang tiba-tiba seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.³⁴⁶ Bencana alam ini semakin menambah beban para petani yang berujung pada kesengsaraan karena pajak tetap dipungut meskipun panennya gagal.

C. Dampak Politik

Selain strategi ekonomi maupun sosial ada pula strategi politik yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Strategi yang dijalankan oleh pemerintah tentu untuk melaksanakan budidaya tanaman ekspor di wilayah perkebunan. Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya menguasai sektor

³⁴³ *Ibid.* hlm. 57.

³⁴⁴ *Ibid.* hlm. 262.

³⁴⁵ *Idem.*

³⁴⁶ *Ibid.* hlm. 263

ekonomi akan tetapi sektor politik pun dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Belanda pada masa itu berbeda dengan pada masa VOC, dimana pemerintah Hindia Belanda melakukan pendekatan politik yang lebih mendalam sehingga pemerintah mampu untuk mempengaruhi kehidupan politik di Karesidenan-Karesidenan yang ada di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tidak hanya mempengaruhi sektor politik pada tingkat pusat akan tetapi juga mempengaruhi sektor politik pada tingkat desa. Adapun strategi politik yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda antara lain:

1. Menggunakan organisasi desa dalam budidaya tanaman wajib

Strategi pertama yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang ada di wilayah Hindia Belanda. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan organisasi desa. Strategi ini dilakukan di Karesidenan Cirebon agar pemerintah dapat dengan mudah ikut campur dalam organisasi desa.

Seperti telah diketahui sebelumnya pada masa prakolonial di pulau Jawa, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Jawa tradisional, struktur penguasaan lahan sawah sangat timpang.³⁴⁷ Raja memiliki hamba kerajaan (*abdi dalem*) yang menghubungkan antara rakyat (*wong cilik*) dengan pihak kerajaan. Keadaan demikian tidak dihilangkan begitu saja akan tetapi organisasi yang telah ada dilanjutkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan

³⁴⁷ Akatiga Foundation, Jurnal Analisis Sosial Vol. 11 No.1 April 2006: *Tantangan Masa Depan Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.173.

pemerintahan Hindia Belanda dalam hal pembudidayaan tanaman ekspor yang laku di pasaran Eropa.

Di awal masa *Cultuurstelsel* kepala desa dan pemerintah desa Jawa banyak dilimpahi kekuasaan politik maupun ekonomi.³⁴⁸ Para kepala desa pada masa *Cultuurstelsel* menjadi sasaran tekanan baru yang semakin besar atas keterlibatan tanah dan warga mereka.³⁴⁹ Di bawah *Cultuurstelsel* semakin tegas, semakin menuntut dan langsung tertuju pada sektor budidaya tanaman dagang ekspor tanah jajahan.

Van den Bosch sadar betul, keberhasilan *Cultuurstelsel* sangat tergantung pada kemampuannya dalam memanfaatkan kekuasaan dari kaum *priyayi* pribumi. Kekuasaan *priyayi* diperkokoh sedemikian rupa sehingga manfaatnya dapat sesuai dengan kepentingan Belanda.³⁵⁰ Dengan demikian *priyayi* tidak hanya harus tunduk kepada pemerintah, tetapi sekaligus juga harus ditaati oleh rakyat pribumi.

Dengan dipertahankannya organisasi desa yang ada memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi bagi penduduk desa sendiri dampak dari penerapan kebijakan *cultuurstelsel* dengan menggunakan organisasi desa adalah bertambahnya angka kemiskinan di Hindia Belanda (khususnya di Jawa).³⁵¹ Hal ini sebagai akibat wabah penyakit dan kelaparan yang melanda Jawa sebagai akibat tidak

³⁴⁸Robert van Niel, *Sistem tanam Paksa di Jawa: Kumpulan Tulisan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2003), hlm. 178.

³⁴⁹*Idem.*

³⁵⁰Parakitri Tahi Simbolon, *op.cit.*, hlm. 125.

³⁵¹<http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/03/cultuurstelsel-kemiskinan-struktural-di-jawa-abad-ke-19/> diakses pada tanggal 24 februari 2011 pukul 10:29 AM.

adanya penanaman komoditas pangan. Peran dari organisasi desa dan seorang tuan tanah dalam memerintah penduduk desa yang ada dibawahnya begitu besar, sehingga rakyat tidak bisa berbuat apa-apa.³⁵² Kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya bencana kelaparan karena ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat pribumi.

2. Menggunakan administrasi ganda

Strategi yang kedua dalam bidang politik pemerintah Hindia Belanda yaitu memberlakukan sistem ganda. Dimana pemerintah Hindia Belanda menggunakan administrasi pribumi dan administrasi Belanda. Tujuan dari penggunaan administrasi ganda tentunya untuk memperoleh dukungan dari para pejabat pribumi karena dalam administrasi ganda para pejabat pribumi dilibatkan dalam penanaman wajib di setiap Karesidenan.

Kombinasi administrasi ganda digunakan untuk mendukung sistem *Cultuurstelsel*. Pembuatan keputusan dalam semua jenis permasalahan berada di tangan para administrator Belanda. Dalam pemerintahan Hindia Belanda penggunaan sistem ganda lebih disesuaikan dengan adat kebiasaan pribumi yang telah ada.

Ikatan feodal tetap digunakan karena pejabat pribumi terutama kepala desa merupakan penghubung antara petani dengan pejabat-pejabat pribumi.³⁵³ Tetapi dalam praktek, ternyata yang terjadi hal-hal yang bersifat eksploitatif tanpa peri kemanusiaan.³⁵⁴ Perpaduan antara kebijakan

³⁵² *Idem.*

³⁵³ M.C. Ricklets, *op.cit*, hlm. 262.

³⁵⁴ <http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/03/cultuurstelsel-kemiskinan-struktural-di-jawa-abad-ke-19/> diakses pada tanggal 24 februari 2011 pukul 10:29 AM.

kapitalisme *cultuurstelsel* dan kebudayaan feodal Hindia Belanda menghasilkan penindasan bagi rakyat.³⁵⁵ Ketika hasil yang diperoleh melebihi pajak tanah maka lurah berusaha memperbesar luas tanah yang digunakan.³⁵⁶ Dari aturan semula menerapkan 20% tanah sebagai lahan untuk penanaman komoditas ekspor, berubah menjadi hampir 100% tanah digunakan untuk komoditas ekspor³⁵⁷.

3. Menggunakan sistem *apanage*

Dalam melaksanakan *Cultuurstelsel* terutama dibidang perkebunan strategi yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu tetap mempertahankan sistem *apanage*. Sistem *apanage* ini sangat membantu dalam pelaksanaan budidaya tanaman ekspor di pulau Jawa termasuk pula daerah Karesidenan Cirebon. Sistem *apanage* dipertahankan untuk mempermudah pengerahan tenaga kerja.³⁵⁸ Dengan kata lain, semua kewajiban feodal diberikan kepada bangsawan pemilik tanah, dan petani penggarap tanah yang memiliki kewajiban dalam bidang perkebunan.³⁵⁹ Para *bekel* memiliki kewajiban sekaligus menjadi mandor perkebunan yang bertanggung jawab terhadap pengerahan tenaga kerja wajib, dan pengumpul pajak dari petani serta mengawasi keamanan desa.³⁶⁰

³⁵⁵ *Idem.*

³⁵⁶ <http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/03/cultuurstelsel-kemiskinan-struktural-di-jawa-abad-ke-19/> diakses pada tanggal 24 februari 2011 pukul 10:29 AM.

³⁵⁷ *Idem.*

³⁵⁸ <http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/03/cultuurstelsel-kemiskinan-struktural-di-jawa-abad-ke-19/> diakses pada tanggal 24 februari 2011 pukul 10:29 AM.

³⁵⁹ *Idem.*

³⁶⁰ *Ibid.* hlm. 432.

Sistem *apanage* juga digunakan untuk menentukan dan mengatur pola hubungan sosial politik masyarakat agraris.³⁶¹ Dalam sistem *apanage* berdasarkan atas teori milik raja (*Vorsendamein*) dari Rouffaer, raja adalah pemilik tanah seluruh kerajaan yang dibantu oleh para birokrasi seperti bupati dan sebagai imbalan jasanya diberi *apanage* atau tanah lungguh.³⁶² Selama pemerintahan Hindia Belanda, kekuasaan raja digantikan sehingga yang memiliki tanah kerajaan pada masa *Cultuurstesel* yaitu pemerintah Hindia Belanda karena kerajaan-kerajaan di Jawa sudah dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah juga menggunakan birokrasi tradisional seperti bupati, wedana, camat dan kepala desa untuk menyerap tenaga kerja dan penggunaan tanah.

Penerapan sistem *apanage* berpengaruh bagi pihak petani yang sangat dirugikan. Sistem *apanage* memaksa petani untuk bekerja membudidayakan tanaman pemerintah, dan membayar pajak kepada pemerintah dengan hasil bumi yang mereka peroleh. Sistem ini menyebabkan petani menjadi sengsara karena harus melaksanakan kerja wajib yang digalakkan oleh pemerintah.

4. Menerapkan penyerahan wajib

Dalam sistem *Cultuurstesel* terutama dalam membudidayakan tanaman ekspor pemerintah Hindia Belanda menerapkan strategi yang diterapkan sistem VOC. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem VOC dengan label baru, yakni pengawasan tanah dan tenaga kerja untuk produksi pemerintah yang digabungkan dengan manajemen bisnis ‘modern’

³⁶¹*Ibid.* hlm. 27.

³⁶²*Ibid.* hlm 27-8.

dan memaksa institusi tradisional yang ada.³⁶³ Perkembangan baru ini menyebabkan stagnasi tenaga kerja bayaran yang telah tumbuh secara perlahan.³⁶⁴

Pada masa pemerintahannya VOC menerapkan sistem penyerahan wajib untuk wilayah Hindia Belanda, hal ini masih tetap dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebenarnya, *Cultuurstelsel* ini sama dengan penyerahan wajib komoditas ekspor kepada pemerintah dan sangat mirip dengan penyerahan wajib yang telah dijalankan VOC terhadap kopi di Priangan.³⁶⁵ *Cultuurstelsel* ini merupakan sistem yang tercipta karena adanya sistem Priangan yang terlebih dahulu di jalankan oleh VOC.

Selain sistem penyerahan wajib, sistem lain yang digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu bekerja sama dengan pejabat pribumi. Kerjasama dengan pejabat pribumi menyebabkan pemerintah dapat melaksanakan budidaya tanaman ekspor dengan mudah. Kerjasama dengan pejabat pribumi pada masa VOC terjalin dengan raja-raja dan bupati, sedangkan dalam *Cultuurstelsel* terjalin dengan kepala-kepala desa.³⁶⁶ Dengan menggunakan sistem penyerahan wajib yang pernah diberlakukan oleh VOC maka penduduk pribumi yang paling dirugikan, karena para petani ditindas oleh pejabat pribumi untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Hindia Belanda.

5. Menggunakan pengabdian feodal dalam penanaman wajib

³⁶³ J. Thomas Lindblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1988), hlm. 221.

³⁶⁴ *Idem*.

³⁶⁵ M.C. Ricklets, *op.cit.* hlm. 262.

³⁶⁶ Anwar Abbas, *op.cit.* hlm. 100.

Dalam *Cultuurstelsel* strategi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda selain menggunakan ikatan desa juga menggunakan pengabdian feodal yang sudah ada dalam tatanan kehidupan masyarakat Hindia Belanda. Dalam sistem *Cultuurstelsel* campur tangan negara memerlukan banyak organisasi manajemen di daerah pedalaman.³⁶⁷ Pegawai-pegawai Eropa mendapat tugas yang penting karena pekerjaan-pekerjaan mereka tidak dapat diserahkan kepada kepala pribumi atau bupati.³⁶⁸ Walaupun demikian, pengaruh para bupati tetap dimanfaatkan oleh pemerintah.³⁶⁹ Kebutuhan hidup bupati dan keluarganya yang sangat besar jangan sampai menekan rakyat.³⁷⁰ Pada kenyataan dilapangan, para bupati kembali memiliki kesempatan untuk menindas rakyat melalui kekuasaannya. Gaji mereka yang tidak cukup untuk memenuhi gaya hidupnya memaksa mereka untuk menambah penghasilan melalui cara-cara yang tidak jujur. Rakyat yang masih mempertahankan pengabdian kepada para elite bagsawan dimanfaatkan untuk kepentingan pemimpinnya sendiri. sehingga rakyat menjadi lebih menderita.

Dengan adanya pengabdian feodal yang ada dalam tatanan masyarakat pulau Jawa dengan mudah pemerintah Hindia Belanda memanfaatkan kesempatan tersebut. Rakyat yang loyal kepada para pemimpin akan memenuhi apa saja yang diminta oleh pemimpin mereka. Langkah yang diambil oleh pemerintah Hindia Belanda adalah memanfaatkan

³⁶⁷ Saiful Bachri, *op.cit.* hlm. 118.

³⁶⁸ *Idem.*

³⁶⁹ *Ibid.* hlm. 119.

³⁷⁰ *Idem.*

bupati maupun pejabat-pejabat pribumi lainnya dengan menggunakan rangsangan untuk memenuhi kehidupan mereka yang glamor.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya strategi ekonomi, sosial, politik yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda menimbulkan dampak ekonomi, sosial, politik di daerah Karesidenan Cirebon maupun di daerah Jawa lainnya. Strategi yang dijalankan oleh pemerintah menyebabkan terjadinya akibat ganda yaitu keuntungan besar untuk pihak Belanda dan kemiskinan bagi rakyat pribumi.³⁷¹ Pemusatan perhatian pada tanaman ekspor menyebabkan produksi pangan menurun dan menimbulkan kelaparan di mana-mana. Dalam penerapan *Cultuurstelsel* terutama untuk tanaman ekspor terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan yang memberatkan rakyat pribumi yang semakin menderita dan membuat miskin.

Kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat petani juga disebabkan karena sepanjang waktu petani hanya digunakan untuk menggarap perkebunan-perkebunan tanaman ekspor sehingga para petani tidak sempat untuk menggarap tanaman pangan. Tenaga rakyat banyak yang dikerahkan untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti membuat jalan-jalan, saluran air, dan jembatan.³⁷² Keadaan ini sangat bertentangan dengan ketentuan yang tertulis dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) ketiga dan keenam tahun 1834, no. 22³⁷³

³⁷¹ Ayub Ranoh, *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Soekarno*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), Hlm. 7.

³⁷² *Idem*.

³⁷³ Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *op.cit.* hlm. 56.

Selain kerja paksa yang dijalankan oleh petani, penyebab terjadinya kemiskinan dikalangan petani disebabkan penggunaan tanah milik petani untuk budidaya tanaman ekspor. Petani dipaksa untuk menanam seperlima dari tanah mereka dengan tanaman ekspor yang telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda.³⁷⁴ Faktor yang tidak kalah penting penyebab kemiskinan di daerah pedesaan adalah peningkatan jumlah penduduk yang mulai naik dengan laju yang cepat sehingga kenaikannya menjadi tidak seimbang dengan kenaikan produksi pangan.³⁷⁵



Pembuatan saluran irigasi³⁷⁶

³⁷⁴Centre for Social Analysis (Akatiga Foundation), *Jurnal analisis sosial vol. 11 no. 1 April 2006*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 174.

³⁷⁵ Soetanto Hadinoto, Djoko Retnadi, *Micro credit challenge: cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 123.

³⁷⁶ <http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/mmbase/images/2337109> diakses pada tanggal 03 Juni 2011 pukul 12:12 PM.

Adapun tenaga rakyat yang terlibat dalam *Cultuurstelsel* terdapat dalam tabel di bawah ini:

Persentase Luas tanah dan Penduduk yang melaksanakan *Cultuurstelsel* antara tahun 1840-1850

Karesidenan	Persentase Penduduk Dibagi:					
	Seluruh perkebunan Gubernemen kopi			Seluruh perkebunan Gubernemen		
Tahun	1840	1845	1850	1840	1845	1850
Banten	92%	48%	16%	20%	25%	2%
Priangan	65%	67%	71%	9%	9%	6%
Karawang	42%	37%	17%	42%	37%	17%
Cirebon	69%	54%	51%	49%	36%	28%
Tegal	44%	36%	47%	28%	23%	32%
Pekalongan	59%	55%	45%	46%	40%	33%
Semarang	30%	25%	22%	5%	10%	5%
Jepara	35%	35%	31%	24%	25%	26%
Rembang	31%	25%	22%	14%	21%	19%
Surabaya	32%	33%	26%	31%	31%	25%
Pasuruhan	59%	64%	61%	31%	33%	27%
Besuki	47%	54%	52%	19%	24%	22%
Pacitan	72%	63%	76%	-	-	-
Kedu	79%	97%	79%	1%	6%	5%
Bagelen	81%	62%	56%	54%	43%	38%
Banyumas	68%	74%	80%	33%	33%	40%
Madiun	56%	51%	52%	23%	23%	25%
Kediri	61%	61%	57%	23%	29%	15%
Seluruh Jawa	57%	52%	46%	25%	25%	19%

Sumber: Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001. hlm. 315, dikutip dari C. Fasseur. *Kultuurstelsel en Koloniale Baten: De Nederlandse Exploitatie van Java 1840-1860*, Leiden, 1975. hlm. 16.

Tabel di atas menjelaskan bahwa dalam budidaya tanaman ekspor kopi maupun tanaman lain membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak. Daerah yang terkena kebijakan meliputi seluruh Jawa. Untuk Karesidenan Cirebon keterlibatan penduduk dalam pelaksanaan *Cultuurstelsel* pada tahun

1840 sebesar 49%, tahun 1845 sebesar 36%, dan untuk tahun 1850 sebesar 28%.

Penduduk pribumi selain merasakan dampak kemiskinan juga mendapatkan dampak yang buruk yaitu penurunan kesuburan tanah. Pada masa *Cultuurstelsel* tanah-tanah dimanfaatkan secara penuh untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di pasaran Eropa. Tanah-tanah di Karesidenan Cirebon digunakan sepanjang tahun untuk menanam tanaman ekspor sehingga kesuburan tanah di wilayah Jawa termasuk pula tanah di wilayah Karesidenan Cirebon mengalami penurunan kesuburan tanah. Kesuburan tanah yang menurun terjadi karena tanah digunakan secara penuh dan berlangsung terus-menerus tanpa adanya upaya konservasi tanah, dan pembabatan tanaman hutan secara berlebihan yang menyebabkan menipisnya pasokan air ke dalam tanah.

Kebijakan dalam pengelolaan lahan juga mendorong terjadinya kesuburan tanah yang menurun. Kebijakan dalam pengelolaan lahan akan menentukan besarnya erosi dan kecepatan kerusakan tanah di lahan-lahan pertanian maupun hutan.³⁷⁷ Pada penerapan sistem *Cultuurstelsel* kebijakan pengelolaan lahan mempengaruhi kecepatan kerusakan lahan sebab pada saat itu hutan pada ketinggian 600-1200 m diubah menjadi perkebunan kopi. Sehingga pengubahaan fungsi dari hutan menjadi perkebunan kopi dapat menyebabkan erosi.³⁷⁸ Erosi yang terjadi di area perkebunan maupun

³⁷⁷ *Idem.*

³⁷⁸ Erosi di definisikan sebagai pemindahan atau pengangkutan tanah dari suatu tempat ke tempat lain yang lebih rendah melalui media air atau angin dalam PusLit Kopi & Kakao Indonesia, Panduan Lengkap Budidaya Kakao, (Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2004), hlm. 87.

pertanian dapat menyebabkan hilangnya lapisan tanah permukaan yang subur dan diganti dengan munculnya lapisan tanah bawah yang relatif kurang subur.³⁷⁹

Selain itu juga penduduk pribumi mendapatkan beban berat akibat strategi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda yang berkaitan dengan adanya premi dari adanya *Cultuurstelsel*. Dalam kehidupan perekonomian Hindia Belanda tidak dapat dilepaskan dengan adanya tradisi korupsi yang menjadi budaya dikalangan para pegawai-pegawai pemerintahan.³⁸⁰ Pada saat pemerintah menerapkan sistem *Cultuurstelsel* sistem birokrasi Hindia Belanda mengenal dua sistem *Bestuurs Beambten* (BB) dan *Pangreh Praja*, justru memicu tindakan korupsi dalam bentuk lain.³⁸¹ Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda tidak hanya melibatkan pegawai yang berasal dari Belanda akan tetapi juga menggunakan ikatan feodal yang ada di Nusantara. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan bantuan kaum elite bangsawan atau *priyayi*. *Cultuurstelsel* menjadi mudah untuk dijalankan karena *priyayi* bisa menjadi penghubung antara pemerintah dengan petani. Akan tetapi dengan menggunakan para *priyayi* yang ada di Karesidenan Cirebon menjadi sumber korupsi.

Dalam prakteknya para kepala desa, demang, wedana, dan bupati justru membuat peraturan sendiri. Dengan peraturan seperti itu tentu membawa keuntungan pribadi bagi pejabat. Pada dasarnya korupsi yang

³⁷⁹ *Idem.*

³⁸⁰ Garda Maeswara, *Cikeas Menjawab: Tentang Yayasan-Yayasan Cikeas*, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2010), hlm. 130.

³⁸¹ *Idem.*

terjadi pada masa tersebut disebabkan karena mental pejabat pemerintah yang kurang baik. Para pejabat hanya memikirkan kehidupan perekonomian mereka sendiri tanpa memperdulikan petani maupun buruh perkebunan. Pada saat itu pejabat pemerintah telah disibukkan dengan mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk memenuhi hasrat mereka untuk hidup mewah seperti pejabat-pejabat yang berasal dari Belanda. Para pejabat pribumi melakukan korupsi untuk mengejar kedudukan dan melengkapi dengan simbol-simbol. Para penguasa harus tampak memiliki karisma dan kaya dengan berbagai kelengkapan seorang penguasa yang harus memiliki lembaga kebesaran, misalnya saja *wisma* (rumah)³⁸², *garwa* (istri), *curiga* (keris)³⁸³, *rata/turangga* (kereta/kuda)³⁸⁴, dan *kukila* (burung)³⁸⁵ ini semua adalah kelengkapan seorang pejabat tradisional dengan berbagai lambing kedudukan yang prestisius.³⁸⁶

Bentuk lain dari korupsi pada masa *Cultuurstelsel* yaitu upeti.³⁸⁷ Pangreh praja, seperti wedana dan bupati, menarik upeti dari masyarakat.³⁸⁸ Saat pemerintah Hindia Belanda memperluas daerah pemungutan pajak tanah dan hasilnya, peluang tersebut dimanfaatkan oleh pejabat pribumi.³⁸⁹ Di

³⁸² *wisma* (rumah) merupakan simbol domisili dan wilayah dalam Prasida Wibawa, *Pesona Tosan Aji*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 69.

³⁸³ *Curiga* (keris) merupakan simbol kekuatan dan kejantanan dalam Prasida Wibawa, *Pesona Tosan Aji*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 69.

³⁸⁴ *rata/turangga* (kereta/kuda) merupakan simbol kedudukan dan kekuasaan dalam Prasida Wibawa, *Pesona Tosan Aji*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 69.

³⁸⁵ *kukila* (burung) melambangkan rasa seni dan keindahan.

³⁸⁶ Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah: Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008), hlm 93.

³⁸⁷ *Idem*.

³⁸⁸ *Ibid.* hlm. 131.

³⁸⁹ *Idem*.

daerah Jawa misalnya saja *bekel* atau petugas pemungut pajak menaikkan nilai pajak hingga 20 kali lipat dari yang seharusnya dibayar masyarakat.³⁹⁰

Perluasan perkebunan memerlukan lahan dan tenaga kerja petani, namun dalam pelaksanaannya banyak menyita milik petani yang berakibat adanya korupsi ditingkat pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada saat itu buruh maupun petani berada dibawah tanggung jawab para *bekel* dan *mandor*.³⁹¹ Untuk mendorong keras para *bekel* dan *mandor* perkebunan pemerintah tidak segan-segan memberikan intensif seperti *covective loon*, yaitu upah kolektif karena *bekel* dan *mandor* mempunyai pekerjaan yang ditargetkan oleh perkebunan.³⁹² Oleh sebab itu *bekel* dan *mandor* sebagai perantara dari pihak pemerintah merekrut buruh tani sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan perkebunan.³⁹³ Akan tetapi pada prakteknya upah yang diberikan pada petani dipotong oleh *bekel* maupun *mandor*. Praktek korupsi ini biasanya dikenal dengan korupsi pada tingkat bawah yang dilakukan oleh pegawai pemerintah Hindia Belanda.³⁹⁴

Kemiskinan yang melanda Karesidenan Cirebon disebabkan penduduk pribumi dipaksa untuk menyediakan tanah untuk menanam tanaman ekspor dan bekerja untuk memenuhi kewajiban desa. Penduduk dipaksa oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja di perkebunan-perkebunan kopi. Dengan keadaan demikian waktu yang dimiliki oleh penduduk desa tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka,

³⁹⁰ *Ibid.* hlm. 132.

³⁹¹ Suhartono W. Pranoto, *op.cit.* hlm 91.

³⁹² *Idem.*

³⁹³ *Ibid.* hlm. 92.

³⁹⁴ *Ibid.* hlm. 92

akibatnya para penduduk mengalami kemiskinan dan bahaya kelaparan. Bahaya kelaparan yang dialami oleh penduduk desa Karesidenan Cirebon disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan kebutuhan serta kesuburan tanah yang mulai menurun akibat tanah yang selalu digunakan untuk budidaya tanaman ekspor sehingga petani mengalami gagal panen. Semua strategi ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda mengakibatkan penduduk pedesaan yang ekonominya bertumpu pada pertanian menjadi menderita dan miskin karena strategi tersebut memberikan beban yang berat bagi penduduk pedesaan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V

KESIMPULAN

Pada abad ke 19 kopi sangat digemari oleh penduduk Eropa sehingga harus mengimpor kopi dari Arab. Akan tetapi jumlah kopi yang diimpor dari Arab tidak memenuhi kebutuhan pasar di Eropa. Salah satu usaha yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk memenuhi kebutuhan pasar yaitu dengan membudidayakan tanaman kopi. Salah satu bangsa yang berusaha untuk membudidayakan tanaman kopi tersebut adalah bangsa Belanda. Karena bangsa Belanda tidak memiliki lahan maka budidaya tanaman kopi dilakukan di daerah jajahannya yaitu wilayah Hindia Belanda termasuk di pulau Jawa.

Keinginan untuk memenuhi kebutuhan kopi bagi pasar Eropa mendorong pemerintah Hindia Belanda lebih fokus dalam segi perkebunan. Pemerintah menjalankan sistem perkebunan di wilayah Jawa. Sistem perkebunan juga diberlakukan di Karesidenan Cirebon, yakni untuk tanaman kopi dan tebu. Daerah tersebut cocok untuk kedua tanaman tersebut. Untuk tanaman kopi di Karesidenan Cirebon dibudidayakan di wilayah pedalaman Cirebon (Majalengka dan Kuningan) dengan ketinggian 1.000-1.700 m.

Keseriusan bangsa Belanda untuk memenuhi kebutuhan kopi di pasar Eropa mempengaruhi kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Karesidenan Cirebon. Pada tahun 1830-1870 pemerintah menetapkan sistem perkebunan yang dikenal dengan *Cultuurstelsel*. Pada masa *Cultuurstelsel* pemerintah Hindia Belanda memberlakukan budidaya tanaman ekspor terutama di pulau Jawa. Salah

satu tanaman yang dibudidayakan adalah kopi. Tanaman kopi diperkenalkan di Hindia Belanda oleh VOC di daerah Priangan. Pada abad ke 19 budidaya kopi diperluas hingga ke Karesidenan Cirebon (Majalengka dan Kuningan).

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda pada pelaksanaan sistem perkebunan di wilayah Karesidenan Cirebon digunakan untuk memaksimalkan lahan subur, lahan yang belum diolah dan memaksimalkan tenaga kerja di wilayah tersebut dalam rangka pembudidayaan tanaman ekspor kopi. Kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda tersebut diatur dalam ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Menurut lembaran Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no. 22.

Dalam ketentuan-ketentuan menurut lembar Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no 22 pemerintah Hindia Belanda menjalankan budidaya tanaman ekspor dengan ketentuan melalui persetujuan, penduduk menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman perdagangan yang dapat dijual di pasar Eropa; tanah yang disediakan untuk penanaman tanaman perdagangan tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa; waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman perdagangan tidak boleh melebihi waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi; bagian tanah yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah; hasil tanaman perdagangan yang berasal dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda; apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih harus diserahkan kepada rakyat; kegagalan panen tanaman perdagangan harus dibebankan kepada pemerintah,

terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk; penduduk desa akan mengerjakan tanah mereka dengan pengawasan kepala-kepala mereka, pegawai-pegawai Eropa membatasi pengawasannya pada segi-segi teknis dan ketepatan waktu dalam pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan.

Dalam rangka menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut pemerintah Hindia Belanda membutuhkan bantuan penduduk pribumi. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda melakukan interaksi dengan petani. Karena petani merupakan unsur terpenting dalam budidaya tanaman ekspor. Pemerintahan Hindia Belanda menggunakan birokrasi tradisional di dalam melaksanakan budidaya tanaman ekspor di Karesidenan Cirebon. Interaksi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda melibatkan bupati, wedana, camat, kepala desa (lurah) maupun para priyayi. Dengan mengadakan kerjasama bersama birokrasi tradisional maka budidaya tanaman ekspor akan berjalan dengan baik. Fungsi dari birokrasi tradisional bagi pemerintah Hindia Belanda sebagai perantara interaksi antara pemerintah Hindia Belanda dengan petani. Interaksi tersebut dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pengolahan lahan, laju pertumbuhan produksi, membangun dan menjaga perkebunan kopi di Karesidenan Cirebon.

Dengan adanya kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam ketentuan-ketentuan menurut lembar Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no 22 dan dengan adanya interaksi pemerintah Hindia Belanda dengan birokrasi tradisional menyebabkan adanya dampak ekonomi, sosial budaya, dan politik di Karesidenan Cirebon. Dalam bidang ekonomi budidaya tanaman kopi di Karesidenan Cirebon

memberikan keuntungan besar untuk pihak Belanda, akan tetapi pemusatan tanaman ekspor menyebabkan produksi pangan menurun dan menimbulkan kelaparan, penyalahgunaan penyediaan tanah untuk budidaya tanaman ekspor, kesuburan tanah yang menurun, adanya sistem monopoli, dan adanya korupsi serta penyelewengan di dalam budidaya tanaman ekspor. Sedangkan keadaan sosial budaya yang timbul akibat budidaya tanaman ekspor yaitu para pemimpin pribumi mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial, pemerintah Hindia Belanda membongkar tatanan sosial kaum petani, merenggut tanah para petani dan memaksa petani untuk membudidayakan tanaman ekspor untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda juga mempengaruhi dua unsur pokok kehidupan agraris pedesaan di Karesidenan Cirebon (tanah dan tenaga kerja).

Dalam bidang politik di Karesidenan Cirebon, organisasi desa atau kekuatan feodal tetap dipertahankan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda, para kepala desa semakin besar keterlibatannya atas tanah dan petani, menggunakan pengabdian feodal untuk menjalankan penanaman wajib tanaman ekspor. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda tetap mempertahankan penyerahan wajib dan sistem *apanage*.

Dengan keadaan birokrasi tradisional sangat membantu pemerintah Hindia Belanda dalam mengatur ekonomi, sosial budaya, dan politik di Karesidenan Cirebon. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam birokrasi tradisional membawa dampak yang cukup besar bagi petani. Situasi ini menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi petani Karesidenan Cirebon. Karena pada saat

pelaksanaan budidaya tanaman kopi keluarga petani dikerahkan untuk bekerja membuka lahan untuk penanaman tanaman kopi sehingga para petani tidak memiliki waktu untuk mengolah lahan garapannya sendiri sebagai akibatnya para petani mengalami kemiskinan. Tidak berhenti pada kemiskinan saja melainkan para petani harus kehilangan kesejahteraan sehingga menyebabkan terjadinya bahaya kelaparan karena gagal panen yang mengakibatkan kematian.

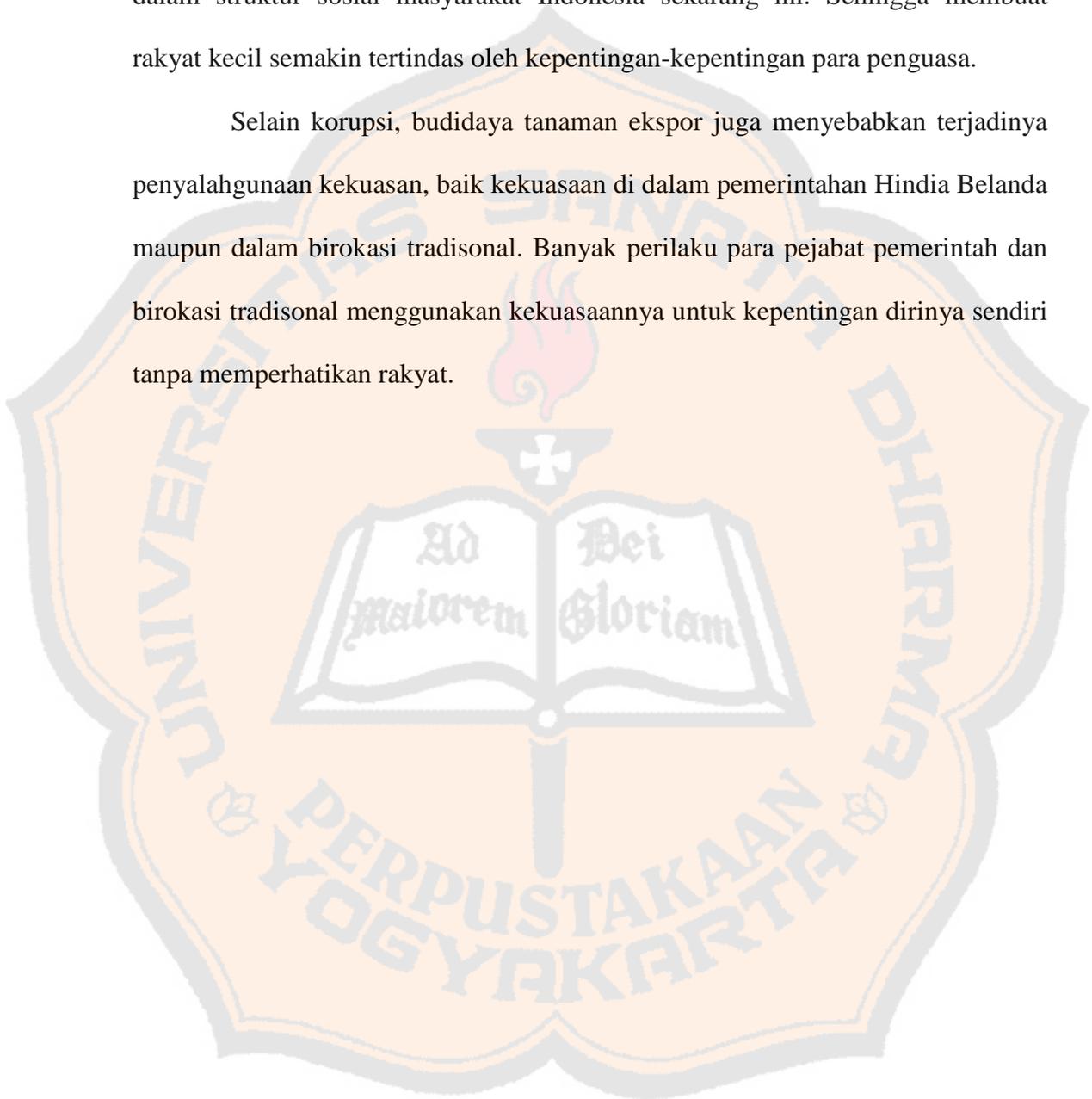
Budidaya tanaman kopi di Karesidenan Cirebon tidak hanya mengakibatkan rakyat menderita akan tetapi juga mempengaruhi perilaku para pegawai pemerintahan di wilayah Hindia Belanda baik pegawai pemerintahan rendah dan pegawai yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan. Dengan adanya kebijakan budidaya tanaman kopi di Karesidenan Cirebon membuat para pegawai pemerintahan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bertujuan untuk memperkaya diri. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan menyebabkan meluasnya korupsi di wilayah Hindia Belanda.

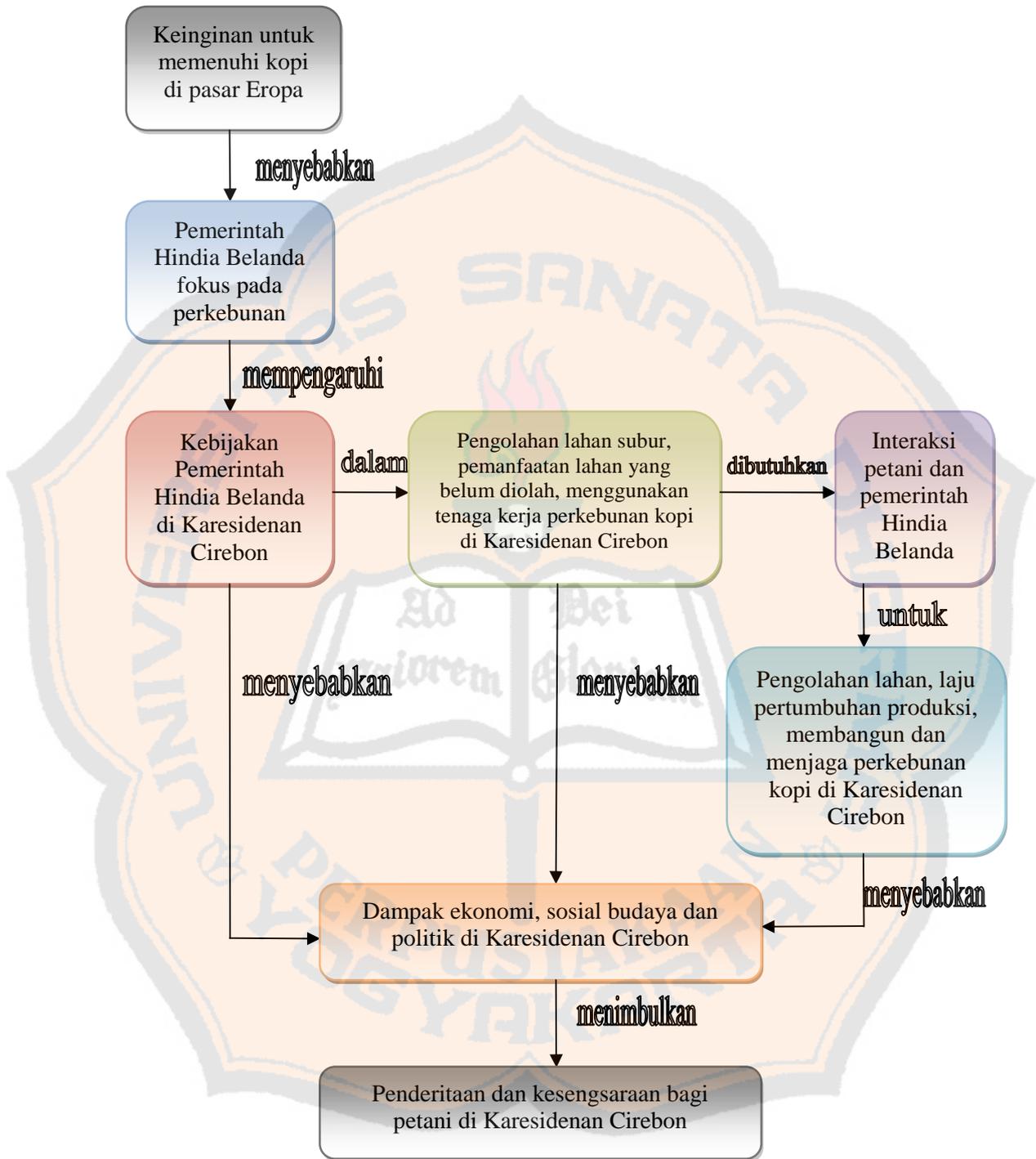
Budaya korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan Hindia Belanda semakin menambah berat kehidupan rakyat kecil. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan yaitu dengan menggunakan kekuasaan melebihi dari yang diperbolehkan dalam peraturan yang bertujuan untuk memperkaya diri dan memenuhi gaya hidup glamor.

Perilaku atau budaya korupsi dalam pemerintahan pada budidaya tanaman ekspor tetap bertahan dan eksis hingga saat ini. Praktek korupsi masih tetap hidup dan terus dilakukan baik didalam pemerintahan maupun dalam

struktur masyarakat. Warisan dari budidaya tanaman ekspor yang berupa pola pikir untuk menguntungkan diri sendiri tercermin dalam perilaku dan tindakan dalam struktur sosial masyarakat Indonesia sekarang ini. Sehingga membuat rakyat kecil semakin tertindas oleh kepentingan-kepentingan para penguasa.

Selain korupsi, budidaya tanaman ekspor juga menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik kekuasaan di dalam pemerintahan Hindia Belanda maupun dalam birokrasi tradisional. Banyak perilaku para pejabat pemerintah dan birokrasi tradisional menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dirinya sendiri tanpa memperhatikan rakyat.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- AAK. 1988. *Budidaya Tanaman Kopi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Abdurahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Logos Wacana ilmu.
- Adeng, dkk. 1998. *Kota Dagang Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutera*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Akatiga.----- . *Jurnal Analisis Sosial: Volume I*. Bandung: Yayasan Akatiga Pusat Analisis Sosial.
- Ansyoriy HM. Nasruddin. 2008. *Bangsa Gagal: Mencari Identitas Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1983. *Sejarah Ekonomi Indonesia Dari Segi Sosiologi*. Jakarta: PT. Pradnya Pramita.
- Bachri, Saiful. 2005. *Sejarah Perekonomian Cetakan I*. Surakarta: Surakarta LPP dan UNS Press.
- Besari, Sahari. 2008. *Teknologi di Nusantara: 40 Abad Hambatan Inovasi*. Jakarta:Penerbit Salemba Teknika.
- Booth, Anne, dkk. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Breman, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah Dan Tenaga Kerja Jawa Di Masa Kolonial*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Burger, D. H. 1977. *Perubahan-Perubahan Struktur Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: PT. Bhratara Karya Aksara.
- Cendekia Tim Pena. 2007. *Wahana IPS: Ilmu Pengetahuan Sosial Semester Pertama 4 A*. Jakarta: Penerbit Yudistira.
- Clifford, Geertz. 1976. *Involusi Pertanian Proses Perubahan Ekologis di Indonesia*. Jakarta: Bharatara KA.
- Colombijn, Freek. 2005. *Kota Lama Kota Baru Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

- Creutzberg, Cieter Pieter dan J.T.M. Van Laanen. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Depdibud. 1996. *Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: CV. Defit Prima.
- _____. 1998. *Kota Dagang Cirebon sebagai Bandar Jalur Sutra*. Jakarta: Depdibud.
- _____.----. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ekadjati, S. Edi. 1978. *Babad Cirebon Edisi Branders Tinjauan Sastra dan Sejarah*. Bandung: Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran.
- _____. 1995. *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Fatta, Hanif Al. 2007. *Analisis dan Perencanaan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Furnivall, J. S. 2009. *Hindia Belanda Studi Tentang Ekonomi Majaemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gilarso. T. 1986. *Ekonomi Indonesia Sebuah Pengantar I*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Graves, Elizabeth E. 2007. *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respon terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haryanto, Tri dkk. 2009. *Ekonomi Pertanian*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hellwing, Tineke. 2007. *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jalil, Abdul. 2008. *Teologi Buruh*. Yogyakarta: LKiS.
- Johan, Irma M. 1996. *Penelitian Sejarah Kebudayaan Cirebon dan Sekitarnya Antara Abad XV-XIX: Tinjauan Bibliografi*. Makalah diskusi Cirebon Sebagai Bandar Jalur Sutra. Cirebon: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Protek IDS.
- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- _____. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I*. Jakarta: PT. Gramedia.
- _____. 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Kern, R.A. dan Hoesein Djajadiningrat-----. *Masa Awal Kerajaan Cirebon*. Jakarta: Bhratara.
- Kompas. 2008. *Ekspedisi Anyer – Panarukan: Laporan Jurnalistik Kompas*. Jakarta: Kompas.
- Kopi PusLit & Kakao Indonesia. 2004. *Panduan Lengkap Budidaya Kakao*. Jakarta: AgroMedia Pustaka.
- Kuntowijoyo. 1995. *Penganrar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Yayasan Benteng Budaya.
- Lindblad, Thomas.J. 2000. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya: Batas-Batas Pembaratan Volume I*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Maeswara, Garda. 2010. *Cikeas Menjawab: Tentang Yayasan-Yayasan Cikeas*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Moertono, Soemarsaid. 1985. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto. 1983. *Politik Pertanian Dan Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- _____. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- _____.1992. *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Niel, Robet van. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta:LP3ES.
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Pahan, Iyung. 2008. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit :Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Partonadi, Soetarman Soediman. 2001. *Komunitas Sadrach dan Akar Kontektualnya: Suatu Ekspresi Kekeristenan Jawa Pada Abad XIX*. Jakarta: Gunung Mulia.

- Poesponegoro, Marwati Djoened. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia: Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Pracoyo, Tri Kurawangsih dan Antyo Pracoyo. 2006. *Aspek Dasar Ekonomi Makro*. Jakarta: PT Grasindo.
- Pranoto, Suhartono W. 2008. *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah: Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Purwanto, Imam. 2007. *Mengenal Lebih Dekat Leguminosae*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Qoyim, Ibnu. 1997. *Kiai Penghulu Jawa: Peranannya di masa Kolonial*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raffles, Sir Thomas Stamford. 1817. *The History of Java*. London: John Murray.
- Ranoh, Ayub. 1999. *Kepemimpinan Kharismatis: Tinjauan Teologis-Etis atas Kepemimpinan Kharismatis Soekarno*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Retnadi, Soetanto Hadinoto, Djoko. 2006. *Micro credit challenge: cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Retnandari, N.D dan Moeljarto Tjokrowinoto. 1991. *Kopi Kajian Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Setiono, Benny G. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Transmedia.
- Simarmata, Rikardo. 2002. *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*. Yogyakarta: Insist Press.
- Simbolon, Parakritri Tahi. 2006. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Siswoputranto. 1993. *Kopi Internasional dan Domestik*. Jakarta: Kanisius.
- Sjamsuddin, Helius dan Edi S. Ekadjati.----- . *Menuju Negara Kesatuan: Negara Pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Soedarso, Boesono. 2009. *Latar Belakang Sejarah dan Kultural Korupsi di Indonesia*. Jakarta: UI Perss.

- Spillane, James J. 1990. *Komoditi Kopi: Peranannya dalam Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Subagio, R. 1975. *Keadaan Bangsa Indonesia Akibat Penjajahan Belanda* dalam Sudiro, *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis 1850-1942 di Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media.
- Sukidin.----. *Sosiologi Ekonomi*. Jember: Center for Society Studies.
- Sunardjo, R. H. Unang. 1983. *Meninjau Sepintas Panggung Sejarah Pemerintahan Kerajaan Cerbon 1479-1809*. Bandung: Tarsito.
- Supriatna, Nana, dkk. 2006. *Ilmu Pengetahuan Sosial (geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi)*. Jakarta: PT Grafindo Media Pratama.
- Suraningrat, Bayu. 1981. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia: Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta: Dewaruri Press.
- Susanto, Budi. -----. *Membaca Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suwarno P.J. 1989. *Sejarah Birokrasi Pemerintah Indonesia Dahulu dan Sekaranag*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Suwarno. 2011. *Latar Belakang dan Fase Awal Pertumbuhan Kesadaran Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyono, Capt. R. P. 2005. *Seks dan Kekerasan pada Zaman Kolonial: Penelusuran Kepustakaan Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Swantoro P. 2002. *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Tjondronegoro, Sodiono M.P. 2008. *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Toer, Pramoedya Ananta . 2005. *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.
- Tugiono, dkk. 2004. *Pengetahuan Sosial Sejarah SMP kelas 2*. Jakarta: Grasindo.

Vletter P. Nas, Martien de. 2009. *Masa Lalu dan Masa Kini: Arsitektur di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wahyudi T. dkk. 2008. *Panduan Lengkap Kakao*. Jakarta: Penerbit Sawdaya.

Wibawa, Prasida. 2008. *Pesona Tosan Aji*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wiharyanto, A. Kardiyat. 2004. *Indonesia Dalam Abad XIX*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Wijayanto, Ridwan Zachrie. 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wijayakusuma, Hembing. 2005. *Pembantaian Massal 1740:Tragedi Berdarah Angke*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Winangun Y.W. Wartaya. 2004. *Tanah Sumber Nilai Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

_____. 1917. *Encyclopaedie Vab Nederlansch-Indie*.

B. INTERNET

<http://ahmadfathulbari.multiply.com/journal/item/19>.

http://1.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PwBePO1RI/AAAAAAAAABs/2ovEttvO3V4/s1600-h/karesidenan.jpg

http://1.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PwBePO1RI/AAAAAAAAABs/2ovEttvO3V4/s1600-h/karesidenan.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PxxFaumxI/AAAAAAAAACU/JXuNWRgsZDc/s1600-h/pelabuhanrcrb.jpg

http://4.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PxxFaumxI/AAAAAAAAACU/JXuNWRgsZDc/s1600-h/pelabuhanrcrb.jpg

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Raden_Sarief_Bastaman_Saleh_Johannes_Graaf_van_den_Bosch.jpg&filetimestamp=20071015233618

<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Ggbaud.jpg&filetimestamp=2007010613493>

[http://id.wikipedia.org/wiki/komoditi kopi](http://id.wikipedia.org/wiki/komoditi_kopi)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Petani>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Parahyangan>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cirebon

<http://iqbal1.wordpress.com/2011/05/05/telisik-sunda-priangan-dan-jawa-barat/>

http://jepret-jepretkamera.blogspot.com/2011/02/gedung-kuno-di-cirebon_5798.html

http://kopiluwaksundaville.com/?page_id=561

<http://multiply.com/mu/djawatempodoeloe/image/34/photos/264/500x500/9/11-crb-binnenhaven.JPG?et=keYXBe8z4v%2CgL8WaL%2CmEAg&nmid=6496948>

<http://multiply.com/mu/djawatempodoeloe/image/34/photos/264/500x500/9/11-crb-binnenhaven.JPG?et=keYXBe8z4v%2CgL8WaL%2CmEAg&nmid=64969458><http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-VWRCSSIrMZY9hZTzYd71-bwCEPSHYq4K7QXBgPffW3il5OYZ>

<http://pkab.wordpress.com/2008/08/08/penggalan-sejarah-bukti-hebatnya-industri-pertanian-kehutanan-dan-k/>

<http://ridwansubagja.blogspot.com/2008/01/kondisi-sosial-ekonomi-petani-tebu-di.html>

<http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/03/cultuurstelsel-kemiskinan-struktural-di-jawa-abad-ke-19/>

<http://sejarah.kompasiana.com/2011/05/03/cultuurstelsel-kemiskinan-struktural-di-jawa-abad-ke-19>

<http://tatangmanguny.wordpress.com/kontroversi/kerajaan-talaga-melacak-kepenasaran/>

<http://tatangmanguny.wordpress.com/kontroversi/kerajaan-talaga-melacak-kepenasaran/>

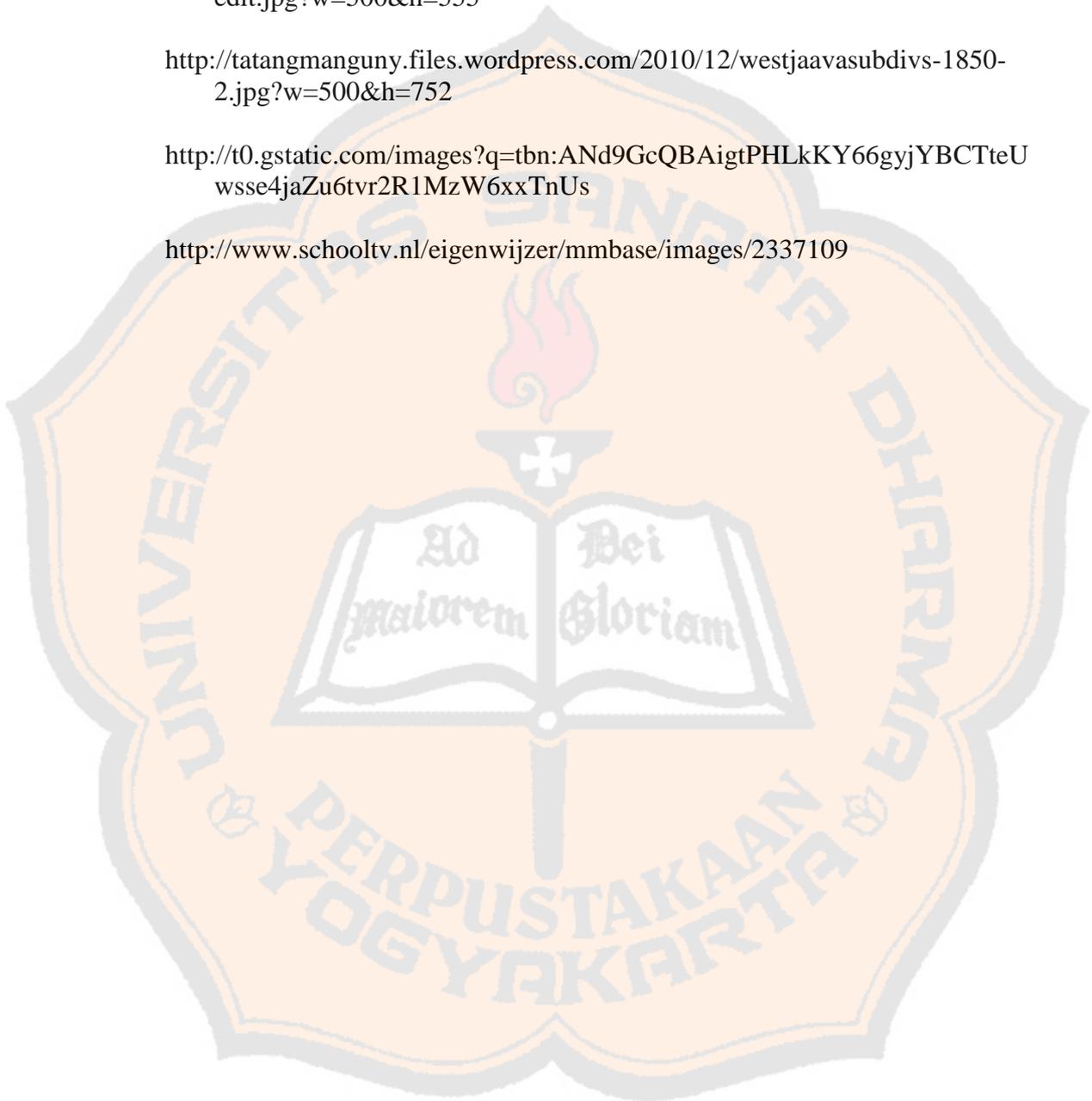
<http://tatangmanguny.wordpress.com/sejarah-kabupaten-majalengka-bungarampai/kabupaten-majalengka-melacak-jejak-hindia-belanda/>

<http://tatangmanguny.files.wordpress.com/2010/12/javakaart1860grootedit.jpg?w=500&h=555>

<http://tatangmanguny.files.wordpress.com/2010/12/westjaavasubdivs-1850-2.jpg?w=500&h=752>

<http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBAigtPHLkKY66gyjYBCTteUwsse4jaZu6tvr2R1MzW6xxTnUs>

<http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/mmbase/images/2337109>



LAMPIRAN



Peta Karesidenan Cirebon tahun 1845



Sumber: <http://tatangmanguny.wordpress.com/sejarah-kabupaten-majalengka-bunga-rampai/kabupaten-majalengka-melacak-jejak-hindia-belanda/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 10:49 AM.

Peta Majalengka dan Kuningan pada tahun 1850



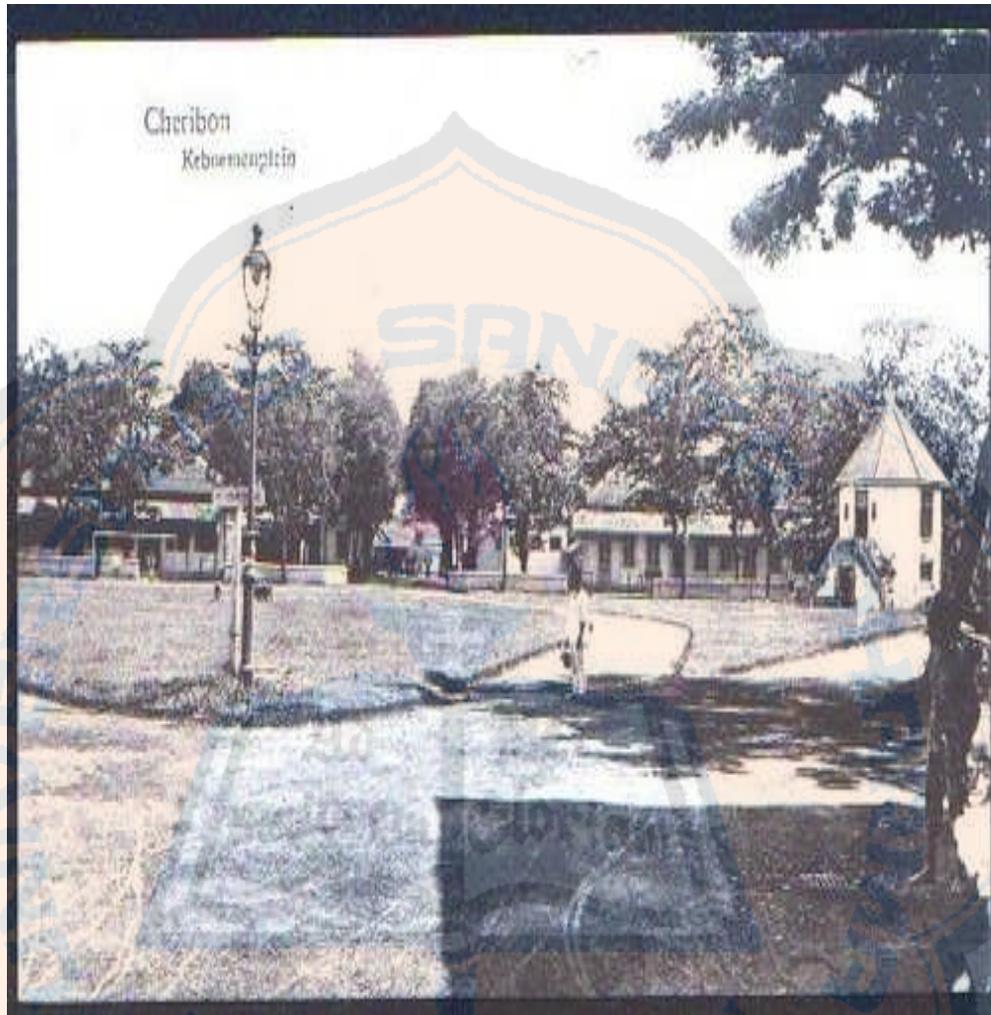
Sumber: <http://tatangmanguny.files.wordpress.com/2010/12/westjaavasubdivs-1850-2.jpg?w=500&h=752> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 10:45 AM.

Karesidenan Cirebon



Sumber:http://1.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PwBePO1RI/AAAAAAAAABs/2ovEttvO3V4/s1600-h/karesidenan.jpg diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:05 AM.

Karesidenan Cirebon dari samping



Sumber:http://1.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PwBePO1RI/AAAAAAAAABs/2ovEttvO3V4/s1600-h/karesidenan.jpg diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:08 AM.

Kantor Karesidenan Cirebon sekarang



Sumber:http://jepret-jepretkamera.blogspot.com/2011/02/gedung-kuno-di-cirebon_5798.html diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:10 AM.

Gudang kopi masa *Cultuurstelsel*



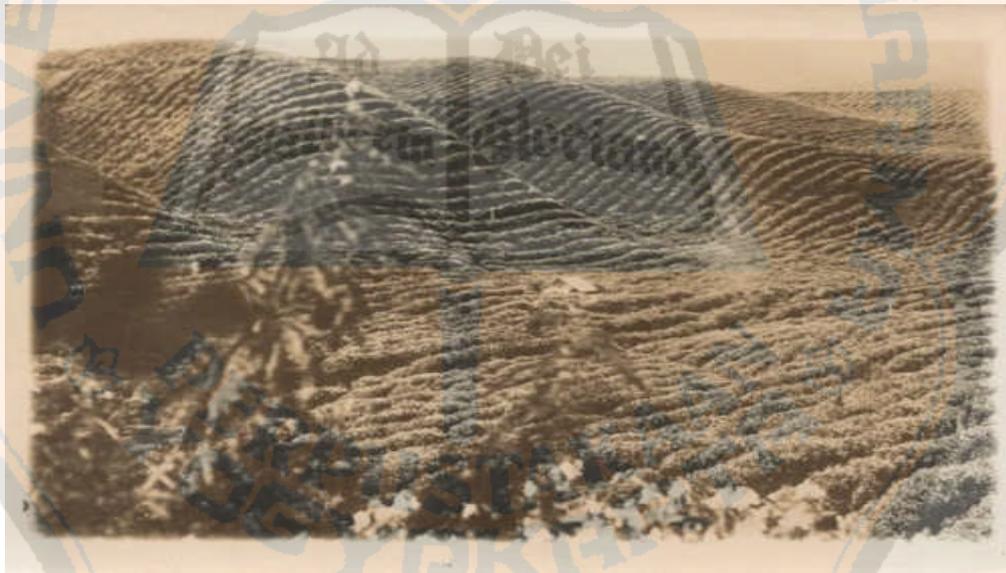
Sumber:<http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQBAigtPHLkKY66gyjYBCTteUwsse4jaZu6tvr2R1MzW6xxTnUs> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:02 AM.

Proses pengolahan kopi



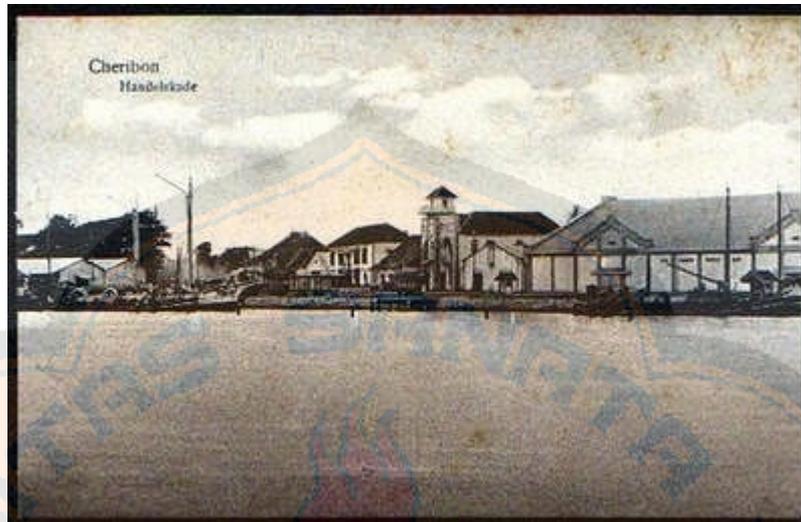
Sumber: http://kopiluwaksundaville.com/?page_id=561 diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:15 AM.

Perkebunan kopi



Sumber: <http://pkab.wordpress.com/2008/08/08/penggalan-sejarah-bukti-hebatnya-industri-pertanian-kehutanan-dan-k/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:17 AM.

Pusat pemerintahan Hindia Belanda di dekat pelabuhan Cirebon



Sumber:http://4.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPCOU/S6PxxFaumxI/AAAAAAAAACU/JXuNWRgsZDc/s1600-h/pelabuhancrb.jpg diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:20 AM.

Pelabuhan Cirebon



Sumber:<http://multiply.com/mu/djawatempodoeloe/image/34/photos/264/500x500/9/11-crb-binnenhaven.JPG?et=keYXBe8z4v%2CgL8WaL%2CmEA&nmid=64969458> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:22 AM.

Keadaan di sekitar pelabuhan Cirebon



Sumber: http://4.bp.blogspot.com/_CwRJ8XrPC0U/S6PxfFaumxI/AAAAAAAAACU/JXuNWRgsZDc/s1600-h/pelabuhancrb.jpg diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:28 AM.

Keramaian di pelabuhan Cirebon



Sumber: <http://multiply.com/mu/djawatempodoeloe/image/34/photos/264/500x500/9/11-crb-binnenhaven.JPG?et=keYXBe8z4v%2CgL8WaL%2CmEAg&nmid=64969458> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:30 AM.

Keadaan pelabuhan Cirebon sekarang



Sumber:<http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-VWRCSsIrMZY9hZTzYd71-bwCEPSHYq4K7QXBgPffW3il5OYz> diakses pada tanggal 12 Agustus 2011 pukul 11:35 AM.

Johannes Graaf van den Bosch Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1830-1833



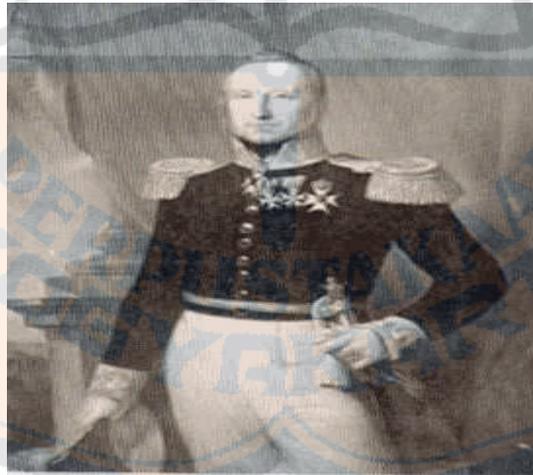
Sumber:http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Raden_Sarief_Bastaman_Saleh_Johannes_Graaf_van_den_Bosch.jpg&filetimestamp=20071015233618 diakses pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 12:55 PM.

J. C. Baud Gubernur Hindia Belanda 1833-1836



Sumber:<http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Ggbaud.jpg&filetimestamp=20070106134933> diakses pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 1:05 PM.

D. J. de Eearnes Gubernur Jenderal 1836-1840



Sumber:<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/8/8d/Ggeerens.jpg> diakses pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 1:10 PM.

A.J. Duymaer van Twist Gubernur Jendral



Sumber: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/d/d1/Ggtwist.jpg> diakses pada tanggal 09 Desember 2010 pukul 1:20 PM.



SUPLEMEN

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Nama Sekolah : SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas : XI
Semester : II
Standar Kompetensi : Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK/PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN			ALOKASI WAKTU	MEDIA DAN SUMBER BELAJAR
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen	Contoh Instrumen		
2. Memahami perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia pada masa Kolonial.	Perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya di Cirebon pada masa Kolonial. Uraian materi : 1. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di Cirebon.	1. Melalui diskusi kelompok, siswa membahas tentang kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap	Diharapkan siswa dapat : 1. Menjelaskan kebijakan pemerintahan Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. Ulangan Akhir Semester	a. Laporan tertulis. b. LKS, Kuis. c. Tes uraian, dan PG. d. Uraian refleksi.	Diskusi-kanlah dalam kelompok mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di Cirebon? Kemudian dipresentasikan!	3 jp	Lihat Lampiran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

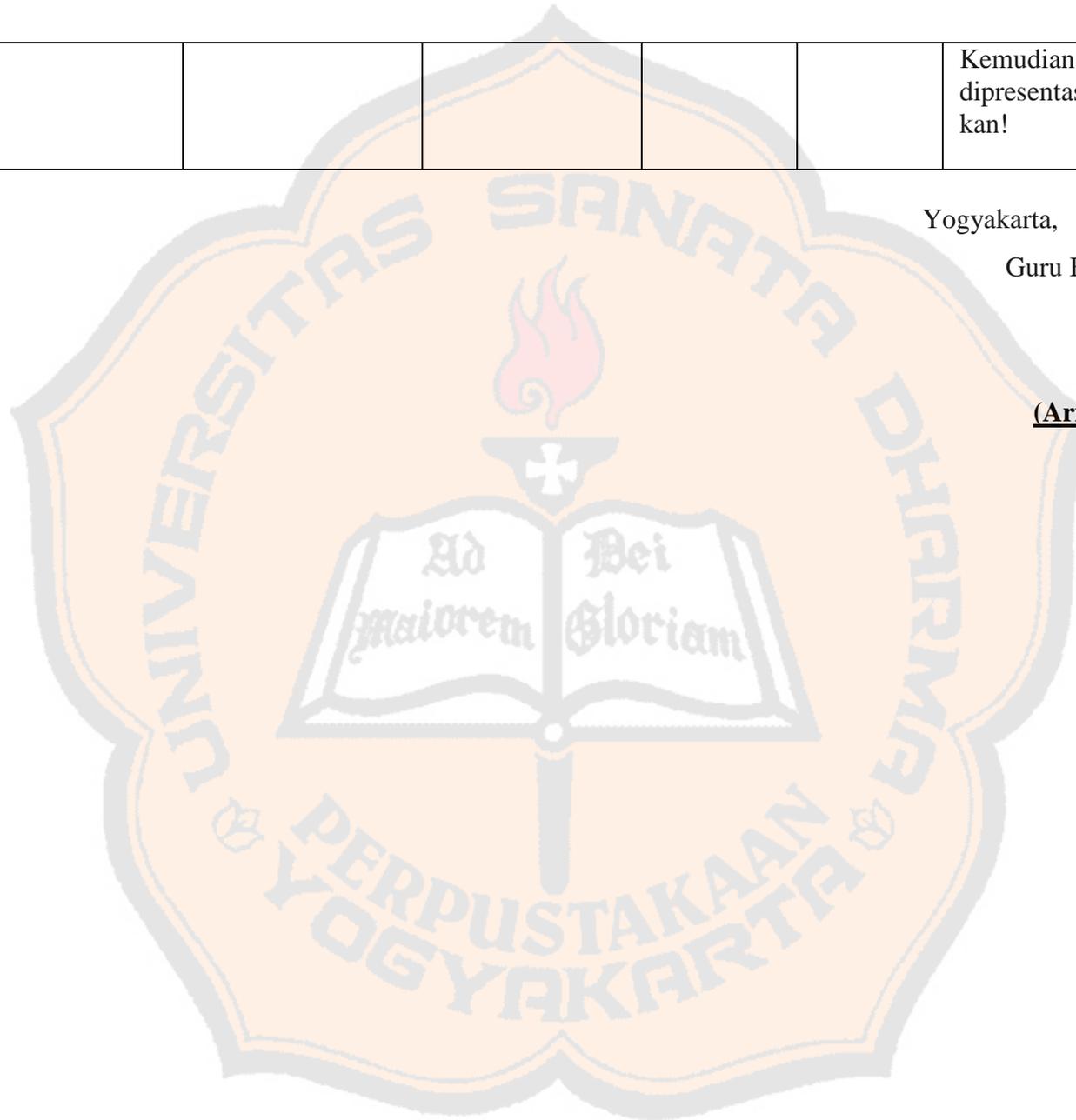
		perkebunan kopi di Cirebon.	Cirebon.					
	2. Interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870.	2. Melalui diskusi kelompok, siswa membahas tentang interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870.	Diharapkan siswa dapat : 1. Menganalisis interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870.	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. Ulangan Akhir Semester	a. Laporan tertulis. b. LKS, Kuis. c. Tes uraian, dan PG. d. Uraian refleksi.	Diskusikanlah dalam kelompok mengenai interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon pada tahun 1850-1870? Kemudian dipresentasikan!		
	3. Dampak pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.	3. Melalui diskusi kelompok, siswa membahas tentang dampak pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.	Diharapkan siswa dapat : 3. Menganalisis dampak pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. Ulangan Akhir Semester	a. Laporan tertulis. b. LKS, Kuis. c. Tes uraian, dan PG. d. Uraian refleksi.	Diskusikanlah dalam kelompok mengenai dampak pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan?		

						Kemudian dipresentasikan!		
--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Yogyakarta,

Guru Bidang Studi

(Arny Porba)



Lampiran 1: Media Pembelajaran

1. LCD dan Power point
2. Peta fisik Karesidenan Cirebon tahun 1850
3. Gambar tokoh (Gubernur Jendral Hindia Belanda)
4. Primida masyarakat masa *Cultuurstelsel*.

Lampiran 2: Sumber Belajar

Booth, Anne. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Creutzberg, P. dan Van Laanen, J. T. M. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

I Wayan Badrika. 2006. *Sejarah Untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga.

Sartono Kartodirdjo, Suryo Djoko. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Van Niel, Robert. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Satuan Pendidikan : SMA STELLA DUCE 2 YOGYAKARTA
Mata Pelajaran : SEJARAH
Kelas / Semester : XI/Genap
Materi Pokok : Perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya di Cirebon pada masa Kolonial.
Waktu : 3 x 45 menit

1. Standar Kompetensi

Menganalisis perkembangan bangsa Indonesia sejak masuknya pengaruh Barat sampai dengan pendudukan Jepang.

2. Kompetensi Dasar

Menganalisis perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat di Indonesia pada masa Kolonial.

3. Indikator

- a. Menjelaskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di Cirebon.
- b. Menganalisis interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon.
- c. Menganalisis dampak dari pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.

4. Tujuan Pembelajaran

Setelah proses belajar mengajar terlaksana, diharapkan siswa dapat:

- a. Menjelaskan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di Cirebon.
- b. Menganalisis interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon.

- c. Menganalisis dampak dari pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan.

5. Materi Pembelajaran

Petani dan Perkebunan Kopi Sistem Priangan di Cirebon :

- a. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda
- b. Interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi
- c. Dampak dari pelaksanaan perkebunan kopi bagi petani dan pemilik perkebunan.

6. Metode

Metode atau pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah:

- a. Tugas kelompok
- b. Presentasi
- c. Tanya jawab
- d. Penugasan

7. Kegiatan Belajar Mengajar

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pembukaan	
	1. Salam pembuka dan presensi 2. Apersepsi: Guru memberikan gambaran tentang perkebunan kopi sistem Priangan. 3. Motivasi: siswa dapat mendeskripsikan perkebunan kopi sistem Priangan di Karesidenan Cirebon. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	10'

<p>2.</p>	<p>Kegiatan inti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok diskusi. 2. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang telah ditentukan. 3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi. 4. Guru memberi klarifikasi pada jawaban yang kurang tepat dan memberi pemantapan pada jawaban yang benar. 	<p>10'</p> <p>20'</p> <p>70'</p> <p>15'</p>
<p>3.</p>	<p>Penutup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru bersama siswa menarik kesimpulan dari materi yang baru di pelajari. 2. Guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi, nilai-nilai apa yang didapat dari materi yang disampaikan. (lampiran 1). 3. Guru memberikan arahan tindak lanjut pembelajaran (tugas mandiri). (lampiran 2). 	<p>10'</p>

8. Sumber dan Media Belajar

A. Sumber

Booth, Anne. 1988. *Sejarah Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Creutzberg, P. dan Van Laanen, J. T. M. 1987. *Sejarah Statistik Ekonomi*

Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

I Wayan Badrika. 2006. *Sejarah Untuk SMA Kelas XI*. Jakarta: Erlangga.

Sartono Kartodirdjo, Suryo Djoko. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia. Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.

Van Niel, Robert. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. Jakarta: LP3ES.

B. Media

- a. Peta fisik Karisedenan Cirebon tahun 1850
- b. Gambar tokoh (Gubernur Jendral Hindia-Belanda)
- c. Piramida struktur masyarakat masa *Cultuurstelsel*
- d. LCD
- e. Power point.

9. Penilaian

a. Penilaian produk

Jenis tagihan : Tugas Kelompok, Tes/Ulangan harian

b. Penilaian proses:

- 1) Jenis tagihan : tugas individu, refleksi (lihat lampiran II)
- 2) Penilaian ketrampilan kooperatif

No	Nama	Menghargai Teman	Mengambil Giliran	Mengajukan Pertanyaan	Mempresentasi kan hasil	Menjawab pertanyaan	Mendengar kan dengan aktif	Jumlah

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1:5 dengan kriteria :

Skor 1 : Pasif, tidak kooperatif dan tidak menghargai teman.

Skor 2 : Pasif, tidak kooperatif, tetapi dapat menghargai teman.

Skor 3 : Pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman.

Skor 4 : Aktif, kooperatif dan dapat menghargai teman.

Skor 5 : Aktif, sangat kooperatif, dan dapat menghargai teman.

Nilai Proses:

$$N = \frac{\text{JumlahSkor}}{30} \times 100\%$$

Nilai Produk:

$$N = \frac{\text{Jumlah Skor} \times 100\%}{70}$$

Nilai Akhir (NA):

$$\begin{aligned} \text{NA} &= \text{Nilai Proses} + \text{Nilai Produk} \\ &= 30 \% \text{ N Proses} + 70\% \text{N Produk} \end{aligned}$$

c. Tindak Lanjut

- 1) Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 65%.
- 2) Siswa diberikan program remidi apabila tidak memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 65%.
- 3) Siswa diberikan program pengayaan apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 65%.

Mengetahui

Yogyakarta,

Kepala Sekolah

Guru Bidang Studi

(.....)

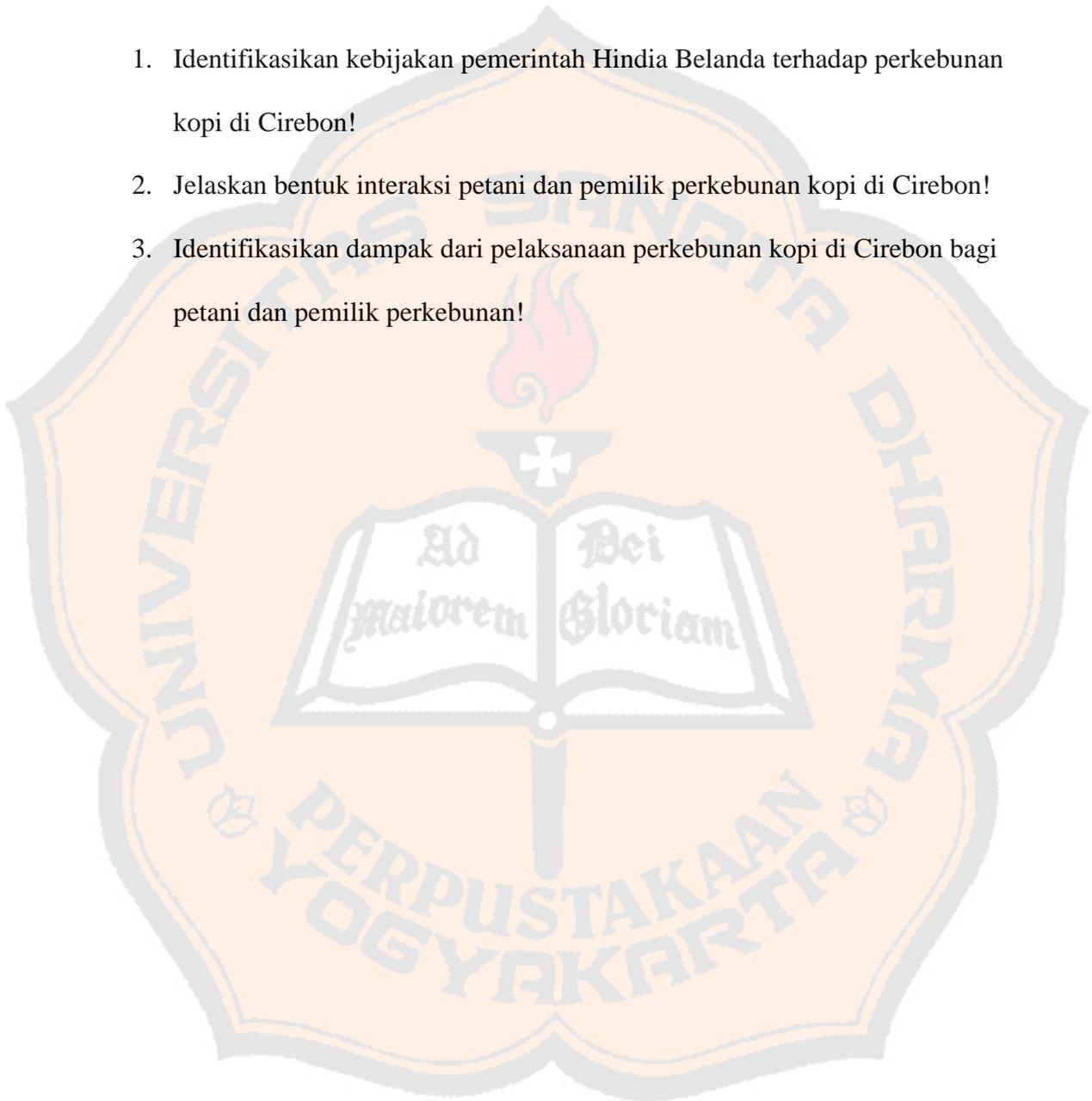
(Arny Porba)

NIP.

LAMPIRAN I

SOAL EVALUASI

1. Identifikasikan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap perkebunan kopi di Cirebon!
2. Jelaskan bentuk interaksi petani dan pemilik perkebunan kopi di Cirebon!
3. Identifikasikan dampak dari pelaksanaan perkebunan kopi di Cirebon bagi petani dan pemilik perkebunan!



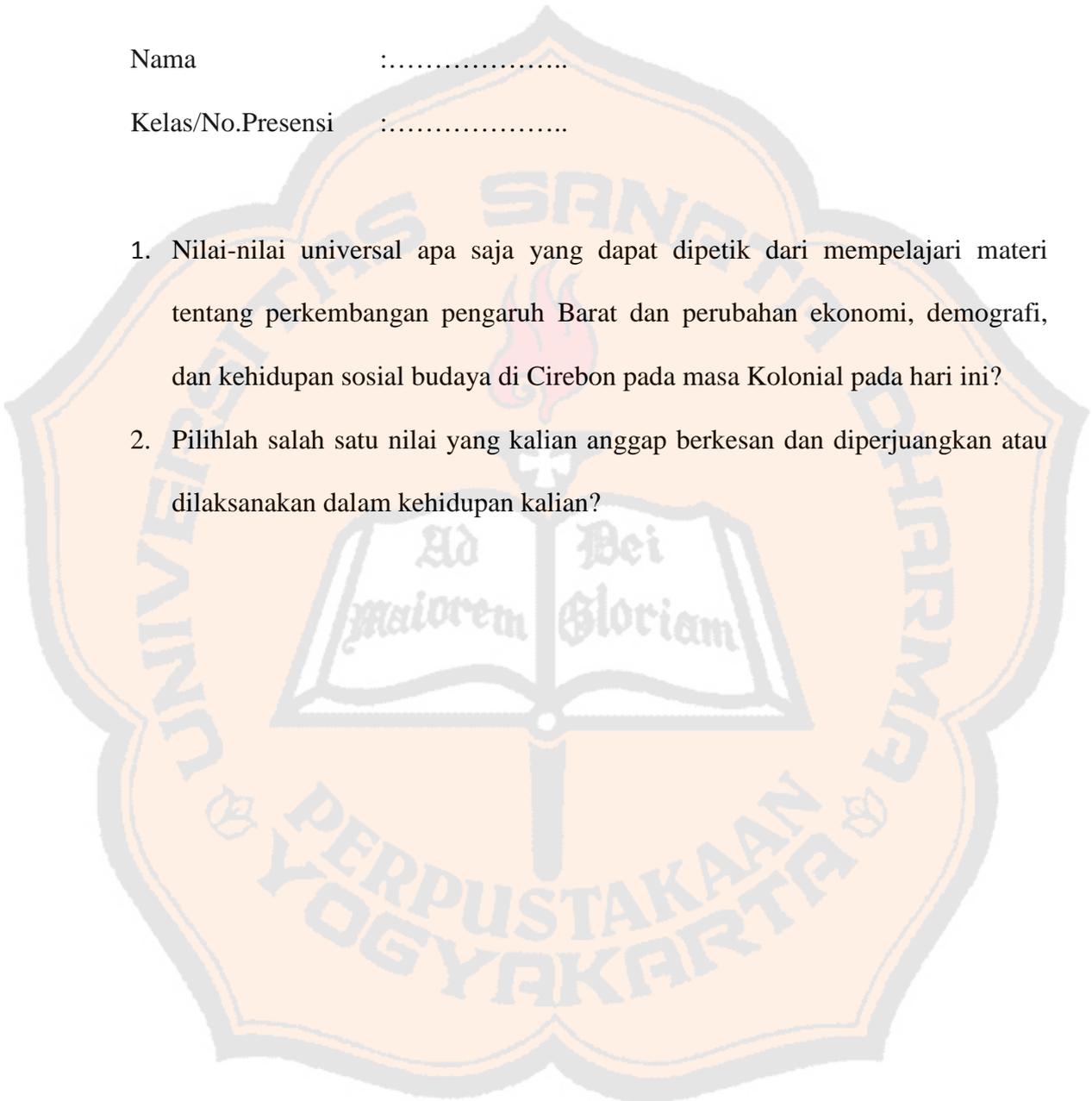
LAMPIRAN II

REFLEKSI

Nama :.....

Kelas/No.Presensi :.....

1. Nilai-nilai universal apa saja yang dapat dipetik dari mempelajari materi tentang perkembangan pengaruh Barat dan perubahan ekonomi, demografi, dan kehidupan sosial budaya di Cirebon pada masa Kolonial pada hari ini?
2. Pilihlah salah satu nilai yang kalian anggap berkesan dan diperjuangkan atau dilaksanakan dalam kehidupan kalian?



LAMPIRAN III

TUGAS MANDIRI

1. Jelaskan 3 dampak penerapan sistem *Cultuurstelsel* bagi kehidupan penduduk pribumi!
2. Sebutkan kebijakan-kebijakan dalam budidaya tanaman kopi menurut lembar Negara (*Staatsblad*) tahun 1834, no 22!
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem apanage!
4. Sebutkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam budidaya tanaman kopi!

